Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Rencana Strategis
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029. Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah acuan utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran untuk jangka waktu 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029 serta tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perumusan dan penyusunan Renstra dilakukan dengan transparan, responsif, efisien, efektif, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Akhirnya, semoga Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi setiap unit kerja melakukan tugas dan fungsinya untuk meningkatnya kemudahan dan kualitas layanan masyarakat, mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk layanan publik yang optimal, serta mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk lingkup kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Jakarta, September 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

M. Anwar
NIP 196605281998031003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **3**
DAFTAR GAMBAR **4**
BAB 1 PENDAHULUAN **5**

1.1 LATAR BELAKANG 5
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8

1.3.1 MAKSUD 8
1.3.2 TUJUAN 8

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS **10**

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 10
2.2 GAMBARAN TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR, DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 34
2.3 GAMBARAN SUMBER DAYA MANUSIA PERANGKAT DAERAH 51
2.4 GAMBARAN ASET DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 58
2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 66
2.6 CAPAIAN KINERJA DAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA 2020-2024 87

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **98**

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029 98
3.2 STRATEGI RENSTRA TAHUN 2025-2029 99
3.3 ARAHAN KEBIJAKAN KEWILAYAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 102
3.4 KEBIJAKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029 111
3.5 POHON KINERJA RENSTRA TAHUN 2025-2029 113

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA **118**

4.1 KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2025-2029 131
4.2 PROGRAM PRIORITAS DAERAH 131
4.3 PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH 131
4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI 147

BAB 5 PENUTUP **149**

5.1 KESIMPULAN 149
5.2 KAIDAH PELAKSANAAN 149
5.3 PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI 150

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Profil Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan 11
Tabel 2.2 Profil Suhu, Kelembapan, Curah Hujan, dan Jumlah Hari Hujan 14
Tabel 2.3 Profil Wadah Parkir Air Kota Administrasi Jakarta Selatan 16
Tabel 2.4 Profil Kependudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan 18
Tabel 2.5 PDRB Atas Harga Berlaku Kota Administrasi Jakarta Selatan (triliun rupiah) 22
Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 menurut lapangan usaha 22
Tabel 2.7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha 24
Tabel 2.8 Perkembangan IPM Kota Administrasi Jakarta Selatan 26
Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 51
Tabel 2.10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia 52
Tabel 2.11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan 53
Tabel 2.12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 54
Tabel 2.13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural 55
Tabel 2.14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional 56
Tabel 2.15 Kondisi Eksisting Kekosongan Formasi Jabatan ASN 56
Tabel 2.16 Kekosongan Formasi Jabatan ASN Hasil Analisis ABK 57
Tabel 2.17 Jumlah Aset Menurut Jenis 58
Tabel 2.18 Jumlah Aset Tanah 59
Tabel 2.19 Jumlah Aset Gedung dan Bangunan 59
Tabel 2.20 Jumlah Aset/Modal Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan 60
Tabel 2.21 Status Pemenuhan Standar Rumah Dinas dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan 65
Tabel 2.22 Status Kondisi Fisik Gedung Kantor Kecamatan Dan Kelurahan 66
Tabel 2.23 Permasalahan Bagian Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 68
Tabel 2.24 Capaian Indikator Makro Kota Administrasi Jakarta Selatan 71
Tabel 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan 72
Tabel 2.26 Gini Rasio Kota Administrasi Jakarta Selatan 78
Tabel 2.27 Isu Strategis Perangkat Daerah 83
Tabel 2.28 Realisasi Capaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 87
Tabel 2.29 Realisasi Capaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 88
Tabel 2.30 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2020-2022 90
Tabel 2.31 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023-2024 92
Tabel 2.32 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022 93
Tabel 2.33 Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023-2024 96
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra 2025-2029 100
Tabel 3.2 Penahapan strategi Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 101
Tabel 3.3 Target Indikator Makro Kewilayahan 2025-2029 105
Tabel 3.4 Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan Isu Strategis Kewilayahan 108
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 111
Tabel 3.6 Rumusan Tujuan Renstra Berdasarkan Isu Strategis 113
Tabel 3.7 Rumusan Sasaran Renstra Berdasarkan CSF Tujuan Renstra 114
Tabel 3.8 Rumusan Program Perangkat Daerah Berdasarkan CSF Sasaran Renstra 114
Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Renstra 2025-2029 123
Tabel 4.2 Program Prioritas, Outcome, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra 134
Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pendanaan Renstra 2025-2029 ... 136
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Renstra 2025-2029 147
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Renstra 2025-2029 147

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan 11
Gambar 2.2 Peta Ketinggian Wilayah DKI Jakarta 12
Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Wilayah DKI Jakarta 13
Gambar 2.4 Peta Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 15
Gambar 2.5 Ekoregion Provinsi DKI Jakarta 17
Gambar 2.6 Profil Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan 19
Gambar 2.7 Generasi dan Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan 19
Gambar 2.8 Jumlah Kepala Keluarga dan Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan 20
Gambar 2.9 Laju Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Administrasi Jakarta Selatan 21
Gambar 2.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 26
Gambar 2.12 Pekerjaan Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Usia 15 Tahun Ke Atas 27
Gambar 2.13 Distribusi Jasa Lingkungan Hidup Tahun 2020 29
Gambar 2.14 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2020 30
Gambar 2.15 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air Tahun 2020 31
Gambar 2.16 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara Tahun 2020 32
Gambar 2.17 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Banjir Tahun 2018 34
Gambar 2.18 Susunan Organisasi Kota Administrasi 38
Gambar 2.19 Indeks Pencemaran Air Tanah Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 80
Gambar 3.1 Peta pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan 104
Gambar 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan 106
Gambar 3.3 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Administrasi Jakarta Selatan 106

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum yang kuat serta amanat strategis dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dari tingkat nasional hingga daerah. Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya penyusunan rencana pembangunan yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipimpin oleh Walikota yang merupakan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun secara komprehensif dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang selaras dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2029.

Sebagai satu kesatuan wilayah otonomi daerah, rencana pembangunan yang termuat dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 menjadi upaya untuk mendukung visi besar Jakarta 20 tahun ke depan berupa Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 bersama dengan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 adalah operasionalisasi tahapan pertama RPJPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Keberhasilan dan ketepatan penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 berperan penting membangun fondasi yang kuat dan kokoh mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045 dan Jakarta Kota Global 2045. Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 juga memuat indikator kinerja dan pendanaan,

ditetapkan Walikota, dan mengikat bagi setiap unsur struktur perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 akan menjadi acuan untuk pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan serta evaluasi capaian sasaran kinerja pembangunan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran secara realistis untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Renstra Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Perumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
3. Penyusunan rancangan Renstra dan pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
4. Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029.
6. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
7. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 diharapkan menjadi acuan dan dipedomani setiap unit kerja sehingga tugas dan fungsinya mencapai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan, turut serta mendukung mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029, serta visi dan agenda pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
8. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2025-2029.
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (dua puluh) Besar Kota Global Dunia.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

1.3.2 TUJUAN

Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029 ditetapkan dengan tujuan:

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan mengkoordinasikan antar perangkat daerah, lintas sektor dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan daerah di Jakarta Selatan secara konsisten, adaptif, integratif, kolaboratif, dan berkelanjutan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; dan
4. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029, terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN, terdiri atas:

1.1 Latar belakang;

1.2 Dasar hukum penyusunan;

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, terdiri atas:

2.1 Gambaran umum wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

2.2 Gambaran tugas, fungsi, struktur, dan pelayanan perangkat daerah;

2.3 Gambaran sumber daya manusia perangkat daerah;

2.4 Gambaran aset dan keuangan perangkat daerah;

2.5 Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

2.6 Capaian kinerja dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020-2024

Bab 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN, terdiri atas:

3.1 Tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029;

3.2 Strategi Renstra tahun 2025-2029;

3.3 Arahan kebijakan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

3.4 Kebijakan Renstra tahun 2025-2029;

3.5 Pohon kinerja Renstra tahun 2025-2029.

Bab 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, terdiri atas:

4.1 Program prioritas daerah;

4.2 Program prioritas perangkat daerah;

4.3 Kegiatan dan sub kegiatan Renstra tahun 2025-2029;

4.4 Indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci.

Bab 5 PENUTUP

Bagian ini menguraikan kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

WILAYAH ADMINISTRATIF

Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki peranan strategis sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan pemukiman yang berkembang pesat. Jakarta Selatan dikenal juga sebagai salah satu kawasan elit, dilengkapi berbagai fasilitas publik yang lengkap, mulai dari pusat perbelanjaan, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan yang modern, hingga tempat hiburan dan kuliner. Jakarta Selatan sebagai bagian dari metropolitan Jakarta menjadikannya salah satu wilayah administratif berperan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta dan Republik Indonesia. Berbagai infrastruktur transportasi yang terus dikembangkan mendukung mobilitas yang efisien dan memperkuat posisi Jakarta Selatan sebagai pusat ekonomi yang kompetitif. Selain itu, sektor jasa dan pariwisata juga berkembang pesat, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Ragam budaya yang hidup di Jakarta Selatan memengaruhi perkembangan kuliner dan gaya hidup lintas generasi khususnya kaum muda urban, menjadikan wilayah ini destinasi menarik wisatawan lokal maupun internasional yang ingin menikmati suasana urban yang modern, dinamis, termasuk budaya betawi.

Secara astronomis Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak antara $106^0$45’0 Bujur Timur (BT) dan $6^0$15’40,8 Lintang Selatan (LS). Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 adalah 144,75 km^2. Batas-batas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

- Utara: Banjir Kanal Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Tanah Abang (Kota Administrasi Jakarta Pusat), Jl. Kebayoran Lama, dan Kebun Jeruk
- Timur: Kali Ciliwung
- Selatan: Kota Administrasi Depok
- Barat: Kecamatan Ciledug, Kota Administrasi Tangerang.

Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan, 65 kelurahan, 579 RW, dan 6.059 RT. Kecamatan Tebet memiliki jumlah RT paling besar sebesar 922 RT. Profil wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Profil Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Jagakarsa	25,06	6	54	547
2	Pasar Minggu	21,62	7	65	723
3	Cilandak	17,75	5	46	469
4	Pesanggrahan	13,49	5	51	526
5	Kebayoran Lama	19,06	6	77	837
6	Kebayoran Baru	12,69	10	73	637
7	Mampang Prapatan	7,94	5	38	406
8	Pancoran	8,87	6	46	501
9	Tebet	9,35	7	79	922
10	Setiabudi	8,92	8	50	491
Kota Jakarta Selatan		144,75	65	579	6.059

Sumber: Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik

Gambar 2.1 menampilkan wilayah administratif Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan. Kecamatan Jagakarsa memiliki luas wilayah terluas sebesar 25,06 km^2 kemudian diikuti Kecamatan Pasar Minggu sebesar 21,62 km^2. Kecamatan Mampang Prapatan adalah wilayah dengan luas terkecil sebesar 7,94 km^2. Kecamatan Kebayoran Baru memiliki jumlah kelurahan paling banyak sebesar 10. Kecamatan Kebayoran Lama memiliki jumlah RW paling besar sebesar 77 RW.

Gambar 2.1 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Setiap kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda, yang mencerminkan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Kecamatan Jagakarsa, dengan luas wilayah terluas, didominasi oleh kawasan pemukiman yang relatif lebih hijau dan memiliki sejumlah area konservasi serta ruang terbuka hijau yang penting bagi keseimbangan ekosistem dan jasa lingkungan kota. Kecamatan Pasar Minggu dikenal sebagai pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi yang padat, dengan pasar tradisional yang menjadi salah satu ikon daerah tersebut.

Jumlah kelurahan yang paling banyak di Kecamatan Kebayoran Baru menuntut peningkatan pelayanan publik yang responsif serta birokrasi pemerintahan yang tanggap dan cepat menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Kecamatan Kebayoran Lama, dengan jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak, menjadi modal sosial penting dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

TOPOGRAFI DAN LITOLOGI

Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 26,2 meter diatas permukaan laut. Secara umum, kemiringan lereng kategori relatif datar, namun di beberapa titik memiliki kemiringan lereng kontur bergelombang. Wilayah Kecamatan Setiabudi, Pancoran, Mampang, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru.

Gambar 2.2 Peta Ketinggian Wilayah DKI Jakarta

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029 dan DEMNAS, 2015

Karakteristik tanah (litologi) dangkal pada kedalaman 8-15 meter, sebagian wilayah, lapisan permukaan tanah keras terdapat pada kedalaman 40 meter. Jenis batuan umumnya batuan gunung api muda. Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki peran penting sebagai wilayah hulu. Kondisi geologi ini memberikan pengaruh signifikan terhadap aspek hidrologi dan tata kelola sumber daya air. Sebagai daerah hulu, Jakarta Selatan berfungsi sebagai daerah resapan air yang vital dan mencegah terjadinya banjir di wilayah hilir. Oleh karena itu, perizinan pembangunan dan mitigasi dampak dari aktivitas penduduk di Jakarta Selatan harus dilakukan dengan memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan agar fungsi ekologi lingkungan alam tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat.

Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Wilayah DKI Jakarta
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2024–2044

KLIMATOLOGI

Wilayah Jakarta Selatan termasuk ke dalam iklim tropis yang ditandai dengan suhu yang cenderung tinggi sepanjang tahun. Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 2.1, suhu rata-rata di Jakarta Selatan berada pada kisaran 27,96°C hingga 30,13°C, dengan suhu tertinggi tercatat pada bulan Mei yaitu 30,13°C, dan suhu terendah pada bulan Juli yaitu 27,96°C. Selain suhu, kelembapan udara di Jakarta Selatan juga menunjukkan fluktuasi sepanjang tahun, berkisar antara 71,53% hingga 81,75%. Kelembapan tertinggi tercatat pada bulan Februari yaitu 81,75%, sedangkan kelembapan terendah tercatat pada bulan September yaitu 71,53%.

Musim hujan di Jakarta Selatan terjadi pada periode Oktober hingga Maret, sesuai dengan karakteristik iklim tropis. Selama musim hujan, curah hujan rata-rata bulanan di Jakarta Selatan sangat bervariasi, dengan bulan tertinggi curah hujan terjadi pada bulan Desember yang mencapai 338,7 mm, diikuti bulan Januari dengan curah hujan 311,6 mm. Pada bulan-bulan tersebut, jumlah hari hujan juga lebih tinggi, dengan Januari memiliki 17 hari hujan dan Desember mencatatkan 30 hari hujan. Profil suhu, kelembapan, curah hujan, dan jumlah hari hujan setiap bulan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Profil Suhu, Kelembapan, Curah Hujan, dan Jumlah Hari Hujan
Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Bulan	Suhu rata-rata (^{0}C)	Kelembapan rata-rata (%)	Jumlah curah hujan (mm/tahun)	Jumlah hari hujan (hari)
1	Januari	28,45	79,72	311,6	17
2	Februari	28,33	81,75	500,5	19
3	Maret	28,41	81,09	314,3	20
4	April	29,43	78,65	120,8	14
5	Mei	30,13	74,23	34,1	4
6	Juni	29,12	77,03	109,5	7
7	Juli	27,96	76,98	137,8	28
8	Agustus	29,02	70,54	7,6	31
9	September	29,14	71,53	172,5	30
10	Oktober	30,07	68,85	61,4	31
11	November	29,21	75,42	150,4	30
12	Desember	28,42	78,44	338,7	31

Sumber: Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik

HIDROLOGI

Berdasarkan sistem wilayah sungai, Provinsi DKI Jakarta berada pada cakupan wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang pengelolaannya berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Menteri. Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane mencakup 13 sungai lintas provinsi mengalir di wilayah Jakarta dan kemudian melewati Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. DKI Jakarta terbagi ke dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai satu kesatuan sistem hidrologi, diantaranya **DAS Ciliwung**, **DAS Krukut, DAS Sunter.** Ketiga DAS tersebut melewati wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sungai-sungai membawa air dari daerah hulu ke daerah hilir di Teluk Jakarta. Beberapa diantaranya yang melewati wilayah Kota Jakarta Selatan adalah Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, dan Kali Ciliwung. Kali Pesanggrahan memiliki panjang 27,3 km, luas permukaan 25,5 Ha, kedalaman 2,6 meter, dengan debit aliran 10-22 m^3/set. Kali Krukut memiliki panjang 28,75 km, luas

permukaan 17,25 Ha, kedalaman 1,1 m, dan debit aliran 4,6-14 m^3/set. Kali Ciliwung memiliki panjang 46,2 km, luas permukaan 115,5 Ha, kedalaman 2,4 km, dan debit aliran 28-62 m^3/set.

Gambar 2.4 Peta Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

Air tanah Jakarta masuk ke dalam Cekungan Air Tanah (CAT) wilayah Jakarta dan sekitarnya yang secara teknis diatur di dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Karakteristik jenis tanah akuifer CAT Jawa Barat–Jakarta merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan kipas gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-kasar mengandung cangkang moluska; tuf Banten; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir tufan.

Wilayah DKI Jakarta pada dasarnya memiliki potensi tinggi untuk menyimpan air tanah di akuifer dangkal. Selama pengambilan air tanah tidak melebihi tingkat pengisiannya kembali, keberadaan air tanah dalam akuifer dangkal dapat terjaga. Kini, lahan terbangun yang semakin masif mengakibatkan meningkatnya lahan kedap air berdampak imbuhan air tanah < 250 mm/tahun, artinya regenerasi air tanah hampir tidak terjadi.

Selain sungai, Kota Jakarta Selatan juga memiliki wadah parkir air (*retention basin*) untuk menampung limpasan air hujan dan mengurangi beban kanal dan sungai secara sementara berupa waduk, situ maupun embung. Wadah parkir air yang tersebar di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Profil Wadah Parkir Air Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Nama Waduk/Situ/Parkir Air	Luas (Ha)
1	Babakan	32
2	Bonbin Ragunan	10
3	Mangga Bolong	13
4	Pancoran/MBAU	2
5	Pertanian	3,7
6	Ragunan 1	11
7	Ragunan 2	4,5
8	Setiabudi Barat	4
9	Setiabudi Timur	4
10	Sigura-gura	1
11	TMP Kalibata	0,5
12	UI	7

Sumber: KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045

Perubahan iklim, peningkatan intensitas curah hujan, berkurangnya daerah resapan air, serta kedap air, mengakibatkan volume air yang masuk ke sungai dan kanal melewati daya dukung dan daya tampungnya. Kapasitas sungai dan wadah parkir air tidak cukup menangani limpasan air hujan, akhirnya sungai meluap, dan meningkatkan kejadian banjir dan genangan. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi pengelolaan tata ruang dan infrastruktur di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Urbanisasi tidak terkendali menyebabkan banyaknya permukaan kedap air seperti aspal dan beton, akibatnya mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan dan mempercepat *run-off* menuju saluran drainase. Peningkatan kejadian banjir dan genangan merugikan ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan kapasitas wadah penampungan air hujan menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir.

EKOREGION

Ekoregion ditetapkan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup (Pasal 7 ayat 2, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Wilayah Jakarta terdapat ekoregion dataran fluvio vulkanik yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebagai resapan untuk mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir. Dengan memiliki ekoregion tersebut secara fungsi alami, wilayah fungsional Jakarta memiliki kemampuan yang tinggi terhadap pengaturan air dari hulu hingga ke hilir. Berkembangnya jumlah penduduk dan

perkotaan, menyebabkan bentang lahan tersebut dialihfungsikan untuk pemanfaatan lahan terbangun yang berdampak pada pengurangan kinerja jasa lingkungan hidup. Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) ekoregion (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2022-2052) yaitu dataran pasang surut berlumpur, dataran beting gisik, dataran rawa, dataran banjir, dataran fluvio-marin, dan dataran fluvio-vulkanik. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan termasuk ke dalam ekoregion dataran fluvio-vulkanik.

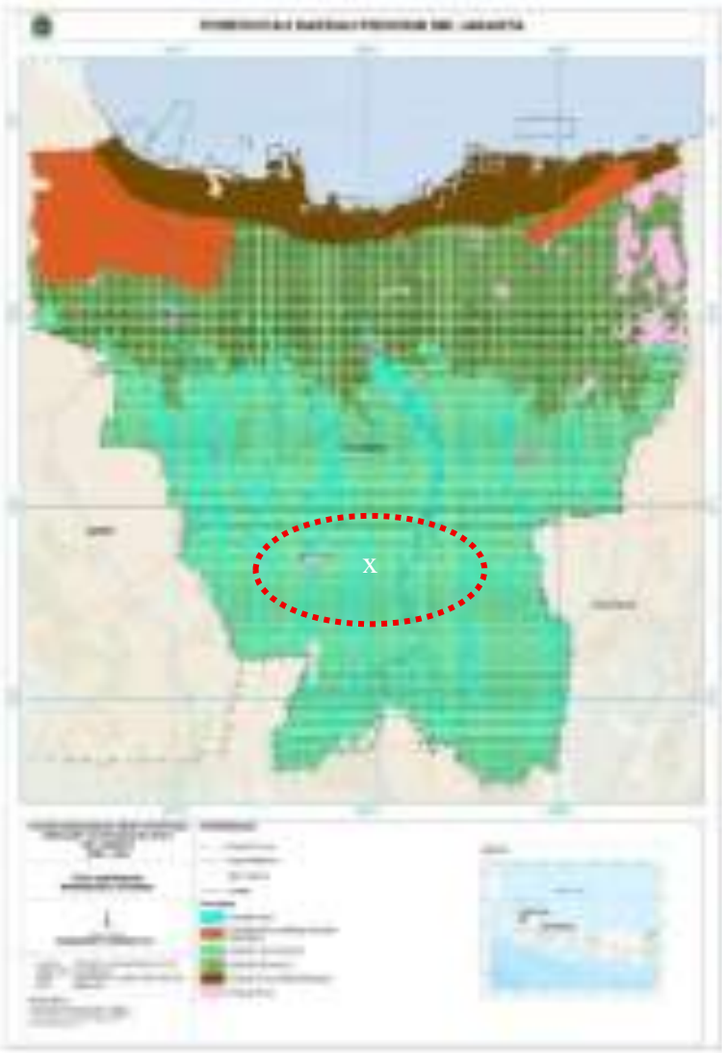

Gambar 2.5 Ekoregion Provinsi DKI Jakarta

Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021 dan KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045

KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025 sebesar 2.331.411 jiwa dengan kepadatan 16,09 jiwa/km^2. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,7%. Kecamatan Tebet adalah wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar sebesar 24,74 jiwa/km^2. Laju pertumbuhan penduduk terbesar ada di Kecamatan Cilandak sebesar 9,61%. Tabel 2.4 menunjukkan profil jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tabel 2.4 Profil Kependudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km²)	Laju pertumbuhan penduduk 2020-2024 (%)
1	Jagakarsa	379.385	15,14	-1,05
2	Pasar Minggu	324.691	15,02	6,70
3	Cilandak	220.968	12,45	9,61
4	Pesanggrahan	264.647	19,61	7,19
5	Kebayoran Lama	322.035	16,89	4,39
6	Kebayoran Baru	148.241	11,68	6,19
7	Mampang Prapatan	152.437	19,19	4,84
8	Pancoran	174.542	19,68	3,52
9	Tebet	231.318	24,74	4,57
10	Setiabudi	113.147	12,69	5,35
Kota Jakarta Selatan		2.331.411	16,09	4,7

Sumber: Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik

Data terbaru dipublikasikan pada *website* Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta untuk periode Semester 1 tahun 2025, menunjukkan jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 2.326.692 jiwa, terdiri atas 3.084 WNA dan 2.323.644 WNI. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan didominasi jenis kelamin perempuan sebesar 50,08% dan jenis kelamin laki-laki sebesar 49,92%. Berdasarkan kelompok usia, profil kependudukan adalah 605.110 jiwa kelompok usia anak-anak, 493.231 jiwa kelompok usia muda, 1.680.359 jiwa kelompok usia produktif, dan 251.287 jiwa kelompok usia lansia. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 13.230 jiwa adalah kaum disabilitas. Informasi penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan periode Semester 1 tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Sumber: kependudukancapil.jakarta.go.id/profile_perkembangan_adminduk, 10 Sept 2025, 13.00 WIB

Gambar 2.6 Profil Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber: kependudukancapil.jakarta.go.id/profile_perkembangan_adminduk, 10 Sept 2025, 13.00 WIB

Berdasarkan kelompok generasi, profil kependudukan adalah (a) *the greatest generation* sebesar 152 jiwa, (b) *silent generation* sebesar 21.889 jiwa, (c) *baby boomer* sebesar 229.246 jiwa, (d) Gen X sebesar 531.361 jiwa, (e) Gen Millenial sebesar 570.406 jiwa, (f) Gen Z sebesar 593.144 jiwa, (g) Gen Alpha sebesar 369.273 jiwa, dan (h) Gen Beta sebesar 8.173 jiwa. Bentuk piramida penduduk adalah stationer (bentuk granat atau segi empat) didominasi dari kelompok usia produktif. Gambar 2.7 menunjukkan generasi dan piramida penduduk periode Semester 1 tahun 2025.

Gambar 2.7 Generasi dan Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber: kependudukancapil.jakarta.go.id/profile_perkembangan_adminduk, 10 Sept 2025, 13.00 WIB

Jumlah kepala keluarga sebesar 768.426 jiwa, terdiri atas 77,17% laki-laki dan 22,83% perempuan. Jumlah anak sebesar 605.110 jiwa, terdiri atas 311.949 jiwa laki-laki dan 293.161 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga dan anak periode Semester 1 tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Jumlah Kepala Keluarga dan Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber: kependudukancapil.jakarta.go.id/profile_perkembangan_adminduk, 10 Sept 2025, 13.00 WIB

EKONOMI DAN PERDAGANGAN

Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan pusat kegiatan bisnis dimana terdapat sebagian besar kantor pusat bank, asuransi dan keuangan, perdagangan dan jasa serta pusat perdagangan sekuritas seperti kawasan segitiga emas Kuningan, Casablanca, *Sudirman Central Business District* (SCBD) dan Blok M yang juga merupakan kawasan ekonomi berskala internasional. Kota Administrasi Jakarta Selatan juga merupakan kawasan perwakilan negara asing khususnya di Segitiga Kuningan dan Sekretariat ASEAN, serta terdapat kantor dan/atau rumah Dinas Kedutaan. Kota Administrasi Jakarta Selatan juga merupakan lokasi untuk beberapa kementerian/lembaga/badan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Mabes POLRI, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kesehatan.

Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi sepanjang periode 2022-2024 sebesar 5,24%. Nilai PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku sepanjang tahun 2020-2024 menunjukkan tren meningkat dapat dilihat pada Gambar 2.9. Rata-rata nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 455.303,62 Miliar rupiah dan atas dasar harga berlaku sebesar 737.055,14 Miliar rupiah. Pertumbuhan perekonomian dan daya saing masyarakat di Jakarta Selatan tergambarkan juga dari nilai kontribusi PDRB Jakarta Selatan terhadap Jakarta yang terbilang cukup besar yaitu sebesar 22,92%.

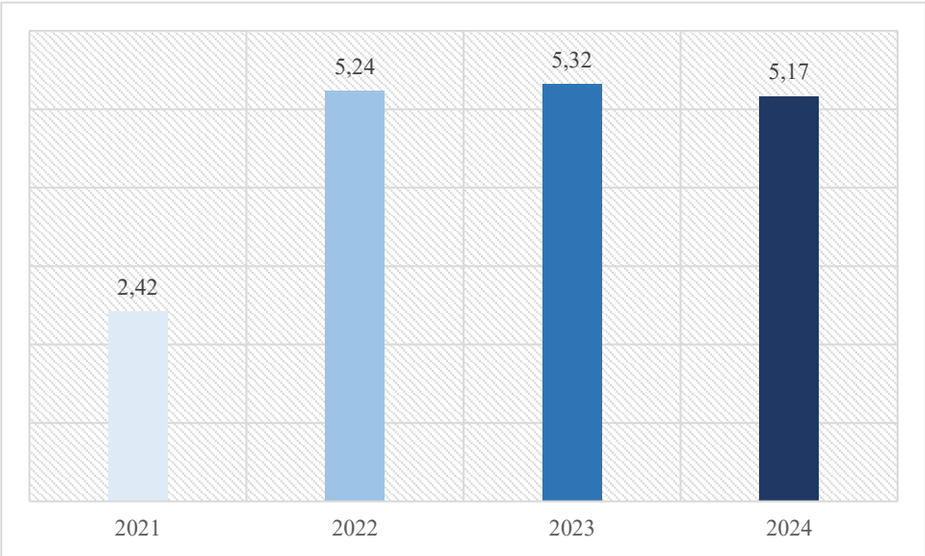

Gambar 2.9 Laju Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber: PDRB Kota Jakarta Selatan Menurut Lapangan Usaha 2025, Badan Pusat Statistik

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi Jakarta Selatan sebesar minus 0,49 persen dan berangsur pulih hingga pada tahun 2024 tumbuh 5,17 persen. Pada tahun 2024 seluruh komponen tumbuh positif. Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebesar Rp 481,6 triliun. Nilai PKRT terbesar terjadi pada tahun 2024 seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat serta harga pasar. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,40 persen pada tahun 2024. Secara rata-rata, investasi dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebesar Rp 242,2 triliun. Peningkatan komponen ini didorong oleh kenaikan investasi berupa bangunan dan barang modal non bangunan baik yang berasal dari impor maupun domestik. Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada tahun 2024 tumbuh 5,36 persen didukung oleh peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kelompok hotel dan restoran; kelompok transportasi, komunikasi; rekreasi dan budaya; dan kelompok pakaian dan alas kaki.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh sebesar 11,82 persen. Pada tahun 2024 besaran komponen PKP adalah Rp 275,6 triliun yang sebagian besar berupa belanja pegawai dan belanja barang. Peningkatan kontribusi PKP melalui belanja bantuan sosial dan belanja barang/jasa pemerintah. Komponen LNPRT tahun 2024 tumbuh 12,11 persen. Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PKLNPRT) selama periode 2020-2024 adalah sebesar Rp 18,2 triliun dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp 1,3 triliun setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi tahun 2024 disebabkan peningkatan aktivitas partai politik dalam rangka Pemilu dan Pilkada Serentak. Nilai pengeluaran LNPRT periode ini sebesar

Rp 22,5 triliun, meningkat Rp 1,8 triliun rupiah dibandingkan pengeluaran tahun 2023. Komponen terakhir adalah net ekspor impor menunjukkan perdagangan dengan wilayah lain. Selama periode 2020-2024, net ekspor impor Kota Jakarta Selatan menunjukkan kecenderungan terjadi kondisi defisit.

Tabel 2.5 PDRB Atas Harga Berlaku Kota Administrasi Jakarta Selatan (triliun rupiah)

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	416,83	437,88	474,42	518,17	557,67	481,6
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	15,67	15,89	17,42	19,76	22,59	18,27
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	132,51	146,91	141,01	137,03	157,74	143,04
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	213,71	220,82	242,26	258,66	275,61	242,21
5	Net ekspor/impor	(129,45)	(153,08)	(149,75)	(143,93)	(164,25)	(148,09)
Total		**643,56**	**668,39**	**730,7**	**792,33**	**850,3**	**737,06**

Sumber: PDRB Kota Jakarta Selatan Menurut Lapangan Usaha 2025, Badan Pusat Statistik

PDRB per kapita terendah terjadi pada tahun 2020. Pembatasan aktivitas ekonomi Jakarta dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 menyebabkan turunnya output perekonomian Jakarta Selatan. Angka per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 381,19 juta rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Jakarta Selatan naik dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 Kota Administrasi Jakarta Selatan (miliar rupiah)

Kode	Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	242,52	242,27	240,8	238,89	236,63
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	6.360,49	6.360,00	6.440,71	6.475,47	6.717,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	473,64	431,76	438,92	435,61	407,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	124,97	130,18	130,87	137,3	137,33
F	Konstruksi	47.058,73	47.104,02	47.892,47	49.113,66	52.557,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	57.345,81	60.758,38	65.457,77	68.504,26	73.146,14
H	Transportasi dan Pergudangan	8.184,46	9.350,96	10.337,29	11.353,36	12.246,98

Kode	Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.269,76	16.640,30	18.219,51	19.964,74	21.654,56
J	Informasi dan Komunikasi	72.882,11	76.321,22	81.617,11	87.716,33	91.648,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	60.155,93	60.249,76	61.056,06	64.601,57	68.156,01
L	*Real Estate*	33.822,97	34.445,31	35.144,00	35.421,64	35.974,90
M,N	Jasa Perusahaan	47.180,73	47.122,39	49.899,46	53.139,82	55.645,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20.560,93	20.027,83	20.428,05	20.433,09	20.696,95
P	Jasa Pendidikan	16.954,65	17.087,16	17.067,19	17.193,49	17.937,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.564,98	10.349,31	11.309,90	11.973,75	12.608,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	23.074,50	22.638,39	26.092,52	29.103,23	30.651,54
	PDRB	**419.257,19**	**429.259,25**	**451.772,64**	**475.806,32**	**500.422,68**

Sumber: PDRB Kota Jakarta Selatan Menurut Lapangan Usaha 2025, Badan Pusat Statistik

Sektor lapangan usaha meliputi perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; dan jasa perusahaan adalah aktivitas usaha ekonomi yang menopang pertumbuhan ekonomi dominan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sepanjang periode 2020-2024, rata-rata nilai PDRB sektor informasi dan komunikasi sebesar 82.037,11 miliar rupiah. Sektor ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi, pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi.

Tabel 2.7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 Kota Administrasi Jakarta Selatan (miliar rupiah)

Kode	Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	388,81	393,29	399,87	408,96	437,39
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	9.303,26	9.635,76	10.447,91	11.003,76	11.747,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	787,11	707,53	719,66	708,58	652,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	156,01	163,01	166,12	176,06	185,88
F	Konstruksi	71.852,22	74.954,20	80.823,31	85.610,77	92.362,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	98.430,53	105.486,79	119.333,87	130.988,40	142.806,90
H	Transportasi dan Pergudangan	13.281,71	15.558,87	18.149,58	20.837,47	23.047,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.591,37	26.052,87	29.499,86	33.074,25	36.667,67
J	Informasi dan Komunikasi	80.748,44	85.179,21	92.359,99	100.551,95	107.299,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	90.517,21	94.098,11	102.711,27	111.637,00	119.632,56
L	*Real Estate*	50.246,01	51.590,13	53.665,63	55.907,00	57.728,69
M,N	Jasa Perusahaan	75.955,28	77.063,25	84.321,12	93.917,83	100.517,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	46.895,70	45.284,95	46.286,87	46.841,90	49.975,46
P	Jasa Pendidikan	28.402,95	28.684,62	29.212,56	29.223,47	30.916,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15.458,05	16.695,32	18.699,09	20.181,52	21.608,05
R,S,T, U	Jasa lainnya	37.547,21	36.841,25	43.898,50	51.263,59	54.711,36
	PDRB	**643.561,85**	**668.389,16**	**730.695,17**	**792.332,51**	**850.297,02**

Sumber: PDRB Kota Jakarta Selatan Menurut Lapangan Usaha 2025, Badan Pusat Statistik

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan hal yang sama bahwa sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; dan jasa perusahaan adalah aktivitas usaha ekonomi yang menopang pertumbuhan ekonomi dominan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk tahun 2021-2024 menunjukkan tren yang cukup positif. Pada tingkat SD/MI/Sederajat, APM mencapai 98,53%, tingkat SMP/Mts/Sederajat sebesar 87,82%, sedangkan tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat sebesar 71,23%. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Administrasi Jakarta Selatan sepanjang periode 2021-2024 juga menunjukkan hasil yang positif. Nilai APK tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 103,55%, nilai APK tingkat SMP/Mts/Sederajat sebesar 95,24%, serta nilai APK tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat sebesar 86,44%.

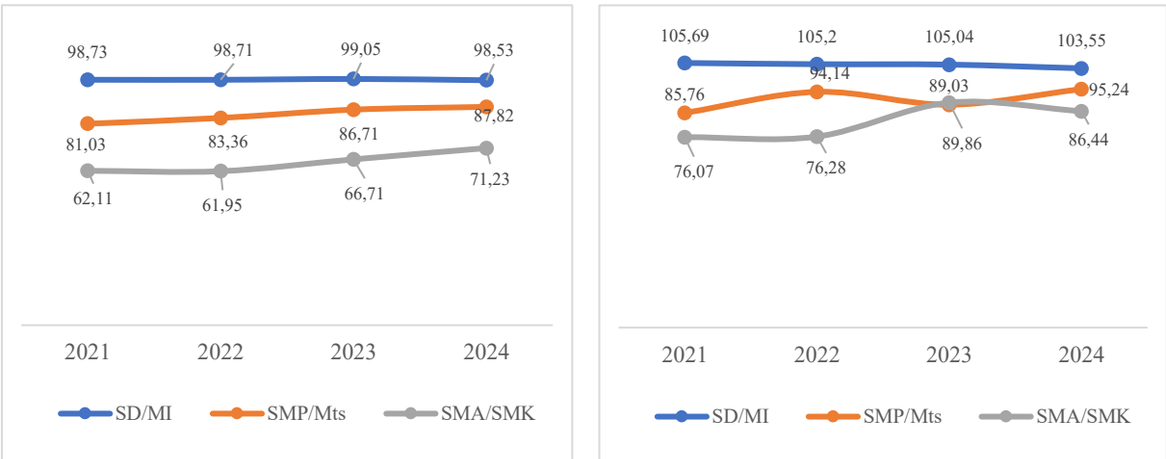

(a) (b)

Gambar 2.10 (a) Angka Partisipasi Murni (APM), (b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2021-2024

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan menunjukkan tren meningkat dari periode tahun 2020-2024. Tahun 2020, IPM Jakarta Selatan tercatat sebesar 85,4, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan IPM DKI Jakarta yang mencapai 85,87. Tahun 2021, IPM Kota Administrasi Jakarta Selatan meningkat menjadi 85,58, sementara IPM DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi 82,25. Nilai IPM Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022-2024 juga menyimpulkan hal yang sama bahwa IPM Kota Administrasi Jakarta Selatan lebih baik dari Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menjadi indikator kualitas hidup masyarakat di Jakarta Selatan yang terus meningkat, menempatkan wilayah ini sebagai salah satu daerah unggul dalam pembangunan manusia, memiliki daya saing serta kesejahteraan masyarakat lebih baik saat ini dan di masa depan.

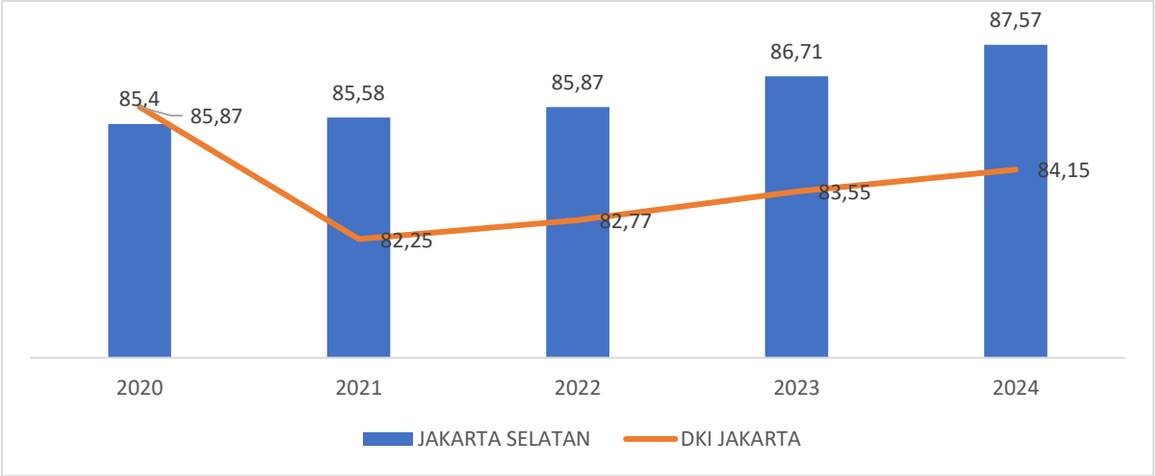

Gambar 2.10 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Provinsi DKI Jakarta
Sumber: https://jakarta.bps.go.id

Tabel 2.8 menyimpulkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan perkembangan positif dari tahun 2020 hingga 2024. Angka Harapan Hidup di Jakarta Selatan menunjukkan tren peningkatan dari 75,45 tahun pada 2020 menjadi 76,23 tahun pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan layanan kesehatan dan kondisi lingkungan yang lebih baik, sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan program promotif-preventif. Indikator pendidikan diwakili Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan perkembangan menggembirakan. Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,33 tahun pada 2020 menjadi 13,94 tahun pada 2024, sementara Rata-Rata Lama Sekolah naik dari 11,63 tahun menjadi 11,95 tahun dalam periode sama. Keberhasilan program pendidikan bermanfaat bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan lebih lama dan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran serta sarana-prasarana pendukung.

Tabel 2.8 Perkembangan IPM Kota Administrasi Jakarta Selatan

Indikator IPM	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	75,45	75,52	75,77	76,02	76,23
Harapan Lama Sekolah	13,33	13,34	13,35	13,66	13,94
Rata-Rata Lama Sekolah	11,63	11,64	11,66	11,75	11,95
Pengeluaran Perkapita	23.575,00	23.888,00	24.221,00	24.975,00	25.573,00

Sumber: https://jakarta.bps.go.id

KETENAGAKERJAAN

Profil tenaga kerja menggambarkan keberagaman dalam pasar tenaga kerja di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial inklusif. Berdasarkan data per semester 1 tahun 2025, tenaga kerja di Kota Administrasi

Jakarta Selatan menunjukkan komposisi pekerjaan beragam, dengan sektor karyawan swasta mendominasi jumlah tenaga kerja, mencapai 628.159 jiwa. Pekerjaan sebagai wiraswasta tercatat sebanyak 156.255 jiwa, sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 30.574 jiwa. Sektor pekerjaan yang relatif besar lainnya adalah tenaga kerja yang mengurus rumah tangga, dengan total 396.643 jiwa.

Berdasarkan data tersebut, mayoritas penduduk terlibat dalam sektor pekerjaan berbasis di sektor swasta dan wiraswasta, menunjukkan adanya aktivitas ekonomi tinggi di luar sektor pemerintahan. Keberadaan sektor wiraswasta yang cukup signifikan, sebesar 156.255 jiwa. Keberadaan mengurus rumah tangga, dengan jumlah cukup besar sebesar 396.643 jiwa. Tenaga kerja berusia 15 tahun keatas pada setiap kategori pekerjaan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.12.

Gambar 2.11 Pekerjaan Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Usia 15 Tahun Ke Atas
Sumber: kependudukancapil.jakarta.go.id/profile_perkembangan_adminduk, 10 Sept 2025, 13.00 WIB

PARIWISATA

Destinasi wisata di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Kawasan **wisata urban** seperti Kemang, Blok M, Cipete, dan Tebet merupakan destinasi strategis yang menawarkan berbagai fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, serta kuliner. Keberadaan kawasan ini tidak hanya menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Wisata urban dapat menjadi motor penggerak pembangunan kota dan memperkuat daya tarik Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Kawasan **wisata budaya** Setu Babakan, yang terletak di Kecamatan Jagakarsa, merupakan pusat pelestarian budaya Betawi dengan nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Kawasan ini menampilkan berbagai elemen khas budaya Betawi, mulai dari arsitektur tradisional, seni pertunjukan, kuliner, hingga adat istiadat yang masih terjaga dengan baik. Keberadaan Setu Babakan menjadikannya sebagai salah satu tempat strategis dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal yang penting bagi identitas masyarakat Jakarta. Setu Babakan tidak hanya berfungsi sebagai pusat budaya, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang mampu meningkatkan perekonomian lokal sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.
3. Potensi **wisata belanja** di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat dari banyaknya pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Beberapa pusat perbelanjaan utama di Jakarta Selatan antara lain Pondok Indah Mall, The Park Mall, Lippo Mall Kemang, Kota Kasablanka, Blok M Square, Blok M Plaza, Gandaria City, Kuningan City, Lotte Shopping Avenue, Pacific Place, Cilandak Town Square, Ashta District 8, Aeon Mall Tanjung Barat, FX Sudirman, dan Plaza Festival.
4. **Wisata rekreasi** Taman Margasatwa Ragunan, yang terletak di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berperan penting sebagai tempat konservasi satwa sekaligus ruang terbuka hijau yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Selain fungsi konservasi, taman ini menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas edukasi, hiburan, dan relaksasi bagi pengunjung dari berbagai usia. Fasilitas yang tersedia meliputi area piknik, jalur jogging dan bersepeda, serta kafe dan restoran yang menunjang kenyamanan pengunjung. Taman ini dapat terus berfungsi sebagai ruang publik yang mendukung kualitas hidup warga sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di wilayah Jakarta Selatan.

JASA LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan analisa dan kajian yang dilakukan terhadap wilayah fungsional provinsi DKI Jakarta, terdapat 4 kinerja jasa lingkungan hidup yang berhasil diidentifikasi berdasarkan isu ketersediaan air, pengendalian bencana banjir dan kualitas udara. Keempat jasa lingkungan hidup tersebut akan sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan air, kualitas udara dan juga pengaturan air terhadap mitigasi banjir. Ketersediaan data jasa lingkungan hidup untuk Kota Jakarta Selatan hanya menggunakan lingkup skala regional sebagai kesatuan fungsional wilayah antar provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

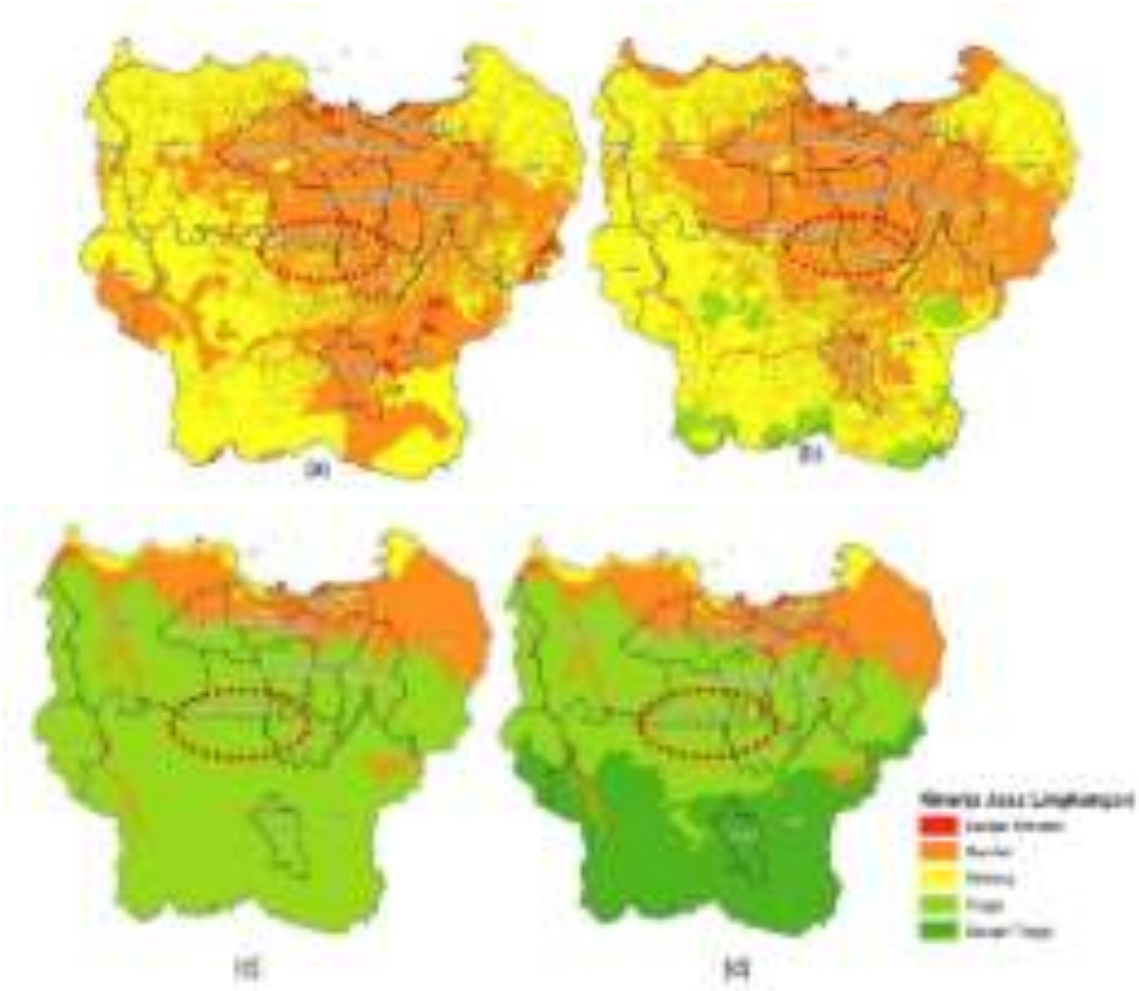

Gambar 2.12 Distribusi Jasa Lingkungan Hidup Tahun 2020
(a) Pengaturan Air, (B) Pengaturan Udara, (C) Mitigasi Banjir
Sumber: KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045

Secara spasial jasa lingkungan penyedia air dan pengaturan air didominasi oleh kelas sangat rendah sampai dengan sangat tinggi dengan rentang nilai indeks 0 - 5. Jasa lingkungan pengaturan kualitas udara di wilayah fungsional DKI Jakarta, didominasi oleh kelas tinggi ±75% dari luasan total, yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup eksisting dapat membantu dalam pengaturan udara, namun dengan syarat tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak merubah penutupan lahan di wilayah fungsional.

Kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air DKI Jakarta menunjukkan dominasi kelas kinerja rendah (warna *orange*), sangat rendah (warna merah), dan sedang (warna kuning). Sebaran kinerja rendah membentang dari selatan hingga ke tengah wilayah Jakarta. Hal ini mengindikasikan fungsi penyediaan air di wilayah Jakarta secara keseluruhan memang sudah

rendah. **Kinerja Jasa lingkungan hidup penyedia air di Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah dalam kategori rendah.**

Gambar 2.13 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2020

Sumber: KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045

Analisis terhadap daya dukung sumber daya air di Kota Administrasi Jakarta Selatan menunjukkan bahwa kapasitas air yang tersedia telah melampaui ambang batas daya dukungnya, yang mengindikasikan adanya tekanan signifikan terhadap ketersediaan air. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, diketahui bahwa ketersediaan air di Jakarta Selatan mencapai 118,05 juta meter kubik, sementara kebutuhan air diperkirakan sebesar 206,87 juta meter kubik. Rincian kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan domestik sebesar 203,24 juta meter kubik dan kebutuhan non-domestik sebesar 3,63 juta meter kubik. Dengan demikian, terdapat defisit air sebesar 88,82 juta meter kubik, yang menunjukkan bahwa permintaan air jauh melebihi pasokan yang tersedia.

Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya air, yang jika tidak segera ditangani dapat berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup

masyarakat. Tekanan terhadap sumber daya air di wilayah Jakarta Selatan memerlukan strategi pengelolaan terpadu meliputi konservasi air, peningkatan efisiensi penggunaan air, serta pengembangan sumber air alternatif. Pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi defisit air tersebut. Pengelolaan sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan mendesak dilakukan dengan mengefektifkan koordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan.

Kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air mencerminkan fungsi tata air yang meliputi proses infiltrasi dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berperan penting dalam fungsi peresapan air ke dalam tanah, yang berkontribusi pada pengisian ulang sumber air tanah dan pengurangan limpasan permukaan. Sementara itu, pelepasan air berkaitan dengan pengaturan tata alir air dan *discharge*, yang berfungsi mengendalikan aliran air permukaan agar tidak menyebabkan banjir dan erosi. Kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air dengan kategori kelas rendah, yang ditandai dengan warna *orange*, mendominasi sekitar 86,17% wilayah DKI Jakarta. **Kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam status kelas rendah**. Penurunan fungsi ini berpotensi meningkatkan risiko banjir dan menurunkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Gambar 2.14 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air Tahun 2020

Sumber: KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045

Kinerja jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara erat kaitannya dengan ketersediaan ruang hijau. Ruang hijau sebagai taman, hutan kota, hutan wisata, atau fungsi lain seperti kebun binatang atau taman makam. Keberadaan ruang hijau menjamin terealisasinya sebagian wilayah untuk pertumbuhan tanaman, dalam rangka mendukung keberlangsungan siklus pemulihan kualitas udara secara alami. Saat ini, secara keseluruhan alokasi untuk ruang hijau, danau, kebun, rawa, situ dan lainnya hanya 14,59% dari luas wilayah DKI Jakarta. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara DKI Jakarta didominasi kelas rendah (warna merah) dan tinggi (warna hijau). **Wilayah Selatan terlihat kondisi tinggi mendominasi karena masih terdapat tutupan lahan hutan lahan kering sekunder.** Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara tahun 2020 berdasarkan KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Gambar 2.15 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara Tahun 2020

Sumber: KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045

Kinerja jasa lingkungan hidup dalam pengaturan kualitas udara erat kaitannya dengan ketersediaan dan distribusi ruang hijau. Ruang hijau meliputi taman kota, hutan kota, hutan wisata, serta lainnya, berperan penting sebagai area yang mendukung pertumbuhan vegetasi. Vegetasi ini secara aktif berkontribusi dalam proses penyaringan polutan udara, penyerapan karbon dioksida, serta pelepasan oksigen, sehingga mendukung siklus pemulihan kualitas udara secara alami. Di DKI Jakarta, alokasi ruang hijau hanya mencapai sekitar 14,59% dari total luas wilayah. **Wilayah Jakarta Selatan menunjukkan kondisi relatif lebih baik dengan dominasi kinerja kelas tinggi (warna hijau)**. Beberapa RTH di Jakarta Selatan yang populer meliputi Tebet Eco Park, Taman Dadap Merah, Taman Ayodya, Taman Langsat, Taman Puring, Taman Mataram, Taman Literasi, Taman Lansia Buni, Taman Tabebuya, Taman Spathodea, Taman Sambas Asri, serta Taman Bango Pola. Selain berfungsi sebagai penyaring polusi dan pengatur suhu permukaan, RTH juga memberikan manfaat penting berupa peningkatan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat. Fungsi RTH tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial, terutama karena beberapa RTH berlokasi strategis dekat dengan sarana transportasi umum.

Kinerja jasa lingkungan hidup dalam pengaturan mitigasi banjir erat kaitannya dengan fungsi pengelolaan air, khususnya peran wilayah sebagai daerah resapan air. **Wilayah selatan Jakarta didominasi dataran fluvio vulkanik memiliki potensi resapan air lebih tinggi dibandingkan dengan tipologi dataran lainnya.** Dataran fluvio vulkanik secara alami memiliki struktur tanah permeabel dan kemampuan infiltrasi yang baik, sehingga ideal sebagai daerah resapan air. Namun, perkembangan pesat kawasan selatan Jakarta yang hampir seluruhnya telah terbangun untuk perumahan dan infrastruktur menyebabkan berkurangnya fungsi resapan alami tersebut. Oleh karena itu, upaya pengelolaan ruang terbuka hijau, konservasi daerah resapan air, pengembangan infrastruktur hijau, perlindungan dan rehabilitasi daerah resapan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja jasa lingkungan hidup dalam mitigasi banjir. Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi banjir tahun 2018 berdasarkan data KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar 2.17.

Gambar 2.16 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Banjir Tahun 2018
Sumber: KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045

2.2 GAMBARAN TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR, DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan perangkat daerah kewilayahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan memiliki tugas membantu Gubernur serta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 151 Tahun 2024 melaksanakan sebagian urusan pemerintahan minimal:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan dari Gubernur;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat;
c. penataan kawasan di wilayahnya;
d. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah;
e. pembinaan lembaga kemasyarakatan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten; dan
f. tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dipimpin oleh Walikota di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam melaksanakan tugas, Walikota dibantu oleh Wakil Walikota sebagai satu kesatuan unsur pimpinan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Fungsi perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
p. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
q. pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
r. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan

t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyelenggarakan fungsi tambahan, sebagai berikut:

a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
c. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi yang dijabarkan di atas maka gambaran pelayanan perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dijabarkan ke dalam bentuk layanan internal dan layanan publik. Gambaran layanan internal yang ditujukan bagi para pegawai di lingkup perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:

1. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. administrasi umum perangkat daerah;
3. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
4. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
5. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
6. pembinaan administrasi kepegawaian;
7. pelaksanaan *character building* pegawai;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan/pembangunan/rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah.

Gambaran pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat secara luas adalah berupa kegiatan peningkatan penyelenggaraan kota administrasi untuk tingkat wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:

1. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
2. pengurusan perkara di pengadilan;
3. peningkatan kesadaran hukum dan HAM;
4. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembentukan kewirausahaan baru;
5. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan;
6. penyelenggaraan tamu dan jamuan resmi;
7. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kota sehat;
8. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan;
9. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kota layak anak;
10. pelaksanaan partisipasi kota administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI);
11. pembinaan dan evaluasi kecamatan dan kelurahan;
12. pelaksanaan rapim dan rakorwil;
13. pelaksanaan koordinasi dan monitoring penerimaan PBB-P2;
14. penyusunan dan evaluasi standar operasional dan prosedur;
15. pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
16. pengendalian dan evaluasi pelayanan publik;
17. pelaksanaan koordinasi pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
18. peningkatan tugas dan fungsi dewan kota administrasi;
19. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketahanan pangan;
20. penagihan kewajiban fasos fasum dan sinkronisasi data SIPPT Kota Administrasi;
21. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
22. pelaksanaan bina mental spiritual;
23. pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atas layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA;
24. pelayanan publik yang optimal yang dilakukan oleh PPSU.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Kota Asministrasi dapat dilihat pada Gambar 2.18 berikut:

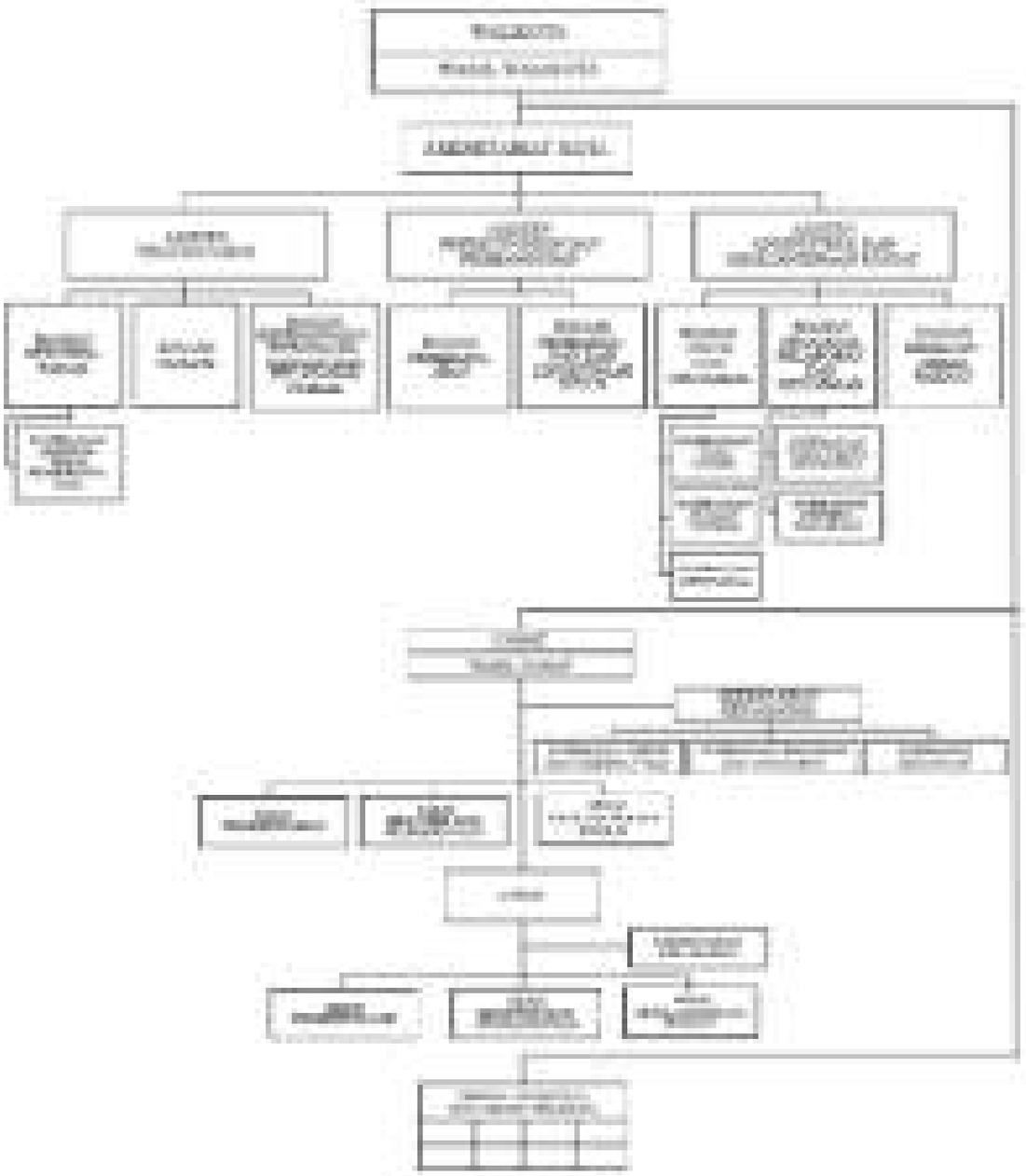

Gambar 2.17 Susunan Organisasi Kota Administrasi

Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022

1. **Walikota mempunyai tugas:**
   a. memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
   b. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi;

c. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
d. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi; dan
e. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

2. **Wakil Walikota mempunyai tugas:**
   a. membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
   b. mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan
   c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota.

3. **Sekretariat Kota** dipimpin oleh Sekretaris Kota. Sekretaris Kota berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi administrasi Kota Administrasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, Kelurahan dan UKPD di tingkat Kota Administrasi. Sekretariat Kota menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
   b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja, Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
   c. pengoordinasian perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi;
   d. pengoordinasian dan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik Kota Administrasi;
   e. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan Kota Administrasi;
   f. pengoordinasian dan penyusunan pelaporan Kota Administrasi;
   g. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
   h. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;

i. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
j. pengoordinasian dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
k. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD di tingkat Kota Administrasi;
l. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi;
m. pengoordinasian Dewan Kota; dan
n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

4. **Asisten Pemerintahan** berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota. Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam:
   a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang pemerintahan;
   b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan administrasi kepegawaian Kota Administrasi;
   c. mengkoordinasikan pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan penataan dan pengembangan wilayah dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kota Administrasi;
   d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
   e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;
   f. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Pemerintahan di tingkat Kota Administrasi;
   g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD bidang Pemerintahan di tingkat Kota Administrasi; dan
   h. mendukung kegiatan pelayanan pajak di wilayah Kota Administrasi.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan meliputi:

a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi;
b. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
c. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi;

d. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
e. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
f. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi;
g. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.

5. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan** berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam:
   a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang ekonomi dan pembangunan;
   b. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi;
   c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi; dan
   d. mengkoordinasikan fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi:

a. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi;
b. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi;
c. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi;
d. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi;
e. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
f. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi;
g. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
h. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi;
i. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi;
j. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi; dan
k. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi.

6. **Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat** berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam:
   a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat;
   b. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kota Administrasi;
   c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD bidang kesejahteraan rakyat di tingkat Kota Administrasi;
   d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, dan keuangan Kota Administrasi; dan
   e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi.

   UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:
   a. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi;
   b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi;
   c. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi;
   d. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
   e. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi;
   f. Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi;
   g. Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi;
   h. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi;
   i. Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi;
   j. Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi; dan
   k. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi.

7. **Bagian Pemerintahan** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian Pemerintahan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota melalui Asisten Pemerintahan. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyusunan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang pemerintahan;

b. melaksanakan penataan dan pengembangan wilayah serta lembaga kemasyarakatan di tingkat Kota Administrasi;
c. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
d. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Pemerintahan di tingkat Kota Administrasi; dan
e. melaksanakan pembangunan Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah.

Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi;
b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian , kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi;
c. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi;
d. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi;
e. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
f. penataan dan pengembangan wilayah di wilayah Kota Administrasi;
g. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah di tingkat Kota Administrasi;
h. pengoordinasian lembaga kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan di tingkat Kota Administrasi;

i. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi dan asosiasi pemerintah Kota Administrasi;
j. pengoordinasian, pelaksanaanF, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan umum; dan
k. pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Administrasi.

8. **Bagian Hukum** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hukum. Kepala Bagian Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota melalui Asisten Pemerintahan. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hukum dan hak asasi manusia Kota Administrasi. Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan hukum Kota Administrasi;
   b. pelaksanaan pelayanan perkara non litigasi bidang non aset di wilayah Kota Administrasi;
   c. pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi bidang non aset di wilayah Kota Administrasi;
   d. pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan Hak Asasi Manusia; dan
   e. fasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum sesuai lingkup tugasnya.

9. **Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian Kota Administrasi;
   b. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan ketatalaksanaan Kota Administrasi;
   c. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelayanan publik Kota Administrasi;
   d. pengelolaan pengaduan masyarakat;
   e. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Kota Administrasi;

f. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi;
g. pengoordinasian dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi;
h. penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi;
i. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di wilayah Kota Administrasi; dan
j. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di wilayah Kota Administrasi.

10. **Bagian Perekonomian** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perekonomian. Bagian Perekonomian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang perekonomian di tingkat Kota Administrasi. Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan), perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perhubungan di wilayah Kota Administrasi;
    b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan), perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perhubungan di wilayah Kota Administrasi;
    c. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan), perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perhubungan di wilayah Kota Administrasi; dan

d. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan), perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perhubungan di wilayah Kota Administrasi.

11. **Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang pembangunan di tingkat Kota Administrasi. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan di wilayah Kota Administrasi;
    b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan di wilayah Kota Administrasi;
    c. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan di wilayah Kota Administrasi;
    d. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan di wilayah Kota Administrasi; dan
    e. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah.

12. **Bagian Umum dan Protokol** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum dan Protokol. Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan perlengkapan Kota Administrasi. Bagian Umum dan

Protokol menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang/ aset, kehumasan, data, sistem informasi Kota Administrasi;
b. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang/aset, kehumasan dan dokumentasi Kota Administrasi;
c. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung kantor Kota Administrasi termasuk rumah dinas;
d. pengelolaan pelayanan tamu Kota Administrasi;
e. pengurusan perjalanan Dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Asisten Sekretaris Kota;
f. pengelolaan acara pimpinan Kota Administrasi;
g. pengelolaan pengamanan dalam Kompleks Kantor Walikota; dan
h. pengoordinasian dan pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi.

13. **Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program, anggaran dan administrasi keuangan Kota Administrasi. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan program, anggaran dan administrasi keuangan Kota Administrasi;
b. pengoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
c. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
d. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan Kota Administrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
e. pengoordinasian dan pengelolaan dokumen keuangan Kota Administrasi;
f. pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lingkup Kota Administrasi;

h. penggordinasian pengelolaan manajemen resiko Kota Administrasi;
i. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di wilayah Kota Administrasi; dan
j. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di wilayah Kota Administrasi.

14. **Bagian Kesejahteraan Rakyat** dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang kesejahteraan rakyat di tingkat Kota Administrasi. Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan, kearsipan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;
    b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan, kearsipan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;
    c. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan, kearsipan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;
    d. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan, kearsipan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;
    e. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi; dan
    f. pengelolaan perpustakaan kedinasan Kota Administrasi.

15. **Camat** berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Camat mempunyai tugas:
    a. memimpin, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
    b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
    c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
    f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
    g. membina penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
    h. melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh UKPD yang ada di Kecamatan;
    i. mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kecamatan; dan
    j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD, UKPD dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Camat dapat dibantu oleh Wakil Camat. Wakil Camat mempunyai tugas:

a. membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya;
b. mewakili Camat apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

16. **Lurah** berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas:
    a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;
    b. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
    c. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
    d. melaksanakan pelayanan masyarakat Kelurahan;
    e. memelihara ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan;
    f. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan;
    g. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kelurahan; dan

h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD, UKPD dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan.

Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
c. pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan;
d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan;
f. pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
g. pembinaan dan koordinasi rukun warga dan rukun tetangga;
h. penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
i. pengelolaan kesekretariatan Kelurahan; dan
j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
l. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
m. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
n. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
o. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
p. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
q. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
r. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

2.3 GAMBARAN SUMBER DAYA MANUSIA PERANGKAT DAERAH

Jumlah pegawai di Kota Administrasi Jakarta Selatan tercatat sebanyak 856 orang. Dari total tersebut, 467 orang atau 53% merupakan pegawai laki-laki, sedangkan 389 orang atau 47% lainnya adalah pegawai perempuan. Data ini memberikan gambaran mengenai komposisi gender dalam struktur kepegawaian di wilayah tersebut, yang cenderung berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Walikota	1	-	1
2	Wakil Walikota	1	-	1
3	Sekretaris Kota	1	-	1
4	Asisten Pemerintahan	-	-	-
5	Bagian Pemerintahan	11	3	14
6	Bagian Hukum	6	6	12
7	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik	5	9	14
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	-	1
9	Bagian Perekonomian	6	4	10
10	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	8	3	11
11	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	1	-	1
12	Bagian Umum dan Protokol	12	10	22
13	Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan	3	10	13
14	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	7	14
15	Kecamatan	69	72	141
16	Kelurahan	335	265	600
Jumlah		467	389	856

Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, September 2025

Rincian distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.9 menginformasikan jumlah pegawai di masing-masing unit kerja. Beberapa unit kerja, seperti Bagian Pemerintahan dan Kelurahan, memiliki jumlah pegawai laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuan, sementara unit kerja lainnya menunjukkan jumlah pegawai perempuan yang cukup signifikan, seperti pada Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

Berdasarkan data Tabel 2.10, distribusi pegawai menunjukkan kecenderungan dominasi pada kelompok usia di atas 50 tahun, sebesar 254 orang atau 33%, kelompok usia 41-45 tahun menempati posisi kedua dengan jumlah 182 orang atau 20%, kelompok usia 36-40 tahun mencatatkan jumlah 165 orang atau 19%, dan kelompok usia 46-50 tahun sebanyak 150 orang atau 15%.

Tabel 2.10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

No	Unit Kerja	Usia (tahun)						
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50
1	Walikota	-	-	-	-	-	-	1
2	Wakil Walikota	-	-	-	-	-	-	1
3	Sekretaris Kota	-	-	-	-	-	-	1
4	Asisten Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-
5	Bagian Pemerintahan	1	2	3	1	3	-	4
6	Bagian Hukum	-	1	1	2	2	1	5
7	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik	-	2	1	3	3	3	2
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	1
9	Bagian Perekonomian	-	-	1	3	1	-	5
10	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	-	2	-	3	3	1	2
11	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	1
12	Bagian Umum dan Protokol	-	3	6	1	3	1	8
13	Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan	1	1	1	4	1	2	3
14	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	1	1	2	3	6
15	Kecamatan	1	2	8	34	21	29	46
16	Kelurahan	5	27	34	113	143	110	168
Jumlah		**8**	**41**	**56**	**165**	**182**	**150**	**254**

Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, September 2025

Berdasarkan data Tabel 2.11 mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan kepangkatan, dapat dilihat bahwa distribusi pegawai lebih banyak didominasi oleh golongan III, dengan jumlah pegawai mencapai 584 orang yaitu 68,22% dari total pegawai. Sedangkan, pegawai golongan IV sebanyak 110 orang atau sebesar 12,85% dari total pegawai, pegawai golongan II dengan jumlah 85 orang atau sebesar 9,93% dari total pegawai, serta pegawai golongan I dengan jumlah 2 orang atau sebesar 0,23% dari total pegawai.

Tabel 2.11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Unit Kerja	Golongan						
		I	II	III	IV	IX (PPPK)	IX (PPPK)	IX (PPPK)
1	Walikota	-	-	-	1	-	-	-
2	Wakil Walikota	-	-	-	1	-	-	-
3	Sekretaris Kota	-	-	-	1	-	-	-
4	Asisten Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	1	-	-	-
6	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	1	-	-	-
7	Bagian Pemerintahan	-	1	10	3	-	-	-
8	Bagian Hukum	-	2	8	2	-	-	-
9	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	-	2	11	1	-	-	-
10	Bagian Perekonomian	-	1	7	2	-	-	-
11	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	-		9	2	-	-	-
12	Bagian Umum dan Protokol	-	4	17	1	-	-	-
13	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	-	1	11	1	-	-	-
14	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-		13	1	-	-	-
15	Kecamatan	-	6	80	48	7	-	-
14	Kelurahan	2	68	418	44	-	5	63
Jumlah		2	85	584	110	7	5	63

Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, September 2025

Tabel 2.12 menunjukkan jumlah pegawai di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan data pada September 2025, mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan S1/DIV, dengan total 465 orang atau sekitar 54,32% dari total pegawai yang berjumlah 856 orang. Pegawai dengan pendidikan SMA sebesar 18,22% (156 orang), sedangkan pegawai dengan pendidikan DIII sebanyak 13,78% (118 orang), serta S2 mencapai 13,20% (113 orang) dari total pegawai.

Tabel 2.12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	SD	SMP	SMA	DIII	S1/ DIV	S2	Total
1	Walikota	-	-	-	-	-	1	1
2	Wakil Walikota	-	-	-	-	-	1	1
3	Sekretaris Kota	-	-	-	-	-	1	1
4	Asisten Pemerintahan	-	-	-	-	-		0
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	1	1
6	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	1	1
7	Bagian Pemerintahan	-	-	2		9	3	14
8	Bagian Hukum	-	-	2		7	3	12
9	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	-	-	2	2	8	2	14
10	Bagian Perekonomian	-	-	2	1	5	2	10
11	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	10		12
12	Bagian Umum dan Protokol	-	-	5	1	11	5	23
13	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	-	-	1	2	9	1	13
14	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	3	3	7	1	14
15	Kecamatan	-	-	7	16	85	34	143
16	Kelurahan	2	4	132	92	314	57	536
Jumlah		**2**	**4**	**156**	**118**	**465**	**113**	**856**

Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, Juli 2025

Berdasarkan tabel 2.13, jumlah pegawai yang terdata pada masing-masing unit kerja di Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari berbagai jabatan struktural. Unit kerja dengan jabatan struktural terbanyak adalah Kelurahan, dengan total 256 orang atau sebesar 55,41% dari total pegawai berdasarkan jabatan struktural, diikuti oleh Kecamatan dengan jumlah pegawai memiliki jabatan struktural sebanyak 57 orang (12,34%). Dari segi klasifikasi jabatan, jabatan Administrasi Terampil dengan jumlah pegawai sebanyak 125 orang atau sebesar 27,05% dari total pegawai berdasarkan jabatan struktural, jabatan Pelayanan Ahli sebanyak 4 orang (0,86%), jabatan Pelayanan Terampil tercatat sebanyak 2 orang (0,43%), jabatan Teknis Ahli dengan jumlah pegawai sebanyak 186 orang (40,26%) dan jabatan Teknis Terampil sebanyak 145 orang atau sebesar 31,38% dari total pegawai berdasarkan jabatan struktural.

Tabel 2.13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Administrasi Terampil	Pelayanan Ahli	Pelayanan Terampil	Teknis Ahli	Teknis Terampil	Total
1	Bagian Pemerintahan	1	-	-	7	2	10
2	Bagian Hukum	2	-	-	5	1	8
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	2	-	-	4	4	10
4	Bagian Perekonomian	2	-	-	4	2	8
5	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	6	2	9
6	Bagian Umum dan Protokol	6	-	-	5	7	18
7	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	3	-	-	3	3	9
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	-	-	2	3	11
9	Kecamatan	6	-	-	20	30	57
10	Kelurahan	97	4	2	130	91	256
Jumlah		**125**	**4**	**2**	**186**	**145**	**462**

Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, September 2025

Berdasarkan karakteristik jabatan fungsional dominan pada Ahli Muda (Ketua Subkelompok) sebesar 11 orang atau sebesar 55% dari total pegawai berdasarkan jabatan fungsional kemudian diikuti Ahli Pertama sebesar 7 orang atau sebesar 35%, dan Ahli Muda (Arsiparis) sebesar 2 orang atau sebesar 10% dari total pegawai berdasarkan jabatan fungsional. Rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional pada setiap unit kerja dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Unit Kerja	Ahli Muda (Ketua Subkelompok)	Ahli Muda (Arsiparis)	Ahli Pertama	Total
1	Bagian Pemerintahan	2	-	-	2
2	Bagian Hukum	3	-	-	3
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1	-	-	1
4	Bagian Perekonomian	1	-	-	1
5	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	2	-	-	2
6	Bagian Umum dan Protokol	-	2	-	2
7	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	1	-	-	1
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	1
9	Kecamatan	-	-	7	7
10	Kelurahan	-	-	-	-
Jumlah		**11**	**2**	**7**	**20**

Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, September 2025

Analisis jabatan kondisi eksisting pada 1 Januari 2025, menggambarkan bahwa 57 nama jabatan telah diisi, sedangkan 26 nama jabatan belum diisi, jumlah kekosongan sebesar 51 ASN. Bila dijabarkan ke dalam kelas jabatan, kekosongan ASN kondisi eksisting sebagian besar tersebar pada kelas jabatan rentang 7-11, dimana kekosongan jumlah ASN terbesar ada di kelas jabatan 8. Total nama jabatan sudah terisi ASN sebesar 856 orang.

Tabel 2.15 Kondisi Eksisting Kekosongan Formasi Jabatan ASN

No	Nama Jabatan yang Masih Belum Diisi	Jumlah Sesuai Kelas Jabatan								
		5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Analis Hukum Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Analis Hukum Ahli Pertama	-	-	-	2	-	-	-	-	-
3	Analis Kebijakan Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	-	5	
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	-	-	1	12	-	-	-	-	-
5	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Arsiparis Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	Arsiparis Ahli Pertama	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Dokumentalis Hukum	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	Kepala Subbagian Rumah Tangga	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	Ketua Sub kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang terbuka Hijau	-	-	-	-	1	-	-	-	-

No	Nama Jabatan yang Masih Belum Diisi	Jumlah Sesuai Kelas Jabatan								
		5	6	7	8	9	10	11	12	14
11	Ketua Sub kelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12	Penelaah Teknis Kebijakan	-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	Penelaah Teknis Kebijakan	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14	Pengadministrasi Perkantoran	7	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pengelola Layanan Operasional	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	Pengolah Data dan Informasi	-	2	-	-	-	-	-	-	-
18	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	-	-	-	1	-	-	-	-	-
19	Perencana Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	Perencana Ahli Muda	-	-	-	-	-	1	-	-	-
21	Perencana Ahli Pertama	-	-	-	1	-	-	-	-	-
22	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	-	-	1	-	-	-	-	-	-
23	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	-	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	-	-	-	1	-	-	-	-	-
25	Pustakawan Ahli Muda	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26	Pustakawan Ahli Pertama	-	-	-	1		-	-	1	-
Total		**7**	**5**	**4**	**21**	**4**	**1**	**2**	**7**	**0**

Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, September 2025

Status analisis ABK dengan periode data 1 Januari 2025, menggambarkan bahwa 7 nama jabatan belum diisi oleh ASN dan 76 nama jabatan telah diisi. Kekosongan nama jabatan ABK tersebar pada kelas jabatan 5-7, dengan total 49 orang. Total jabatan formasi ABK yang sudah terisi ASN sebesar 1.232 orang.

Tabel 2.16 Kekosongan Formasi Jabatan ASN Hasil Analisis ABK

No	Nama jabatan yang masih belum diisi	Jumlah Sesuai Kelas Jabatan		
		5	6	7
1	Operator Layanan Operasional	1	-	-
2	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	-	-	2
3	Penata Kelola Pemerintahan	-	1	-
4	Penelaah Teknis Kebijakan	-	9	-
5	Penelaah Teknis Kebijakan	-	6	-
6	Pengadministrasi Perkantoran	28	-	-
7	Pengolah Data dan Informasi	-	2	-
Total		**29**	**18**	**2**

Sumber data: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, September 2025

2.4 GAMBARAN ASET DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Aset atau modal berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Sarana dan prasarana tersebut mencakup berbagai jenis fasilitas yang secara langsung berkontribusi terhadap kelancaran operasional organisasi, antara lain kendaraan operasional, gedung kantor, rumah dinas, serta peralatan kantor. Keberadaan aset-aset ini tidak hanya menjadi penunjang fisik, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien bagi seluruh ASN di lingkungan perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas serta kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dengan fasilitas yang lengkap dan terawat dengan baik, pegawai dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal, sehingga pelayanan prima kepada masyarakat tercapai. Oleh karena itu, dukungan aset yang optimal dan memadai serta sarana dan prasarana selalu dalam kondisi andal akan mendukung tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator kinerja organisasi.

Tabel 2.17 Jumlah Aset Menurut Jenis

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	Ket
1	Kendaraan roda 4	15	14	1	
2	Kendaraan roda 2	20	11	9	
3	Peralatan kantor	8.552	8.097	455	
4	Bangunan	5	5	-	
5	Tanah	74.747 m^2	-	-	

Sumber : Bagian Umum dan Protokol, 2022

Dari Tabel 2.17, kondisi aset menurut jenis terdiri atas (a) kendaraan roda empat berjumlah 15 unit, dengan rincian dalam kondisi baik sebanyak 14 unit dan kondisi rusak berat sebanyak 1 unit; (b) kendaraan roda dua berjumlah 20 unit, dengan rincian dalam kondisi baik sebanyak 11 unit dan kondisi rusak berat sebanyak 9 unit; (c) peralatan kantor berjumlah 8.552 unit, dengan rincian dalam kondisi baik sebanyak 8.097 unit dan kondisi rusak sebanyak 455 unit; (d) bangunan berjumlah 5 unit, dengan seluruhnya dalam kondisi baik; serta (e) tanah seluas 74.747 m^2.

Tabel 2.18 Jumlah Aset Tanah

No	Jenis Barang	Luas	Alamat	Penggunaan
1	Tanah bangunan rumah negara golongan	1.280 m^2	Jl. Citayam No. 1, RT 001, RW 007	Rumah dinas Walikota Jakarta Selatan
2	Tanah bangunan kantor pemerintahan	1.380 m^2	Jeruk No.23 RT 010 RW 001	Bangunan kantor pemerintahan
3	Tanah untuk makam Hindu/Budha/China	4.830 m^2	Delman Elok RT 004 RW. 011	Makam Hindu/Budha/China
4	Tanah untuk makam Hindu/Budha/China	1.007 m^2	Nimun Raya RT 012 RW 015	Makam Hindu/Budha/China
5	Tanah untuk makam Hindu/Budha/China	2.280 m^2	Bintaro Raya No 7 RT 012 RW 010	Makam Hindu/Budha/China
6	Tanah bangunan kantor pemerintah	35.194 m^2	Prapanca Raya No.9 RT 001 RW 001	Kantor Walikota
7	Tanah bangunan rumah sakit	28.776 m^2	Rengas Raya RT 005 RW 0111	Tanah RSUD
8	Tanah bangunan kantor pemerintah	3.034 m^2	Kemang Raya No 124 RT 003 RW 002	

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Tabel 2.19 Jumlah Aset Gedung dan Bangunan

No	Jenis Barang	Ukuran	Alamat	Kondisi	Bertingkat
1	Rumah Golongan Permanen 1 Negara Tipe A	468 m^2	Jl. Citayam No. 1	1	1
2	Bangunan gedung Kantor permanen	409 m^2	Jl. Abdul Kahfi No. 1	3	0
3	Bangunan gedung kantor permanen	29.652 m^2	Jl. Prapanca Raya	1	17
4	Bangunan gedung kantor permanen	49.915 m^2	Jl. Prapanca Raya	1	10
5	Bangunan gedung kantor permanen	400 m^2	Jl. Prapanca Raya	1	17
6	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	300 m^2	Jl. Prapanca Raya	1	17
7	Pagar permanen	500 m^2	Jl. Prapanca Raya	1	-
8	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	75 m^2	Jl. Prapanca Raya	1	-
9	Rambu tanda silang	10 unit	Jl. Prapanca Raya	1	10
10	Rumah panel	20 m^2	Jl. Citayam No. 1	1	-
11	Taman permanen	200 m^2	Jl. Prapanca Raya	1	10
12	Taman Semi Permanen	1 m^2	Jl. Prapanca Raya	1	0

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Tabel 2.20 menyajikan data mengenai jumlah aset gedung dan bangunan yang tersebar di beberapa alamat di perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan rincian informasi meliputi jenis barang, ukuran bangunan, alamat, kondisi, dan jumlah tingkat lantai bangunan/gedung. Aset yang tercatat terdiri dari rumah, bangunan kantor permanen, taman, serta berbagai jenis gedung dan fasilitas lain seperti rambu tanda silang dan pagar permanen. Terdapat berbagai ukuran mulai dari 1 m² hingga 49.652 m², yang tersebar di alamat Jalan Citayam, Jalan Abdul Kahfi, dan Jalan Prapanca Raya. Kondisi tingkat bangunan bervariasi. Pada Tabel 2.20 berikut digambarkan lengkap tentang distribusi dan kondisi aset gedung yang dikelola oleh Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2022.

Tabel 2.20 Jumlah Aset/Modal Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Alamat	No Sertifikat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jumlah Lantai
I.	**Kecamatan Jagakarsa**	**Jl. Sirsak No.02, RT.5/RW.7, Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan**		**2.774 m²**	**2.000 m²**	**4**
1	Kelurahan Ciganjur	Jl. Anda No IB, Kelurahan Ciganjur		2.113 m²	812 m²	4
2	Kelurahan Cipedak	Jl. Pinding No. 1, Ciganjur, RT.1/RW.1, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan		2.137 m²	648 m²	3
3	Kelurahan Jagakarsa	Jalan Jagakarsa II No. 1, RT.01 / RW.07, Jagakarsa, RT.1/RW.7, Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan		1.515 m²	443 m²	3
4	Kelurahan Lenteng Agung	Jl. Agung Raya I No.9, RW.2, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan		928 m²	256 m²	3
5	Kelurahan Srengseng Sawah	Jl. Raya Srengseng Sawah No. 8.		1.103 m²	400 m²	3
6	Kelurahan Tanjung Barat	Jl. Sirsak No. 2, Kelurahan Jagakarsa		1.502 m²	1.200 m²	3
II.	**Kecamatan Pasar Minggu**	**Jl. Raya Ragunan, RT.6/RW.1, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan**		**5.000 m²**	**950 m²**	**4**
1	Kelurahan Cilandak Timur	Jl. Bhakti No.48 A, RT.3/RW.7, Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan		1.062 m²	723,93 m²	4
2	Kelurahan Jati Padang	Jl. Raya Ragunan RT 008/01, Jati Padang		900 m²	329 m²	3
3	Kelurahan Kebagusan	Jl. Kebagusan Dalam IV RT 009/05 No. 1.		2.431 m²		3
4	Kelurahan Pasar Minggu	Jl. Raya Ragunan No. 16, Pasar Minggu		1.025 m²	575 m²	3
5	Kelurahan Pejaten Barat	Jl. Komp. Bappenas Siaga Raya No.1, RT.12/RW.4,		9.145 m²	1.200 m²	3

No	Kecamatan/ Kelurahan	Alamat	No Sertifikat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jumlah Lantai
		Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan				
6	Kelurahan Pejaten Timur	Jalan Swadaya No.1, Pejaten Timur, RT. 006/RW.10, Pejaten Timur, Pasar Minggu,, RT.5/RW.10, Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan		3.462 m^2	300 m^2	3
7	Kelurahan Ragunan	Jl. Saco No.1, Ragunan, Pasar Minggu, RT.1/RW.4, Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan		932 m^2	750 m^2	3
III.	**Kecamatan Cilandak**	**Jl. KH Muhasyim Raya No. 1, RT. 14, RW. 06, Kelurahan Cilandak Barat**		**2.410 m^2**	**1.545 m^2**	**4**
1	Kelurahan Cilandak Barat	Jl. Terogong Raya No. 1, 11, 10, RT. 9, RW. 1C, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak		1.500 m^2	1.200 m^2	3
2	Kelurahan Cipete Selatan	Jl. Palem No. 17 A, RT. 12, RW. 003, Kelurahan Cipete Selatan		900 m^2	700 m^2	3
3	Kelurahan Gandaria Selatan	Jl. Mangga No.28 B, RT.7/RW.4, Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan		1.069 m^2	1.008 m^2	3
4	Kelurahan Lebak Bulus	Jl. Manunggal Jaya No.30, RT.7/RW.4, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan		1.730 m^2	1.025 m^2	3
5	Kelurahan Pondok Labu	Jl. Swakarya Bawah No.1, RT.3/RW.9, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan		750 m^2	600 m^2	4
IV.	**Kecamatan Pesanggrahan**	**Jl. Pesanggrahan Raya No.2, RT.5/RW.3, Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan**		5.300 m^2	2.717,96 m^2	**4**
1	Kelurahan Bintaro	Jl. RC. Veteran Raya No.4, RT.1/RW.3, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan		1.595 m^2	802 m^2	3
2	Kelurahan Pesanggrahan	Jl. Pesanggrahan Indah No.2, RT.5/RW.3, Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan		5.300 m^2	879 m^2	4
3	Kelurahan Petukangan Selatan	Jl. Damai PDK 1, No. 2, Kelurahan Petukangan Selatan		1.075 m^2	760 m^2	3
4	Kelurahan Petukangan Utara	Jl. Masjid Darul Falah No.1, RT.4/RW.3, Petukangan Utara, Kec.		1.270 m^2	1.270 m^2	3

No	Kecamatan/ Kelurahan	Alamat	No Sertifikat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jumlah Lantai
		Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan				
5	Kelurahan Ulujami	Jl. Kelurahan Ulujami No.1, RT.1/RW.4, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan		1.045 m^2	762 m^2	3
V.	**Kecamatan Kebayoran Lama**	**Jl. Ciputat Raya No. 1 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan**	**Sertifikat Hak Pakai No. 389 Tanggal 25 Maret 1981**	3.575 m^2	2.588 m^2	4
1	KelurahanCipulir	Jl. Samudra No.1, RT.2/RW.11, Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan		1.145 m^2	1.678 m^2	1. 3
2	Kelurahan Grogol Selatan	Jl. Rawa Simprug VIII No.1, RT.9/RW.10, Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan		1.000 m^2	1.500 m^2	3
3	Kelurahan Grogol Utara	Jl. Pulo Kemandoran No.99 1, RT.1/RW.11, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan		1.400 m^2	1.800 m^2	3
4	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Jl. Bungur No.1, RT.2/RW.2, Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan		1.000 m^2	1.000 m^2	4
5	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Jl. Ciputat Raya No. 1 A, Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Sertifikat HakPakai No. 389 Tanggal 25 Maret 1981	2.169 m^2	600 m^2	3
6	Kelurahan Pondok Pinang	Jl. Pd. Pinang VII No.RT.10, RT.10/RW.2, Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan		1.640 m^2	750 m^2	3
VI.	**Kecamatan Kebayoran Baru**	**Jalan Kerinci IX Blok E/1, RT.8/RW.2, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan**		1.614 m^2	1.150 m^2	**3**
1	Kelurahan Cipete Utara	Jl. Sawo Dalam III No.10, RT.9/RW.7, Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan		1.952 m^2	259 m^2	3
2	Kelurahan Gandaria Utara	Jl. Radio Dalam VII, Kecamatan Kebayoran Baru		1.500 m^2	1.050 m^2	3
3	Kelurahan Gunung	Jl. Bujana Dalam No. 7 RT 10 RW 01.		1.400 m^2	4.167 m^2	3
4	Kelurahan Kramat Pela	Jl. Mendawai I No.88, RT.1/RW.7 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru		1.080 m^2	387 m^2	3
5	Kelurahan Melawai	Jl. Wijaya IX No. 14. Wilayah Jakarta Selatan		586 m^2	586 m^2	4

No	Kecamatan/ Kelurahan	Alamat	No Sertifikat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jumlah Lantai
6	Kelurahan Petogogan	Jl. Wijaya Timur Raya No.116, RT.2/RW.2, Petogogan		800 m^2	500 m^2	3
7	Kelurahan Pulo	Jl. Prapanca Raya No. 5, Jakarta Selatan		1.200 m^2	760 m^2	3
8	Kelurahan Rawa Barat	Jl. Senayan No.30, RT.6/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan		856 m^2	772 m^2	4
9	Kelurahan Selong	Jl. Limo No 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan		968 m^2		
10	Kelurahan Senayan	Jl. Tulodong Bawah VII, RT.2/RW.1, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan		710 m^2	200 m^2	4,5
VII.	**Kecamatan Mampang Prapatan**	Jl. Mampang Prapatan XII, RT.3/RW.6, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan		2.617 m^2	6.225 m^2	5
1	Kelurahan Bangka	Jl. Kemang Tim. I No.1, RT.6/RW.4, Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan		900 m^2	900 m^2	4
2	Kelurahan Kuningan Barat	Jl. Kuningan Barat Raya No.1, RT.11/RW.1, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan		1.100 m^2	1.200 m^2	3
3	Kelurahan Mampang Prapatan	Jl. Mampang Prapatan IV Gang Lurah No.8, RW.5, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan		1.315 m^2	819 m^2	3
4	Kelurahan Pela Mampang	Jl. Bangka X No.1, RT.4/RW.7, Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan		772 m^2	1.160 m^2	4
5	Kelurahan Tegal Parang	Jl. Tegal Parang Selatan V, No. 19 C, RT.8, RW. 4, Tegal Parang	Sertifikat Hak Pakai No. 00317 dan No. 28.	987 m^2	800 m^2	3
VIII	**Kecamatan Pancoran**	**Jl. Pengadegan Timur II/2 Kecamatan Pancoran**	**IMB Nomor 5896/IMB/ 2012**	3.963 m^2	1.264 m^2	**4**
1	Kelurahan Cikoko	Jl. Cikoko Bar. III No.45, RT.5/RW.5, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan		1.977 m^2	798 m^2	3
2	Kelurahan Duren Tiga	Jl. Guru Alip No.26, RT.5/RW.6, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan		1.019 m^2	600 m^2	3
3	Kelurahan Kalibata	Jl. Kalibata Timur IV No.8, RT.10/RW.8, Kalibata, Kec. Pancoran		742 m^2	1.500 m^2	4
4	Kelurahan Pancoran	Jl. Pancoran Barat III No.55, RT.2/RW.4,		668 m^2	798 m^2	4

No	Kecamatan/ Kelurahan	Alamat	No Sertifikat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jumlah Lantai
		Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan				
5	Kelurahan Pengadegan	Jl. Pengadegan Timur 1 No 9d Pengadegan Pancoran Jaksel, RT.6/RW.1.		833 m^2	645 m^2	4
6	Kelurahan Rawajati	Jl. Rawajati Bar. V No.37-47, RT.6/RW.4, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan		700 m^2	828 m^2	4
IX	**Kecamatan Tebet**	**Jl. Prof. DR. Soepomo No.16, RW.2, Tebet Bar., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan**		2.995 m^2	2.400 m^2	**4**
1	Kelurahan Bukit Duri	Jl. Kp. Melayu Kecil 3 No.12, RW.9, Bukit Duri, Kec. Tebet		1.355 m^2	800 m^2	3
2	Kelurahan Kebon Baru	Jl. Asem Baris Raya No.101, RT.9/RW.5, Kb. Baru, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		802 m^2	958 m^2	4
3	Kelurahan Manggarai Selatan	Jl. Rambutan No. IV/D, Kelurahan Manggarai Selatan		653 m^2	3.200 m^2	3
4	Kelurahan Manggarai			1.000 m^2	300 m^2	4
5	Kelurahan Menteng Dalam	Jl. Rasamala 1, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Menteng Dalam		1.222 m^2	750 m^2	4
6	Kelurahan Tebet Barat	Jl. Tebet Timur Dalam III M Jl. Tebet Raya No.1, RT.1/RW.3, Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		1.207 m^2	775 m^2	3
7	Kelurahan Tebet Timur	Jl. Tebet Timur Dalam III M Jl. Tebet Raya No.1, RT.1/RW.3, Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan		1.032 m^2	1.377 m^2	3
X	**Kecamatan Setiabudi**	**Jl. Setia Budi Barat No.8K, RT.3/RW.3, Kuningan, Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan**		7.353 m^2	2.500 m^2	4
1	Kelurahan Guntur	Jl. Tangkuban Perahu No.2, RT.8/RW.2, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan		1.624 m^2	720 m^2	4
2	Kelurahan Karet Kuningan	Jl. Anggrek 4 No.1, RT.6/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan		1.249 m^2	738,8 m^2	3
3	Kelurahan Karet Semanggi	Jl K.H Guru Mughni No. 1 Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan		293 m^2	150 m^2	4
4	Kelurahan Karet	Jl. Karet Karya No.1, RT.5/RW.7, Kuningan, Karet, Kecamatan			1.400 m^2	4

No	Kecamatan/ Kelurahan	Alamat	No Sertifikat	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jumlah Lantai
		Setiabudi, Kota Jakarta Selatan				
5	Kelurahan Kuningan Timur	Jl. Lapangan Tenis UMS, Karang Asem 2 No.3, RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan		6.545 m^2	841 m^2	4
6	Kelurahan Menteng Atas	Jl. Menteng Pulo No.1, RW.1, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan		1.400 m^2	1.000 m^2	3
7	Kelurahan Pasar Manggis	Jl. Menteng Wadas Timur No.122, RW.1, Ps. Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan		1.015 m^2		3
8	Kelurahan Setiabudi	Jl. Setia Budi Barat No.7, RT.3/RW.3, Kuningan, Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan		2.848 m^2	800 m^2	3

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Rumah dinas, gedung kantor kecamatan, dan gedung kantor kelurahan wajib untuk memenuhi Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah. Hasil monev dan koordinasi bagian pemerintahan, tahun 2024 memberi informasi bahwa (a) rumah dinas Camat sebesar 7 telah memenuhi standar, (b) rumah dinas Lurah sebesar 10 telah memenuhi standar, (c) gedung kantor Kecamatan 9 telah memenuhi standar, dan (d) gedung kantor Kelurahan 25 telah memenuhi standar. Terdapat 83 bangunan meliputi rumah dinas Camat, rumah dinas Lurah, gedung kantor Kecamatan, dan gedung kantor Kelurahan belum memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tabel 2.21 dapat dilihat rekapitulasi pemenuhan standar rumah dinas dan gedung kantor di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tabel 2.21 Status Pemenuhan Standar Rumah Dinas dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan

No	Jenis Gedung	Standar	Belum memenuhi standar
1	Rumah Dinas Camat	7	2
2	Rumah Dinas Lurah	10	43
3	Gedung Kantor Kecamatan	9	1
4	Gedung Kantor Kelurahan	25	37
Total		**51**	**83**

Sumber: Hasil Monev dan Koordinasi Bagian Pemerintahan, Tahun 2024

Tabel 2.22 menunjukkan status kondisi fisik gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakan, yaitu baik, rusak

ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Data menunjukkan dari total 72 unit gedung, hanya 20 unit dalam kondisi baik, dengan rincian 2 unit gedung Kecamatan dan 18 unit gedung Kelurahan. Sebagian besar gedung tercatat mengalami kerusakan ringan yaitu sebesar 51 unit dengan rincian 8 unit gedung Kecamatan dan 43 unit gedung Kelurahan. Kemudian, terdapat 1 unit gedung Kelurahan dalam kondisi rusak sedang, selain itu tidak terdapat unit yang mengalami kerusakan berat. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar gedung di Jakarta Selatan membutuhkan perhatian lebih terkait pemeliharaan dan perbaikan untuk meningkatkan kondisi fisiknya.

Tabel 2.22 Status Kondisi Fisik Gedung Kantor Kecamatan Dan Kelurahan
Di Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Jenis Gedung	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total
1	Gedung Kecamatan	2	8	-	-	10
2	Gedung Kelurahan	18	43	1	-	62
Total		**20**	**51**	**1**	**-**	**72**

Sumber: Hasil Monev dan Koordinasi Bagian Pemerintahan, Tahun 2024

2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAHAN DINAMIS DAN RESPONSIF UNTUK PERFORMA PELAYANAN PUBLIK PRIMA

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif merupakan kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan dinamis menekankan pentingnya kebijakan, institusi, dan struktur pemerintahan yang mampu beradaptasi secara cepat dan efektif terhadap kondisi lingkungan yang dinamis. Dengan pendekatan ini, tujuan pembangunan dapat dicapai lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, otonomi Kota Administrasi Jakarta Selatan berbeda dengan wilayah kota/kabupaten lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi terletak pada provinsi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengkoordinasikan dan

mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta perangkatnya memiliki peran utama dalam koordinasi, fasilitasi, dan administrasi. Namun, keterbatasan kewenangan teknis menghambat kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan wilayah dan permasalahan publik yang bersifat lintas urusan, yang terus muncul seiring dengan dinamika aktivitas penduduk. Kondisi ini menyebabkan beberapa kendala signifikan, antara lain: (a) terjadinya keterlambatan dalam merespons dan menyelesaikan aduan masyarakat terkait pelayanan publik dan hasil pembangunan secara optimal; (b) proses koordinasi menjadi lebih panjang dan kompleks, khususnya dalam menangani permasalahan teknis yang melibatkan berbagai perangkat daerah; serta (c) munculnya kesan hanya berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat tanpa kewenangan langsung untuk mengambil tindakan penyelesaian. Oleh karena itu, terbatasnya kewenangan otonomi di tingkat kota mengakibatkan pemerintahan yang kurang dinamis dan responsif dalam memberikan pelayanan publik, terutama dalam menangani isu-isu teknis dan lintas urusan antar perangkat daerah terkait. Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih dinamis dan responsif, diperlukan peningkatan kewenangan serta optimalisasi penguatan mekanisme koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efisien. Tabel 2.23 merupakan penjabaran berbagai permasalahan yang dihadapi pada setiap bagian perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan guna terwujudnya pemerataan hasil pembangunan yang mensejahterakan warga Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tabel 2.23 Permasalahan Bagian Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Unsur Bagian	Uraian permasalahan
1	Bagian Pemerintahan	a. Masih adanya kualitas gedung kantor kecamatan, kelurahan, rumah dinas camat, dan rumah dinas lurah yang belum dalam kondisi baik
		b. Masih perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi Lembaga Kemasyarakatan RT, RW, dan LMK dan FKDM
		c. Masih perlunya peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana
		d. Masih perlunya pembinaan dan evaluasi terhadap Kecamatan dan Kelurahan
2	Bagian Hukum	a. Belum optimalnya pelayanan pengurusan perkara khususnya sengketa pertanahan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki instansi terkait
		b. Masih perlunya peningkatan pendampingan hukum bagi ASN terkait perkara yang sedang berjalan di pengadilan
		c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemahaman hukum khususnya masalah waris, pertanahan dan kenakalan remaja
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	a. Belum optimalnya upaya pembaruan standar pelayanan di kelurahan dan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
		b. Kewenangan kepegawaian hanya bersifat mengusulkan pengembangan kompetensi dan kebutuhan pegawai. Pengelolaan kebutuhan, penambahan, pelatihan pegawai, menjadi lingkup kewenangan Provinsi DKI Jakarta
4	Bagian Perekonomian	a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketahanan pangan pada Kota Administrasi
		b. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembentukan kewirausahaan baru pada Kota Administrasi
5	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya manajemen koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan/penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir dan lingkungan hidup (pengelolaan sampah, kualitas air, kualitas tanah, dan kualitas udara)
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	a. Data penerima bansos hasil sinkronisasi di tingkat wilayah belum optimal digunakan sebagai dasar penerima manfaat bansos tepat sasaran
		b. Belum optimalnya pelaksanaan Kota Sehat, posyandu dan program kesehatan (termasuk kesehatan jiwa)
		c. Belum optimalnya pelaksanaan Kota Layak Anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesetaraan gender serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		d. Pelaksanaan penyaluran BOP dan BOS belum maksimal dan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut

No	Unsur Bagian	Uraian permasalahan
7	Bagian Umum dan Protokol	a. Belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) lingkup Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
		b. Belum optimalnya tata kelola sarana dan prasarana gedung kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
		c. Masih perlu ditingkatkan capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan
8	Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan	a. Belum optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan melalui Serapan Perkiraan Sendiri
		b. Belum optimalnya pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lingkup Kota Administrasi
		c. Masih kurangnya pemahaman UKPD dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja serta belum mempertimbangkan prioritas dan target kinerja yang akan dicapai
9	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban
10	Kelurahan	Masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban, penguatan peran RT, RW, dan LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat di tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan seperti posyandu dan penanggulangan DBD, perlindungan hukum, serta peningkatan kinerja PPSU agar lebih dinamis dan responsif memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

Salah satu aspek strategis lain dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan kompeten. ASN yang memiliki kinerja tinggi dan profesionalisme yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik dan pelayanan yang berkualitas. Jumlah pegawai di Kota Administrasi Jakarta Selatan tercatat sebanyak 856 orang (data September 2025). Kondisi ASN di Kota Administrasi Jakarta Selatan didominasi kelompok usia di atas 50 tahun sebesar 254 orang dan usia 41-45 tahun menempati posisi kedua dengan jumlah 182 orang. Analisis jabatan kondisi eksisting pada 1 Januari 2025, menggambarkan bahwa 57 nama jabatan telah diisi ASN, 26 nama jabatan belum diisi, total kekosongan sebesar 51 ASN. Bila dijabarkan ke dalam kelas jabatan, kekosongan ASN kondisi eksisting sebagian besar tersebar pada kelas jabatan rentang 7-11, dimana kekosongan jumlah ASN terbesar ada di kelas jabatan 8. Status analisis ABK dengan periode data 1 Januari 2025, menggambarkan bahwa 7 nama jabatan belum diisi oleh ASN dan kekosongan nama jabatan ABK tersebar pada kelas jabatan 5-7, dengan total 49 orang. Manajemen talenta ASN mencakup proses rekrutmen yang selektif, pengembangan kompetensi, serta pengelolaan karier ASN yang berfokus pada pengembangan potensi dan kemampuan terbaik diperlukan agar pelayanan pemerintahan dinamis, adaptif, dan responsif

dalam memberi manfaat pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat Jakarta Selatan.

Ketua RT dan Ketua RW merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lingkungan. Ketua RT dan Ketua RW harus mampu membagi waktu dan konsentrasi antara kesibukan pribadi, penuntasan aduan warga, serta pelaksanaan berbagai pelayanan masyarakat secara efektif. Namun, hingga saat ini, analisis beban kerja Ketua RT dan Ketua RW belum dilakukan secara komprehensif dengan indikator kinerja yang jelas, cermat, dan terukur. Ketua RT dan Ketua RW juga tidak memiliki ruang pertemuan warga yang memadai, sehingga menyulitkan koordinasi dan efektivitas pelayanan kepada warga. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan tugas dan tanggung jawab Ketua RT dan Ketua RW dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai yang mendukung pemerintahan yang dinamis dan responsif, diperlukan untuk memperkuat kapasitas Ketua RT dan Ketua RW melalui pelatihan yang terarah, khususnya dalam bidang komunikasi, mediasi konflik, dan administrasi. Umumnya Ketua RT dan RW tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang pelayanan publik dan pemerintahan. Kurangnya pelatihan dapat menghambat efektivitas layanan dan pencapaian hasil pembangunan yang optimal. Profesionalisme Ketua RT dan RW perlu ditingkatkan untuk 5 tahun ke depan agar lebih profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya di lapangan sehingga manfaat hasil pembangunan kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas.

Gedung kantor Camat dan Lurah merupakan etalase utama pelayanan publik yang mencerminkan kualitas pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Saat ini, dari 38 gedung Kecamatan dan Kelurahan, sebagian besar belum memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 1 gedung kelurahan rusak sedang dan 51 unit gedung rusak ringan (8 gedung Kecamatan dan 43 gedung Kelurahan). Kondisi ruangan kerja yang sempit dan minimnya fasilitas penunjang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pegawai, yang berpotensi menurunkan motivasi, konsentrasi, dan produktivitas kerja pegawai. Selain itu, keterbatasan peralatan dan ruang koordinasi yang tidak memadai menghambat komunikasi internal dan efektivitas kerja antar pegawai. Kekurangan ketersediaan ruang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas, koordinasi, dan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Keluhan masyarakat terkait minimnya lahan parkir di gedung kantor Camat dan Lurah menambah tantangan dalam memberikan kualitas dan kepuasan pelayanan publik. Perbaikan dan pemenuhan standar fasilitas gedung, peningkatan

sarana kerja, serta peningkatan kapasitas ruang memadai diperlukan untuk mendukung koordinasi dan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas.

KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERBUKA

Kemiskinan dan pengangguran terbuka adalah salah satu indikator makro pembangunan kewilayahan bersama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi PDRB, total PDRB, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Tingkat kemiskinan di Jakarta Selatan mengalami fluktuasi dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 3,43% dan mengalami kenaikan menjadi 3,56% pada 2021, kemungkinan besar disebabkan dampak pandemi COVID-19. Setelah tahun 2021, terjadi tren penurunan konsisten hingga mencapai 3,03% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi lebih baik dan selaras dengan angka tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren menurun setelah pandemi. Bermula dari 10,79% pada 2020, tingkat pengangguran berhasil turun hingga di angka 5,22% pada 2024.

Tabel 2.24 Capaian Indikator Makro Kota Administrasi Jakarta Selatan

Indikator Makro Kewilayahan	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia [1]	85,40	85,58	85,87	86,71	87,57
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) [1]	-0,49	2,39	5,24	5,32	5,17
Kontribusi PDRB (%) [1]	23,10	22,95	22,75	22,84	22,92
Total PDRB (triliun rupiah) [1]	643,56	668,38	730,69	792,33	850,29
PDRB per kapita (ADHB, ribu rupiah) [1]	289.552	299.398	327.041	354.415	381.187
Prevalensi stunting [3]	N/A	15,7	11,9	16,6	14,9
Tingkat Kemiskinan (%) [1]	3,43	3,56	3,52	3,10	3,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) [1]	10,79	7,33	5,63	5,37	5,22
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [2]	N/A	51,09	51,11	51,73	51,15

Sumber:
[1] Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
[2] Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021–2024
[3] Survei Status Gizi Indonesia

Tabel 2.25 menginformasikan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dari tahun 2020 hingga 2024. Indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 0,47 pada tahun 2020 menjadi 0,27 pada tahun 2022. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan yang

konsisten dari 0,1 pada tahun 2020 menjadi 0,05 pada tahun 2024, meskipun sempat naik menjadi 0,26 pada tahun 2022.

Tabel 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Indikator Kemiskinan	Kondisi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kedalaman kemiskinan	0,47	0,62	0,79	0,37	0,27
Indeks keparahan kemiskinan	0,10	0,18	0,26	0,09	0,05

Sumber: https://jakselkota.bps.go.id/

Menurunnya jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mencerminkan perbaikan kinerja perekonomian daerah. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya tingkat pengangguran, yang menunjukkan efektivitas upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Untuk tetap mempertahankan dan memperkuat daya beli bagi masyarakat rentan dan miskin, Walikota perlu memperkuat koordinasi agar pemberian program bantuan sosial tepat sasaran serta kerjasama dengan instansi terkait untuk mendorong peningkatan kemudahan perizinan dan arus investasi modal dalam negeri dan modal asing.

KUALITAS MODAL MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan modal pembangunan utama mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang maju dan berdaya saing. Kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Administrasi Jakarta Selatan dari data BPS tahun 2020-2024 sudah menunjukkan kondisi yang lebih tinggi dari nilai IPM Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berusaha meningkatkan mutu, layanan, dan akses pendidikan untuk memfasilitasi warga negara atau anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik yang berprestasi ataupun yang terkendala ekonomi diantaranya berupa program Kartu Jakarta Pintar (KJP), berdasarkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2024, masih ditemukan sebesar 12,18% anak-anak belum menuntaskan pendidikan SMP/Mts/Sederajat dan sebesar 28,27% anak-anak belum menuntaskan pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat. Untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia di Kota Administrasi Jakarta Selatan, kualitas, mutu, dan pemerataan akses pendidikan merupakan elemen penting sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Beberapa tantangan sektor pendidikan tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara lain:

a) sarana prasarana dengan kondisi tidak memadai, berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan dengan rincian rusak berat 6 sekolah, rusak sedang 1 sekolah, rusak ringan 200 sekolah, sedangkan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan terdapat 6 sekolah rusak berat;
b) angka putus sekolah berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan 323 peserta didik, berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan 1.996 peserta didik;
c) rasio guru terhadap murid sekolah sampai tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dengan rincian rasio guru terhadap murid sekolah (a) tingkat SD sebesar 1:20 idealnya sebesar 1:35, (b) tingkat SMP sebesar 1:19 idealnya sebesar 1:28 (c) tingkat SMA sebesar 1:16 idealnya sebesar 1:28 (d) tingkat SMK sebesar 1:17 idealnya sebesar 1:28 dan (e) tingkat SLB sebesar 1:4 idealnya sebesar 1:6, sedangkan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 dengan rincian rasio guru terhadap murid sekolah (a) tingkat SD sebesar 1:18,32 idealnya sebesar 1:20 (b) tingkat SMP sebesar 1:17,53 idealnya sebesar 1:20, (c) tingkat SMA sebesar 1:15,62 idealnya sebesar 1:20, (d) tingkat SMK sebesar 1:16,06 idealnya sebesar 1:15, dan (e) tingkat SLB sebesar 1:4,63 idealnya sebesar 1:5;
d) guru belum memperoleh sertifikasi sampai tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan (a) tingkat PAUD sebesar 857, (b) tingkat SD sebesar 2.777, (c) tingkat SMP sebesar 1.828, (d) tingkat SMA sebesar 1.212, (e) tingkat SMK sebesar 1.230, dan (f) tingkat SLB sebesar 184, sedangkan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 dengan rincian (a) tingkat PAUD sebesar 2.012 (b) tingkat SD sebesar 2.516 (c) tingkat SMP sebesar 1330 (d) tingkat SMA sebesar 1.157 (e) tingkat SMK sebesar 918, dan (f) tingkat SLB sebesar 106;
e) ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk mendukung kebutuhan anak-anak disabilitas di sekolah sampai tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 sebesar 16 guru idealnya sebesar 213, sedangkan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 sebesar 6 guru idealnya sebesar 158;
f) masih belum terpenuhinya jumlah SLB Negeri (Sekolah Luar Biasa) sampai tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah

1 tersedia sebesar 15 sekolah tersebar di Kecamatan Jagakarsa, Pesanggrahan, Cilandak, dan Kebayoran Lama, sedangkan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 tersedia 1 sekolah di Kecamatan Tebet (SLBN 11);

g) daya tampung SMA sebanyak 3.888 peserta didik dan SMK sebesar 1.821 peserta didik berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1, sedangkan daya tampung SMA sebanyak 22.533 peserta didik dan SMK sebesar 3.107 peserta didik berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2;

h) penyebaran sekolah yang belum merata dan keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk lokasi sekolah. Berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 pada Kecamatan Pesanggrahan tidak terdapat SMK, sedangkan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 tidak terdapat SMK pada Kecamatan Mampang, Kecamatan Pancoran, dan Kecamatan Setiabudi, selain itu pada Kecamatan Tebet terdapat 1 SMK Negeri;

i) jumlah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja sesuai dengan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 yaitu sebesar 52,5%, umumnya tersebar di sektor usaha retail dan perhotelan. Tingkat penyerapan lulusan SMK yang rendah umumnya ditemukan pada keahlian bisnis dan manajemen. Hal ini disebabkan karena kurikulum jurusan bisnis dan manajemen yang perlu diperbaharui untuk menjawab kebutuhan pasar, sedangkan berdasarkan data Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, jumlah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja sebesar 3.450, umumnya tersebar di sektor usaha Pariwisata, Jasa, dan Pemasaran/Perdagangan Tingkat penyerapan lulusan SMK yang rendah umumnya ditemukan pada keahlian Akuntansi Keuangan dan Lembaga (AKL). Hal ini disebabkan karena (a) rendahnya penyerapan lulusan AKL di dunia kerja (b) persaingan ketat dengan lulusan perguruan tinggi (c) kebutuhan industri yang menuntut penguatan software akuntansi modern (d) keterbatasan kerjasama sekolah dengan industri, dan (e) memilih untuk langsung menempuh pendidikan tinggi.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta memperkuat upaya pencegahan dan promosi kesehatan melalui pendekatan berbasis keluarga menjadi unsur penting lain bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kota Jakarta Selatan masih menghadapi tantangan sektor kesehatan seperti:

a) angka stunting pada balita sampai tahun 2024 berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kota Administrasi Jakarta Selatan turun menjadi 14,9%. Angka ini merupakan penurunan dari tahun sebelumnya (2023) yang mencapai 16,6% berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI);

b) masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan, masih terdapat 5 (lima) kelurahan yang belum memiliki gedung Puskesmas mandiri (status kepemilikannya masih kontrak);

c) jumlah RSUD sampai tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan baru tersedia di 7 Kecamatan;

d) rasio tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga medis (Named) terhadap populasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan data existing tahun 2024 dengan asumsi penduduk jakarta selatan 2.360.000 jiwa maka rasio Named 1:239,81 (pembulatan 1 : 240) dan rasio nakes 1:132,51 (pembulatan 1:132);

e) belum optimalnya layanan kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya;

f) keterlibatan pria ber-KB di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 18.081 (85,8%) target yang seharusnya dicapai sebesar 20.981;

g) peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dikarenakan gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat, sampai dengan tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan ditemui kasus diabetes sebesar 73.241, hipertensi sebesar 117.956, penyakit jantung sebesar 2.729, kanker sebesar 668, dan stroke sebesar 2.074;

h) tingginya prevalensi obesitas, sampai dengan tahun 2024 berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa sekitar 62% Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengalami obesitas. Sedangkan, prevalensi obesitas, sampai dengan tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan ditemui sebesar 27.4%;

i) kasus penyakit menular sampai dengan tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu HIV/AIDS ditemukan penambahan 855 kasus HIV baru di Jakarta Selatan, Dari jumlah kasus baru tersebut, sebanyak 655 orang (sekitar 77%) telah mendapatkan pengobatan Antiretroviral (ARV) dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan;

j) kasus penyakit tuberkulosis berdasarkan data dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, pada tahun 2024, tercatat sebanyak 13.245 penderita tuberkulosis (TBC) telah ditangani. Angka ini menunjukkan bahwa TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan serius di Jakarta Selatan;

k) kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024 sebesar 9.840 kasus;

l) Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 3.899 (berdasarkan data kunjungan puskesmas tahun 2024).

PERWUJUDAN KOTA YANG LAYAK DAN BERKELANJUTAN

Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak

Kualitas air dan sanitasi yang buruk berpotensi menyebarkan penyakit menular seperti diare dan infeksi kulit. Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang sudah menyatakan bebas *Open Defecation Free* (ODF) sebanyak 12 kelurahan, yaitu Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Melawai, Kelurahan Pulo, Kelurahan Selong, Kelurahan Senayan, Kelurahan Pengadegan, Kelurahan Cikoko, Kelurahan Cilandak Timur, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Guntur, Kelurahan Karet Semanggi, dan Kelurahan Setiabudi. Pada 53 kelurahan masih ditemukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penggunaan fasilitas BAB di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut: sanitasi sendiri sebesar 90,77%; sanitasi bersama sebesar 8,42%; MCK umum sebesar 0,81% (Dinas Lingkungan Hidup, 2024).

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 98,01% (BPS, 2022). Adapun rencana penyediaan layanan air minum air dengan capaian 100% untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan terlaksana di tahun 2030. Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya sebesar 70,29%, dengan jumlah Sambungan Rumah (SR) di Jakarta Selatan sebesar 46.196 sambungan.

Permukiman Kumuh

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman, kondisi wilayah RW kumuh di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Terdapat 1 RW yang masuk dalam kategori kumuh berat, 14 RW kumuh sedang, 37 RW kumuh ringan, dan 38 RW kumuh sangat ringan. Data ini menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas permukiman di wilayah tersebut. Peningkatan kualitas permukiman dilakukan secara terintegrasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini penting untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman, meningkatkan kualitas hidup warga, dan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Infrastruktur Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Kebakaran

Risiko kebakaran di kawasan permukiman semakin meningkat akibat ketidakteraturan dalam penataan bangunan dan lingkungan sekitar. Faktor-faktor penyebab meliputi penggunaan bahan material bangunan yang tidak sesuai standar, jarak antar bangunan yang terlalu rapat, penataan kabel udara untuk jaringan listrik dan telekomunikasi yang tidak rapi, serta kurangnya penerapan prosedur keselamatan pada bangunan gedung. Kondisi ini memperbesar potensi terjadinya kebakaran dan memperumit upaya penanggulangannya. Selain itu, ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur pemadam kebakaran di area permukiman masih sangat terbatas. Beberapa kendala utama meliputi kualitas dan debit air yang rendah, akses menuju sumber air terbuka yang sulit, keterbatasan aksesibilitas jalan-jalan kecil, serta pemanfaatan bahu jalan yang tidak sesuai peruntukannya. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga masih minim, baik dari segi kesadaran maupun pengetahuan.

Kejadian kebakaran di wilayah perkotaan merupakan ancaman bencana non-alam yang signifikan bagi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023–2027, potensi bahaya kebakaran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan mencapai 13,22%, tingkat kerentanan sebesar 32,8%, kapasitas penanggulangan yang dimiliki mencapai 53,98%, tingkat risiko kebakaran sebesar 53,79%, dengan klasifikasi sedang.. Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat sudah terjadi 133 kasus kebakaran di Jakarta Selatan. Kecamatan Kebayoran Lama terjadi 41 kasus, Kecamatan Tebet terjadi 30 kasus, Kecamatan Jagakarsa 27 kasus, Kecamatan Pesanggrahan terjadi 19 kasus, Kecamatan Pasar Minggu 16 kasus.

Secara keseluruhan, potensi risiko kebakaran kebakaran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan diklasifikasikan dalam kategori sedang. Langkah-langkah yang harus diambil meliputi penguatan sistem pencegahan kebakaran, peningkatan infrastruktur dan sumber daya pemadam kebakaran, serta edukasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi. Pendekatan terpadu ini penting untuk menurunkan tingkat risiko kebakaran dan meningkatkan keselamatan serta ketahanan masyarakat di Jakarta Selatan.

KETIMPANGAN SOSIAL

Ketimpangan sosial di Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret dari Walikota sebagai Kepala Wilayah. Indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Data rasio gini dari BPS menunjukkan tren penurunan ketimpangan di Jakarta Selatan, dengan angka 0,427 pada tahun 2020, menurun menjadi 0,383 pada tahun 2021, dan 0,377 pada tahun 2022. Selain itu, meskipun wilayah Jakarta Selatan dikenal memiliki kawasan elite seperti Pondok Indah, Kemang, dan Cipete, kenyataannya masih terdapat permukiman padat dan kawasan kumuh di beberapa daerah seperti Pasar Minggu, Jagakarsa, dan Tebet. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan yang signifikan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, yang berdampak pada kesulitan akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, serta hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah-langkah untuk mengkoordinasikan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan perlu dilakukan antara Walikota bersama segenap unsur perangkat daerah terkait agar mewujudkan pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan sosial secara efektif, dan mencapai target sasaran rasio gini Provinsi DKI Jakarta di akhir tahun 2029 sebesar 0,417-0,421.

Tabel 2.26 Gini Rasio Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Tahun	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta
1	2020	0,427	0,399
2	2021	0,383	0,409
3	2022	0,377	0,423

Sumber : https://jakarta.bps.go.id

KEMACETAN LALU LINTAS

Seluruh daerah administratif Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari kawasan aglomerasi dengan karakteristik masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan jarak commuting harian yang relatif jauh. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, pergerakan penduduk di wilayah Jabodetabek mencapai 4,4 juta orang. Dari jumlah tersebut, pergerakan penduduk dari dalam Jakarta serta Provinsi Banten dan Jawa Barat menuju Jakarta (tidak termasuk Kepulauan Seribu) mencapai 2,6 juta orang, dengan 1,5 juta diantaranya berasal dari Jawa Barat dan Banten (PMO TKR). Proporsi penggunaan moda transportasi menunjukkan bahwa 79% komuter menggunakan kendaraan pribadi, sementara

hanya 19,5% yang memanfaatkan transportasi publik. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan mobilitas dan kemacetan, khususnya di Jakarta Selatan yang meskipun telah didukung oleh transportasi publik, masih mengalami tingkat kemacetan yang tinggi akibat mobilitas masyarakat yang mayoritas berdomisili di Jakarta Selatan dan sekitarnya, seperti Depok dan Tangerang Selatan.

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengidentifikasi 21 titik rawan kemacetan lalu lintas, antara lain di Jalan Ciledug Raya, Jalan Mampang Prapatan Raya, Jalan Lenteng Agung Raya, Jalan TB Simatupang, Jalan Ciputat Raya arah Kebayoran Lama, dan Jalan Rasuna Said. Kemacetan ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*/TOD) menjadi solusi strategis yang harus dikoordinasikan oleh Walikota bersama segenap unsur perangkat daerah Dinas/Sudin terkait. TOD seperti di Lebak Bulus, Manggarai, dan Blok M-ASEAN dapat menjadi simpul transit terintegrasi mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sehingga bermanfaat menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Implementasi kebijakan yang mendukung pengembangan TOD dan peningkatan transportasi publik terintegrasi antar moda harus menjadi prioritas dalam upaya mengatasi permasalahan mobilitas dan kemacetan di Jakarta Selatan.

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PERKOTAAN YANG BERSIH, NYAMAN, DAN BERKELANJUTAN

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Keberadaan RTH yang memadai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas udara di perkotaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, proporsi luas RTH di wilayah kota atau kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan, yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki RTH seluas 850,52 hektar (24,69%) masih belum memenuhi ketentuan RTH minimal 30%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dipublikasikan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, menunjukkan indeks kualitas lingkungan hidup Jakarta Selatan sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 44,42.
b. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 70,11 dengan kategori baik.
c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,15 dengan kategori sedang.
d. Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 26,25.

Kualitas Air Tanah

Berdasarkan laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah Provinsi DKI Jakarta yang dipublikasikan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, indeks pencemaran air tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan berada dalam kategori cemar sedang ditandai warna kuning ditemukan sebanyak 54% dari total 65 titik pemantauan, tersebar di wilayah seperti Tebet Barat, Guntur dan Karet. Kategori cemar berat ditandai warna merah sebanyak 12% mencakup wilayah seperti Menteng Dalam, Menteng, dan Bangka. Kategori cemar ringan ditandai warna hijau sebanyak 29% atau 14 titik mencakup wilayah seperti Bukit Duri, Manggarai, dan Kuningan Timur. Kategori baik ditandai biru muda sebanyak 5% atau 3 titik pemantauan yaitu Kebon Baru, Tebet Timur dan Cilandak Barat.

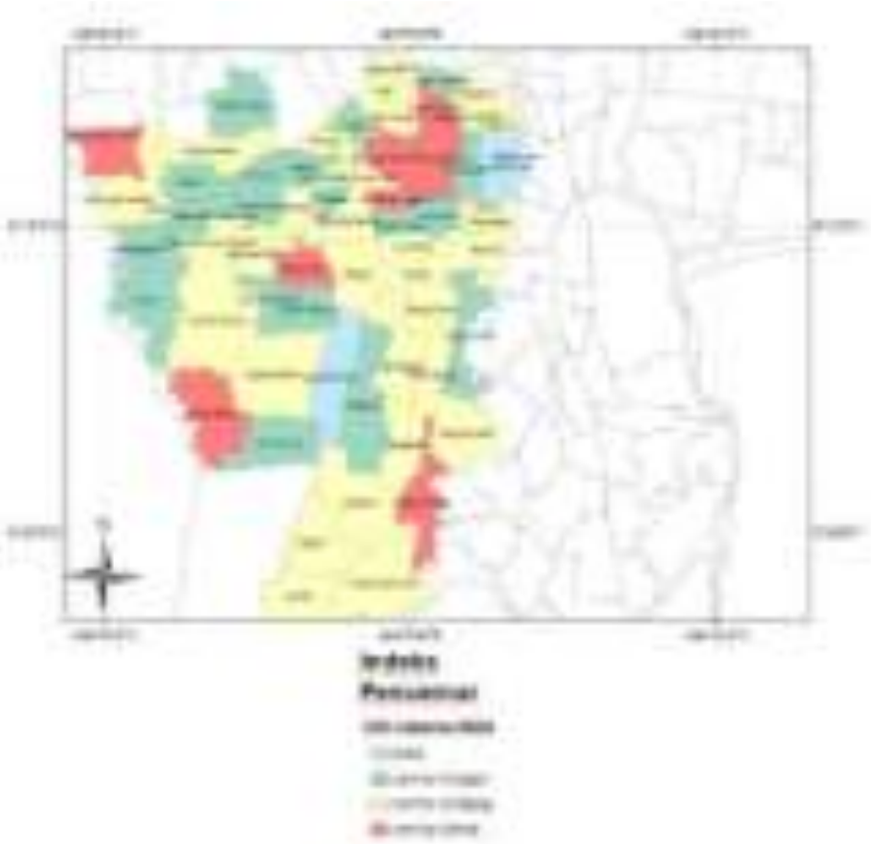

Gambar 2.18 Indeks Pencemaran Air Tanah Kota Jakarta Selatan Tahun 2024
Sumber: Pemantauan kualitas lingkungan air tanah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Pencemaran deterjen di air tanah adalah masalah lingkungan yang signifikan, terutama di daerah dengan penggunaan deterjen yang tinggi dan sistem pengolahan limbah yang tidak

memadai. Pencemaran deterjen di air tanah biasanya berasal dari limbah domestik dan industri. Pembuangan air limbah rumah tangga yang mengandung deterjen melalui saluran pembuangan atau *septic tank* yang bocor, serta limbah industri yang tidak diolah dengan baik, dapat menyebabkan masuknya deterjen ke dalam tanah dan akhirnya mencemari air tanah.

Pengelolaan Sampah

Timbulan sampah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024 sebesar 1.988,19 ton/hari. Komposisi sampah terdiri atas sisa makanan sebesar 49,87%, plastik sebesar 22,95%, kertas/karton sebesar 17,24%, kayu-ranting sebesar 3,18%, sisanya berupa logam, kain, karet-kulit, kaca, dan lainnya (https://sipsn.kemenlh.go.id, tahun 2024). Kinerja pengurangan sampah sebesar 28,01%. Kinerja penanganan sampah sebesar 71,96%.

PEMBANGUNAN KOTA BERKETAHANAN BENCANA ALAM DAN PERUBAHAN IKLIM

Berdasarkan Publikasi Data Bencana Indonesia BNPB tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Selatan mengalami 11 bencana sepanjang tahun tersebut. Dari jumlah terjadinya bencana pada tahun 2024, tercatat 3 korban meninggal dunia, 1 orang mengalami luka-luka, serta 4.486 jiwa terdampak dan harus mengungsi. Rincian kejadian bencana pada tahun 2024 yaitu kejadian banjir mencapai 8 kali, sedangkan cuaca ekstrem terjadi sebanyak 3 kali.

Hasil KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 mengungkapkan beberapa hal tentang risiko bencana di Kota Administrasi Jakarta Selatan:

a. Indeks risiko banjir: tahun 2020 kategori tinggi (skor 17,16), tahun 2021 kategori sedang (skor 11,29), dan tahun 2022 kategori tinggi (skor 14,02).
b. Luas risiko banjir: kategori rendah dengan ketinggian genangan < 0,76 m seluas 69 Ha, kategori sedang dengan ketinggian genangan 0,76-1,5 m seluas 4.057 Ha, dan kategori tinggi dengan ketinggian genangan > 1,5 m seluas 2.411 Ha.
c. Kelas kerentanan banjir termasuk kategori tinggi.
d. Kerentanan kategori umumnya sangat-sangat rendah terhadap bencana kekeringan.

Informasi dan data di atas menunjukkan tingginya kerentanan bencana alam Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berdampak signifikan pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, pelibatan aktif masyarakat dan meningkatkan ketahanan komunitas merupakan sebagian upaya mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana.

Perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi kelembapan, suhu udara, dan curah hujan, tetapi juga berdampak signifikan pada suhu permukaan, terutama di wilayah perkotaan yang didominasi oleh lahan terbangun. Di Jakarta Selatan, gedung-gedung dan infrastruktur perkotaan cenderung menyerap lebih banyak panas yang mengakibatkan peningkatan suhu di sekitarnya sehingga memicu fenomena *Urban Heat Island* (UHI). Berdasarkan analisis citra Landsat 8 periode 2018–2021, suhu permukaan di wilayah ini ini cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi. Peningkatan suhu tersebut disebabkan oleh minimnya vegetasi yang dapat memantulkan panas dan banyaknya permukaan bangunan yang menyerap panas. Fenomena *Urban Heat Island* (UHI) menjadi tantangan lingkungan yang serius di tengah perubahan iklim, dengan dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Jakarta Selatan. Pengaturan tata ruang dan pembangunan yang ramah lingkungan harus diperkuat untuk mengurangi penyerapan panas oleh bangunan dan infrastruktur. Pendekatan ini penting untuk menurunkan suhu permukaan, meningkatkan kenyamanan lingkungan, serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga di masa depan.

Tabel 2.27 Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	1. Rumah Dinas Camat, Rumah Dinas Lurah, gedung kantor Kecamatan, dan gedung kantor Kelurahan sudah memenuhi standar tahun 2024 sebanyak 51 gedung 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) tahun 2024 sebesar 96,8%	1. Terdapat 1 gedung kelurahan rusak sedang dan 51 unit gedung rusak ringan (8 gedung Kecamatan dan 43 gedung Kelurahan) 2. Kondisi ASN didominasi usia di atas 50 tahun sebesar 254 orang dan usia 41-45 tahun sebesar 182 orang 3. Sebanyak 26 nama jabatan masih ada kekosongan, total kekosongan sebesar 51 ASN 4. Sebanyak 7 nama jabatan analisis ABK masih ada kekosongan, total kekosongan 49 orang	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	1. Penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, efektif dan adaptif 2. Minim inovasi, kolaborasi, dan partisipasi publik. 3. Buruknya sistem pencegahan korupsi	Transformasi digital pemerintahan masih dihadapkan berbagai tantangan mendasar	Belum optimalnya pelayanan publik yang efisien dan efektif	Pemerintahan dinamis dan responsif untuk performa pelayanan publik prima
2	1. Peningkatan kapasitas ekonomi, melalui pelatihan keterampilan 2. Program kewirausahaan dalam memfasilitasi pendampingan dan kemudahan perizinan usaha bagi UMKM 3. Penyelenggaraan Bursa Kerja secara rutin untuk mempertemukan lulusan pelatihan dan pencari kerja lainnya dengan perusahaan-perusahaan	1. Tingkat kemiskinan di Jakarta Selatan sebesar 3,03% 2. Tingkat pengangguran sebesar 5,22% 3. Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,27 4. Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,05	Ketimpangan sosial ekonomi	Produktivitas, inovasi, dan daya saing tenaga kerja masih relatif tertinggal	1. Optimalisasi bonus demografi 2. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif tertinggal	Pertumbuhan ekonomi dan perkotaan belum inklusif mengatasi kemiskinan perkotaan dan penyerapan tenaga kerja	Kemiskinan dan pengangguran terbuka

No	Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
3	1. IPM Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022-2024 sudah dalam kondisi lebih baik dari Provinsi DKI Jakarta 2. Nilai APM dan nilai APK tahun 2021-2024 jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA menunjukkan tren positif	1. Tahun 2024 sebesar 12,18% belum menuntaskan SMP dan sebesar 28,27% belum menuntaskan SMA 2. angka stunting tahun 2024 yaitu 14,9% 3. 5 (lima) kelurahan belum memiliki gedung Puskesmas mandiri (masih kontrak) 4. RSUD tahun 2024 hanya tersedia di 7 kecamatan 5. masih tingginya kasus HIV/AIDS, tuberkulosis, dan ISPA 6. masih tingginya penyakit tidak menular akibat gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat	Pemerataan kesejahteraan masyarakat	Populasi dunia meningkat serta tingginya arus urbanisasi	Akses dan kualitas yang belum merata di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	-	Kualitas modal manusia
4	1. Rumah tangga dengan akses layanan air minum layak sebesar 98,01% 2. Kelurahan sudah menyatakan *Open Defecation Free* (ODF) sebanyak 12 3. Penggunaan sanitasi sendiri sebesar 90,77% dan sanitasi bersama sebesar 8,42%	1. Pada 53 kelurahan masih ditemukan BABS 2. Masih ditemukan permukiman kumuh dengan rincian kumuh berat 1 RW, kumuh sedang 14 RW, dan kumuh ringan 37 RW 3. Potensi bahaya kebakaran mencapai 13,22%, tingkat kerentanan sebesar 32,8%	Infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	1. Pembangunan infrastruktur dasar masih belum terpenuhi 2. RW permukiman kumuh yang belum tertangani 3. Rendahnya akses sanitasi aman, inklusif, dan berkelanjutan	1. Kualitas, kontinuitas, dan ketersediaan air bersih semakin berkurang 2. Tingginya permintaan perumahan (*backlog*) akibat urbanisasi dan pertambahan penduduk 3. *Housing career* belum optimal mengatasi defisit perumahan	Perwujudan kota yang layak dan berkelanjutan

No	Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
5	Mayoritas penduduk Jakarta Selatan bekerja sebagai di sektor swasta dan wiraswasta	1. rasio gini 0,427 tahun 2020; 0,383 tahun 2021, dan 0,377 tahun 2022 2. ketimpangan kawasan permukiman antara kawasan elite dan permukiman padat dan kawasan kumuh	Ketimpangan sosial ekonomi	Kesenjangan ekonomi antar negara dan peningkatan proteksi perdagangan	1. Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata 2. Akses yang tidak merata terhadap fasilitas Kesehatan 3. Sulitnya mengakses dukungan keuangan	1. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan perkotaan 2. Minimnya kesempatan kerja dan rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Ketimpangan sosial
6	1. Jakarta Selatan telah mengembangkan beberapa kawasan berorientasi transit seperti TOD seperti di Lebak Bulus, Manggarai, dan Blok M-ASEAN 2. Jakarta Selatan tersedia berbagai transportasi publik seperti LRT, MRT, TransJakarta, dll dengan cakupan wilayah yang cukup	1. Penggunaan moda transportasi kendaraan pribadi masih dominan 2. Terdapat 21 titik rawan kemacetan lalu lintas	Layanan transportasi umum dan sistem mobilitas terintegrasi	Tingginya urbanisasi dan perkembangan perkotaan yang semakin tidak terkendali	Konektivitas dan integrasi moda antar dan intra transportasi belum optimal untuk pergerakan manusia dan barang	1. Belum optimalnya kebijakan untuk menekan angka penggunaan kendaraan pribadi 2. Kemudahan pergerakan orang dan barang antar dan intra di Kawasan Aglomerasi Jabodetabek	Kemacetan lalu lintas
7	1. Kinerja penanganan sampah sebesar 71,96% 2. Jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara dan potensi resapan air kategori tinggi	1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan telah terlampaui 2. Nilai IKLH tahun 2024 sebesar 51,15 masih jauh dari kondisi ideal 3. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 44,42 4. Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 26,25 5. Indeks pencemaran air tanah kategori cemar sedang ditemukan sebanyak 54% dari total 65 titik	Kualitas lingkungan hidup masih rendah	Ancaman *triple planetary crisis*	1. Pencemaran lingkungan dan ekonomi hijau 2. Pengelolaan dan pengurangan sampah belum optimal 3. Urbanisasi antar kota yang terus berlangsung	1. Pengendalian pembangunan antara hulu-hilir belum terintegrasi 2. Tingginya potensi ancaman banjir 3. Pengelolaan sampah belum optimal	Penciptaan lingkungan perkotaan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan

No	Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		pemantauan, Kategori baik sebanyak 5% atau 3 titik pemantauan 6. Timbulan sampah sebesar 1.988,19 ton/hari 7. Kinerja pengurangan sampah sebesar 28,01% 8. Peningkatan kebutuhan lahan seiring bertambahnya jumlah penduduk					
8	Luas RTH saat ini sebesar 850,52 hektar (24,69%)	1. Indeks risiko bencana banjir di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 dalam kategori tinggi, skor 14,02 (KLHS RPJMD Prov DKI Jakarta 2025-2029) 2. Luas wilayah risiko banjir: kategori rendah 69 Ha, kategori sedang 4.057 Ha, dan kategori tinggi 2.411 Ha. 3. Kelas kerentanan banjir termasuk kategori tinggi 4. Peningkatan lahan terbangun memicu kenaikan suhu dan *Urban Heat Island (UHI)*	Tingginya risiko bencana alam dan perubahan iklim	Ancaman *triple planetary crisis*	Penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota (20% adalah RTH publik dan 10% adalah RTH privat)	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan	Pembangunan kota yang berketahanan bencana alam dan perubahan iklim

2.6 CAPAIAN KINERJA DAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA 2020-2024

Tujuan dan sasaran perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023-2026 dirumuskan dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran RPD tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tahun 2024 terjadi perubahan target Indikator Kinerja Utama (sasaran strategis) berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan ini sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari KemenPAN RB yang merekomendasikan target kinerja harus mempertimbangkan Realisasi Kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 2.28 Realisasi Capaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2020-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2020		2021		2022	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Selatan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	75	76,54	85	78,88	91	83,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,5	87,47	86	91,28	88,5	91,45

Sumber: LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020-2022

Tabel 2.27 menggambarkan kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2020–2022 untuk tujuan “terwujudnya pelayanan prima” dengan sasaran “meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.” Kinerja diukur melalui dua indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil capaian Indeks RB menunjukkan peningkatan kinerja yang semakin baik dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian IRB tahun 2020 sebesar 76,54 melampaui target 75; tahun 2021 naik ke 78,88 namun di bawah target yang ditetapkan 85; dan 2022 meningkat lagi menjadi 83,75 dan masih di bawah target 91. Total kenaikan IRB sekitar 7,21 poin dalam tiga tahun. Capaian IKM konsisten melampaui target di semua tahun, tahun 2020 mencapai 87,47 (target 84,5), tahun 2021 mencapai 91,28 (target 86), dan tahun 2022 mencapai 91,45 (target 88,5).

Tabel 2.29 Realisasi Capaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2023-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	2023		2024*)		2025	2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86,75	92,44	92,44	95,61	87,85	89,5
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Nilai	88,5	93,74	93,74	96,8	88,7	88,8
		2. Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85	91,15	91,15	94,42	87	88,5

*) Terjadi perubahan target Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sumber: LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2024

Berdasarkan LKIP perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2023-2024 seluruh sasaran tercapai. Beberapa pembelajaran atas pelaksanaan tujuan dan sasaran sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Perolehan indeks kepuasan layanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan diperlukan edukasi dan pendampingan untuk pengisian survey kepuasaan masyarakat sehingga kritik dan saran dari masyarakat dapat disampaikan dengan baik;
b. Terjadinya *delay time* untuk perolehan dan pengolahan data antar SKPD/UKPD terkait;
c. Diperlukan kegiatan bimbingan teknis agar menghasilkan akurasi data realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
d. Peningkatan konsistensi implementasi dari para pegawai untuk manajemen pengetahuan secara digital sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017;
e. Peningkatan implementasi penerapan manajemen risiko secara triwulanan dan tahunan;
f. Peningkatan akurasi input Kode Rekening dan Komponen dalam sistem e-MONEV.

Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain: (a) peningkatan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kinerja layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan

kelurahan; (b) peningkatan koordinasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan Dinas/UKPD terkait; dan (c) konsisten implementasi *good governance* untuk memberikan layanan publik dan dan pemerataan hasil pembangunan optimal.

Realisasi capaian target Program Kota Administrasi Jakarta Selatan periode tahun 2020-2024 pada Tabel 2.30 dan Tabel 2.31 bersumber dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan sistem https://sipjm19.bapedadki.net. Pada tahun 2023-2024 terdapat perubahan indikator kinerja dikarenakan oleh perubahan nomenklatur kegiatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perubahan nomenklatur ini memengaruhi sasaran dan kinerja kegiatan, yang berdampak juga pada perubahan indikator kinerja. Oleh karena itu, penting untuk secara berkala mengevaluasi dan menyesuaikan indikator kinerja agar tetap relevan dengan perubahan nomenklatur kegiatan. Perubahan indikator kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran capaian kinerja tetap akurat dan dapat memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan.

Selanjutnya, pada target Program Kota Administrasi Jakarta Selatan periode tahun 2020-2024, terdapat capaian target perjanjian kinerja tahun 2020-2024 yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang disajikan pada Tabel 2.32 dan Tabel 2.33.

Tabel 2.30 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2020-2022

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target Program			Realisasi Program		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
2	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	4 Indeks
3	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	82%	83%	85%	88%	85,38%	98,02%
		Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	82%	83%	85%	97,6%	99,96%	100%
4	Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan >80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	100%	100%	100%	43%	100%	100%
		Penyelesaian Sengketa Hukum	100%	100%	100%	27%	100%	100%
		Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	83%	84%	84%	85,46%	-	81,45%
		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan LKIP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi Pelaksanaan BOP dan BOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target Program			Realisasi Program		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
		Jumlah Kawasan yang Tertata	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	0 kawasan	0 kawasan	1 Kawasan
5	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
		Jumlah Kantor Camat/rumah dinas dan sarana perlengkapan yang memenuhi standar	17 gedung	19 gedung	20 gedung	1 gedung	18 gedung	20 gedung
		Jumlah Kantor Lurah/rumah dinas dan sarana perlengkapan yang memenuhi standar	113 gedung	121 gedung	130 gedung	5 gedung	76 gedung	90 gedung

Sumber: LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021-2022 dan https://sipjm19.bapedadki.net

Tabel 2.31 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023-2024

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target Program				Realisasi Program	
			2023	2024	2025	2026	2020	2024
1	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	15%	30%	45%	60%	82%	90%
5	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88,5 Nilai	92,57 Nilai	94,30 Nilai
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88,5 Nilai	91 Nilai	95,64 Nilai
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88,5 Nilai	89,88 Nilai	93,30 Nilai

Sumber: LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2024 dan https://sipjm19.bapedadki.net

Tabel 2.32 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persen	e-SAKIP			91	96,60	91	88,30
2	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi penciptaan layanan transportasi terintegrasi melalui Jak Lingko	Persen	e-Kinerja			100	100	100	100
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	Persen	e-Kinerja			100	100	100	100
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi meraih laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Persen	e-Kinerja			100	100	100	100
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Persen	e-Kinerja			100	100	100	100
		Opini laporan keuangan daerah	WTP	e-Kinerja			3	3	3	3
		Persentase PD/UKPD yang melaksanakan tutup buku secara tepat waktu sebagai pendukung penyusunan laporan realisasi anggaran	Persen	e-Kinerja	100	100				
		Persentase pemutakhiran data dan informasi asset sebagai tindak lanjut inventarisasi barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta	Persen	e-Kinerja	100	100				
4	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik	Persen	e-Monev KSD			100	100	100	100
5	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat	Persen	e-Monev KSD			100	100	100	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Persen	e-Monev KSD			100	100	100	100
		Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persen	e-Monev KSD			100	100		
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Persen	e-Monev KSD					100	100
		Jumlah pemutakhiran data strategis OPD pada portal data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	Data Set	e-Kinerja	26	26				
7	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan	Persen	e-Kinerja			100	100	100	100
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	Persen	e-Monev KSD			100	100	100	100
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko	Persen	e-Monev KSD					100	100
9	Meningkatnya Pemanfaatan E Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan EOrder	Persen	e-Kinerja			100	100	100	100
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persen	e-Kinerja			100	100	100	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Predikat	e-Kinerja			81 (A)	93,69 (AA)	91 (AA)	92,91 (AA)
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	e-Kinerja			100	100	100	100
13	Meningkatnya penyelesaian Pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan Masyarakat	Persen	CRM			100	100	100	100
14	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	e-Kinerja			93	94,95		
15	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	e-Kinerja	100	100	100	100	100	100
16	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	Persen	e-Monev KSD					100	100
17	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Persen	e-Kinerja					100	100
18	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persen	e-Kinerja					100	100

Sumber: LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020-2022 dan https://sipjm19.bapedadki.net

Tabel 2.33 Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Terimplementasinyarencana strategis komunikasi publik untuk program- program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategikomunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	100	100	100%	
2	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	3,25	4	123%	tahun 2023, dasar pengukuran kinerja berbeda dengan 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	e-Kinerja	92	95,52	104%	92	96,87	105%	Terjadi peningkatan nilai di tahun 2024
4	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	100	100	100%	
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	e-Kinerja	80	95,19	119%	80	96,85	121%	Terjadi peningkatan nilai di tahun 2024
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persen	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	100	100	100%	Indikator kinerja baru di 2024 sehingga tidak ada pembandingdi 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
7	Meningkatnya manajemen pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	100	100	100%	
8	Implementasi penerapan manajemen risiko	Persentase implementasi penerapan manajemen risiko	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	100	100	100%	
9	Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	Persen	e-Kinerja	71	96,94	137%	71	90,03	127%	Terjadi penurunan nilai di tahun 2024, namun capaian masihdi atas target sehingga disimpulkankinerja tahun 2024 baik
10	Terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	Persen	e-Kinerja	100	100	100%	100	100	100%	
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	CRM	100	99,95	100%	100	100	100%	Di tahun 2024 terjadi peningkatan capaian
12	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	e-Kinerja	75	100	133%	100	100	100%	

Sumber: LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2024 dan https://sipjm19.bapedadki.net

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tujuan Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang akan dicapai untuk menjawab visi, misi, dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir tahun 2029. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai sebagai penjabaran lebih spesifik dan terukur dari sebuah tujuan Renstra yang ditetapkan. Sasaran Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggambarkan hasil pembangunan perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ingin dihasilkan disusun secara spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan terikat waktu tertentu (*time-bound*).

Tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 dilaksanakan sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2029 sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029., yaitu: (a) Misi nomor 3: *Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal*; (b) Tujuan (Kode 3.1): Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern; dan (c) Sasaran (Kode 3.1.4): Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat. Tabel 3.1 menunjukkan *cascading* dari tingkat provinsi hingga menjadi tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029.

Tujuan Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Selatan"

Sasaran Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal;

2. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.

Pada Tabel 3.1 diuraikan indikator dan target tahunan untuk setiap sasaran Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029. Ada 3 (tiga) indikator Renstra yaitu sebagai berikut: (a) nilai kepuasan layanan kota administrasi; (b) nilai efektivitas koordinasi kota administrasi; dan (c) nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan. Target setiap tahun adalah 4.

3.2 STRATEGI RENSTRA TAHUN 2025-2029

Strategi renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 adalah penahapan prioritas pembangunan tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditentukan. Pada Tabel 3.4 dijabarkan strategi renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 bersumber dari indikator kinerja program untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama yang ditetapkan. Kemudian, pada Tabel 3.2 disajikan penahapan strategi renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 setiap tahun.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					Ket.
				2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 3 Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal **Tujuan 3.1** Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern **Sasaran 3.1.4** Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Selatan		Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	4	4	4	4	4	
		1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal	Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	4	4	4	4	4	
		2. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	4	4	4	4	4	

Tabel 3.2 Penahapan strategi Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. 2. Membangun sistem koordinasi terpadu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan forum musyawarah kelurahan yang inklusif dan transparan. 4. Meningkatkan kualitas dan kepatuhan SOP bagi seluruh aparatur di tingkat wilayah Kota Administrasi guna meningkatkan kepuasan dan responsivitas masyarakat. 5. Optimalisasi kolaborasi dan pengembangan inovasi antar UKPD dan pemangku kepentingan di wilayah Kota Administrasi.	1. Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan respon cepat. 2. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintahan di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. 3. Melaksanakan evaluasi rutin program-program yang berjalan di tingkat kota serta setiap kecamatan dan kelurahan untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintahan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga. 4. Kemitraan dengan sektor swasta, NGO, dan lainnya untuk pemberdayaan masyarakat, mengatasi kemiskinan dan kelaparan, dan meningkatkan kualitas modal manusia. 5. Mengembangkan layanan pemerintahan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok difabel, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya.	1. Memperkuat peran forum kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai wadah aspirasi dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan. 2. Peningkatan kualitas pemanfaatan alokasi anggaran daerah dengan pendekatan berbasis kinerja dan manfaat yang lebih jelas dan terukur untuk pemerataan manfaat dan dampak pembangunan. 3. Peningkatan kualitas koordinasi pemberdayaan kewirausahaan, penyerapan dan pembukaan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan perkotaan, kualitas kesehatan masyarakat, dan akses pendidikan yang merata. 4. Pengembangan program inovasi sosial berbasis komunitas guna memotivasi partisipasi aktif dan membangun budaya positif masyarakat. 5. Mengoptimalkan peran media lokal dan komunitas dalam menyebarkan informasi pembangunan dan keberhasilan program, sehingga membangun narasi positif dan kepercayaan publik.	1. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. 2. Memperkuat ketahanan sosial, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum dalam pembangunan kota. 3. Membangun kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. 4. Meningkatkan kuantitas, kualitas, keterjangkauan, serta kenyamanan infrastruktur untuk wilayah kota. 5. Koordinasi untuk peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, pertumbuhan ekonomi kota yang inklusif, dan pengurangan kemiskinan perkotaan.	1. Meningkatkan koordinasi pembangunan lintas SKPD dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan Jakarta Kota Global. 2. Mengembangkan inovasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang merata. 3. Penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya menghadapi pemilihan umum. 4. Peningkatan koordinasi pembangunan infrastruktur kota yang ramah lingkungan. 5. Peningkatan pelatihan kewirausahaan digital serta dukungan akses pembiayaan atau keuangan digital yang aman.

3.3 ARAHAN KEBIJAKAN KEWILAYAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Penyusunan arah kebijakan kewilayahan dalam Renstra Kota Administrasi Jangka Selatan 2025–2029 didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang merepresentasikan kepentingan pembangunan jangka menengah dan panjang, seperti Arah Pembangunan Kewilayahan Jakarta yang termuat dalam RPJMN 2025-2029, Kawasan Strategis termuat dalam RTRW DKI Jakarta 2024-2044, dan Koridor Prioritas Pembangunan yang termuat dalam Kajian Kota Global Jakarta Rise #20. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Jakarta Selatan menjadi landasan agar sinergis dalam satu kesatuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta serta memastikan pertumbuhan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor 7 tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044 mengamanatkan untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berkeadilan, Berketahanan, serta Berbasis Transit dan Digital. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi pembangunan yaitu (a) meningkatkan produktivitas kota melalui perwujudan ruang dan pelayanan kota yang adaptif dan inklusif dan (b) mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Beberapa arahan kebijakan RTRW bagi Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah:

1. **Pusat Pelayanan Kota**, yaitu (a) Manggarai di Kecamatan Tebet, (b) Tebet di Kecamatan Tebet, (c) Blok M-CSW di Kecamatan Kebayoran Baru, dan (d) Lebak Bulus di Kecamatan Kebayoran Lama. Sistem pusat pelayanan dioptimalkan pembangunannya sebagai kawasan berorientasi transit dengan densitas dan intensitas lebih tinggi untuk menunjang pemusatan tempat tinggal dan aktivitas penduduk yang terintegrasi dengan sarana prasarana dan utilitas yang memadai.
2. **Sub Pusat Pelayanan Kota**, yaitu (a) Kebayoran Lama di Kecamatan Kebayoran Lama, (b) Tanjung Barat di Kecamatan Jagakarsa, (c) Setiabudi di Kecamatan Setiabudi, dan (d) Fatmawati di Kecamatan Cilandak.
3. **Pusat Pelayanan Lingkungan**, yaitu (a) Bendungan Hilir di Kecamatan Setiabudi, (b) Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu, dan (c) Pesanggrahan di Kecamatan Pesanggrahan.
4. **Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi** yaitu kawasan Segitiga Emas dan Blok-M. Kawasan Segitiga Emas sebagai kawasan bisnis terpadu berskala nasional, regional, dan global. Kawasan Blok-M adalah sebagai ibukota diplomatik *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang dikembangkan dengan konsep Kawasan Berorientasi Transit.
5. **Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya** adalah kawasan Kebayoran Baru, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, dan Tebet. Kawasan

Kebayoran Baru adalah pemugaran bangunan bersejarah dan pengembangan budaya perkotaan. Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan adalah sebagai pusat kebudayaan Betawi. Kawasan Tebet adalah kawasan wisata urban berupa kawasan berbasis kuliner fusion, distro, olahraga, dan kesenian.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang sesuai tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Fasilitasi dan koordinasi implementasi RTRW di wilayahnya agar setiap orang atau badan menaati RTRW dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Fasilitasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi RTRW di wilayahnya seperti rencana tata ruang, jenis kegiatan pemanfaatan ruang, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan yang diharapkan atas implementasi RTRW.
3. Penagihan kewajiban kontribusi dalam bentuk pembangunan sarana prasarana umum yang akan menjadi atau diperhitungkan sebagai tambahan aset daerah yang sah.
4. Menindaklanjuti aduan atau masukan masyarakat atas pelanggaran atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah terkait atau Inspektur pembangunan.
5. Pembinaan kepada kecamatan dan kelurahan dalam pemanfaatan dan pengawasan pelanggaran pemanfaatan ruang

Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik unik sebagai pusat bisnis, permukiman elit, serta ruang hijau yang cukup luas dibandingkan wilayah lainnya. Jakarta Selatan sebagai pusat bisnis terdiri dari beberapa kawasan seperti Mega Kuningan, Gatot Subroto, dan TB Simatupang yang menjadi lokasi perkantoran. Selain itu, wilayah ini juga memiliki banyak pusat perbelanjaan dan hiburan seperti Blok M, Kemang, dan Pondok Indah, yang menjadi destinasi bagi masyarakat untuk berbagai aktivitas komersial dan rekreasi.

Kota Administrasi Jakarta Selatan juga memiliki beberapa Kawasan Potensial yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) seperti Lebak Bulus dan Manggarai yang terhubung dengan jaringan Angkutan Umum Massal dengan Kapasitas Layanan dan frekuensi yang tinggi serta dapat menjadi titik simpul transit antar moda yang melayani warga Jakarta dan area sekitarnya.

Gambar 3.1 menggambarkan kawasan strategis yang tersebar di wilayah administratif Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kawasan pertumbuhan ekonomi terdiri atas Segitiga Emas, Blok-M, dan TB Simatupang. Kawasan sosial budaya terdiri atas Kebayoran Baru. Tebet, dan perkampungan Setu Babakan.

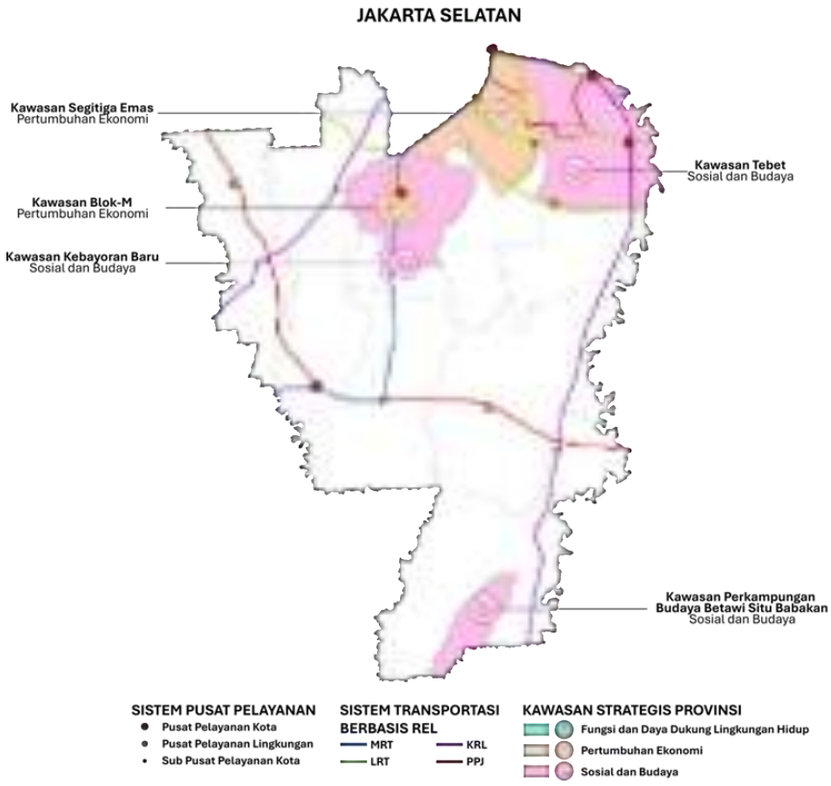

Gambar 3.1 Peta pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Kawasan Blok M sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi direncanakan akan menjadi dikembangkan menjadi ibukota diplomatik *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) berorientasi transit. Pengembangan Kawasan Blok M mencakup aspek bisnis dan investasi serta sistem logistik berskala global dengan peningkatan fasilitas penunjang kesekretariatan ASEAN. Ditambah lagi, Kawasan Blok-M Cakra Selaras Wahana (CSW) dikembangkan sebagai salah salah satu titik simpul transit Jakarta. Koridor Blok M CSW – Senopati – Wolter Monginsidi – Kemang – Cipete dan Kawasan Kebayoran Baru aktif dan berkembang pesat, mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan wisata urban. Pariwisata perkotaan berbasis budaya dan sejarah dengan keunggulan wisata kuliner, perbelanjaan, dan hiburan dapat ditingkatkan untuk mendorong Kota Jakarta Selatan sebagai pelopor ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta.

Kawasan Blok M dikembangkan sebagai pusat gaya hidup perkotaan dengan memperkuat kawasan M-*Bloc Space*, mengoptimalkan konektivitas transportasi publik seperti MRT,

TransJakarta, dan bus kota lainnya, serta menghidupkan ruang publik melalui penyelenggaraan festival, konser, dan pasar malam. Pendekatan wisata berbasis komunitas atau berbasis pengalaman (*experience-based travel*), penyelenggaraan tur tematik, dan penguatan ekonomi kreatif lokal mendukung terbentuknya destinasi kota yang hidup sekaligus membuka peluang partisipasi masyarakat secara lebih luas.

Potensi lain di wilayah Jakarta Selatan adalah Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi di Jakarta Selatan. Kawasan ini tidak hanya menjadi tempat wisata tetapi juga pusat edukasi budaya dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal. Daya tarik utama Setu Babakan adalah keasliannya dalam mempertahankan tradisi dan adat istiadat Betawi. Kawasan ini dihuni oleh masyarakat yang masih menjalankan gaya hidup khas Betawi, mulai dari arsitektur rumah, pola kehidupan sosial, hingga berbagai seni dan budaya seperti tari-tarian, musik Gambang Kromong, Lenong, dan Silat Betawi. Pengunjung dapat merasakan pengalaman autentik dengan menyaksikan berbagai pertunjukan budaya yang rutin diadakan di tempat ini.

Setu Babakan juga memiliki potensi besar dalam bidang wisata alam. Danau Situ Babakan memberikan daya tarik tambahan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana asri di tengah kota. Selain itu, kuliner khas Betawi juga dijual oleh penduduk setempat, seperti kerak telor, soto Betawi, dan dodol Betawi. Keberadaan UMKM yang menjual berbagai produk budaya dan kuliner memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, adanya aktivitas kebudayaan bagi wisatawan menjadikan Setu Babakan sebagai tempat edukasi yang strategis untuk memperkenalkan budaya Betawi kepada khalayak umum.

Arah kebijakan kewilayahan Kota Administrasi Jangka Selatan 2025–2029 didasarkan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 adalah *Jakarta Selatan sebagai Sentra ASEAN, pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta destinasi wisata urban*. Tabel 3.3 memuat target indikator strategis kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dari kondisi awal 2024 hingga kondisi akhir tahun 2030.

Tabel 3.3 Target Indikator Makro Kewilayahan 2025-2029

No	Indikator	Kondisi awal (2024)	Kondisi akhir (2030)
1	Kontribusi PDRB (%)	22,92	22,22
2	Tingkat Kemiskinan (%)	3,03	0,78-2,96
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,22	4,79
4	Prevalensi stunting	14,9	11,34

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Gambar 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Berdasarkan analisis LQ SS, sektor 'Informasi dan Komunikasi' (J) Jakarta Selatan termasuk sebagai sektor unggulan yang paling kuat. Jakarta Selatan juga unggul dalam sektor 'Jasa Keuangan dan Asuransi' (K) dan 'Jasa Perusahaan' (M,N) serta sektor 'Jasa Lainnya' (R, S,T,U) yang mengindikasikan kuatnya sektor bisnis di wilayah Jakarta Selatan. Dilihat dari posisinya dalam grafik kuadran, Sektor 'Konstruksi' (F) dan 'Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor' (G) sebagai sektor berkembang memiliki potensi untuk ditingkatkan agar menjadi sektor unggulan karena signifikansi LQ yang mendekati 1. Artinya, kedua sektor tersebut dapat menjadi sektor basis untuk Jakarta Selatan.

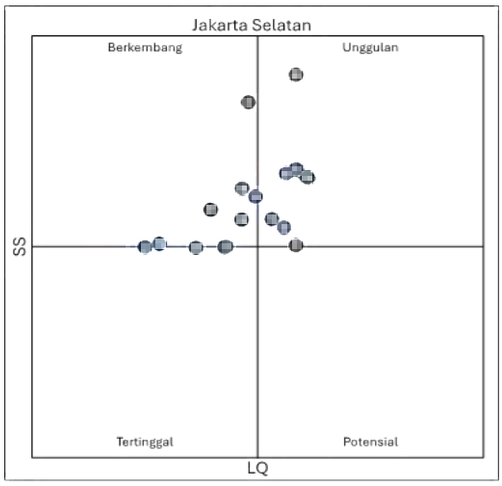

A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	Tertinggal
B	Petambangan dan penggalian	-
C	Industri Pengolahan	Berkembang
D	Pengadaan listrik dan gas	Tertinggal
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	Berkembang
F	Konstruksi	Berkembang
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Berkembang
H	Transportasi dan pergudangan	Berkembang
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Berkembang
J	Informasi dan komunikasi	Unggulan
K	Jasa keuangan dan asuransi	Unggulan
L	Real Estat	Unggulan
M,N	Jasa Perusahaan	Unggulan
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	Unggulan
P	Jasa Pendidikan	Berkembang
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan	Unggulan
R,S,T,U	Jasa lainnya	Unggulan

Gambar 3.3 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 3 (tiga) kawasan ekonomi dan bisnis, yaitu:

a. Kawasan Sudirman *Central Business District* (SCBD)

   SCBD merupakan salah satu kawasan bisnis terbesar di Jakarta yang berlokasi di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. SCBD terletak di lokasi yang strategis karena dekat dengan beberapa kawasan penting lain seperti Thamrin, Senayan, hingga Kuningan, serta dilayani oleh transportasi umum seperti BRT Transjakarta dan MRT (Mass Rapid Transit).

b. Kawasan Mega Kuningan

   Kawasan Mega Kuningan berlokasi di Kecamatan Setiabudi, dikembangkan sebagai sebuah kawasan bisnis dan diplomatik terintegrasi yang dilengkapi infrastruktur dan jaringan utilitas berstandar internasional. Kawasan ini dilayani berbagai moda transportasi, seperti BRT Transjakarta dan LRT.

c. Koridor TB Simatupang

   Koridor TB Simatupang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat kawasan bisnis terintegrasi (*mixed-use development*) dengan tetap mempertahankan jalur hijau. Salah satu keunggulan dari koridor TB Simatupang adalah didukung dengan konektivitas yang sangat baik, dimana kawasan ini terhubung dengan sejumlah jalur transportasi penting, termasuk jalan tol *Jakarta Outer Ring Road* (JORR), serta terintegrasi dengan Kawasan TOD (Fatmawati dan Lebak Bulus). Selain itu juga terdapat rencana pembangunan moda transportasi MRT koridor Fatmawati - Kampung Rambutan.

Dalam rangka mencapai target perencanaan jangka menengah daerah, serta mendorong pembangunan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan tetap mempertimbangkan isu strategis wilayah, direkomendasikan beberapa kebijakan strategis pembangunan kewilayahan untuk periode tahun 2025-2029 namun tidak terbatas pada hal-hal sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan Isu Strategis Kewilayahan

Isu Strategis Kewilayahan	Kebijakan Strategis Kewilayahan
Hubungan eksternal dan internasional yang sinergis	a) Perwujudan Jakarta sebagai Ibukota Negara ASEAN pada Kawasan Blok-M
	b) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kesekretariatan ASEAN pada Kawasan Blok-M
	c) Peningkatan konektivitas dan permeabilitas kawasan melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki pada Kawasan Segitiga Emas
	d) Penyediaan jalur pejalan kaki yang lebar dan nyaman pada Kawasan Segitiga Emas
	e) Pembentukan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan pada Kawasan Segitiga Emas
Pusat keuangan dan bisnis yang produktif	a) Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung kawasan perkantoran dan perdagangan & jasa untuk seluruh golongan usaha
	b) Peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global pada Kawasan Blok-M
	c) Peningkatan kapasitas tampung kawasan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa dan campuran pada Kawasan Segitiga Emas
	d) Penyediaan ruang untuk golongan usaha skala kecil, dan sektor informal pada Kawasan Segitiga Emas
	e) Peningkatan kemampuan pelayanan, manajemen, sistem jaringan komunikasi, sarana dan prasarana dalam memanfaatkan peluang ekonomi global serta kemampuan dan kepekaan mengenal iklim investasi yang terjadi pada tingkat nasional dan internasional pada Kawasan Segitiga Emas
	f) Peningkatan kualitas investasi dan iklim bisnis
	g) Diversifikasi sektor ekonomi kreatif, digital, dan *green economy*
Kota cerdas berorientasi digital dan berbasis data	Penyediaan kelengkapan infrastruktur digital dan pusat aktivitas digital skala kota (*tech commerce*) pada Kawasan Segitiga Emas
Pusat pelayanan logistik dan pergerakan barang yang terpadu	Pengembangan Sistem Logistik kota yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan Sistem Logistik regional/internasional pada Kawasan Blok-M
Destinasi wisata sejarah dan urban yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kreatif	a) Pengembangan kawasan dilakukan dengan prinsip keselarasan dengan lingkungan sekitar dan tidak mengganggu fungsi sebagai kawasan pemugaran pada Kawasan Kebayoran Baru
	b) Pengemasan koridor Blok M CSW - Senopati - Wolter Monginsidi - Kemang - Cipete sebagai koridor pengembangan pariwisata budaya perkotaan dengan mengedepankan wisata kuliner, belanja, dan hiburan pada Kawasan Kebayoran Baru
	c) Pengembangan kegiatan pariwisata berbasis pelestarian budaya Betawi yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
	d) Penyediaan ruang publik yang inklusif bagi masyarakat lokal dan wisatawan pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Isu Strategis Kewilayahan	Kebijakan Strategis Kewilayahan
	e) pelestarian budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
	f) pengembangan kawasan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat setempat dalam aspek sosial dan ekonomi pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
	g) Pengembangan kawasan wisata urban berupa kawasan berbasis kuliner, distro, olahraga, dan kesenian pada Kawasan Tebet
Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	a) Penyediaan RTH pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
	b) Pengembangan kawasan dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai daerah resapan air pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
	c) Pengembangan RTH dan ruang publik untuk mendukung aktivitas rekreasi, olahraga dan kesenian pada Kawasan Tebet
	d) Penyediaan ruang untuk ruang hijau dan ruang publik pada Kawasan Segitiga Emas
	e) Penyediaan IHBI kawasan setara dengan 30% (tiga puluh persen) RTH dari total luas kawasan pada Kawasan Segitiga Emas
Integrasi dan konektivitas kawasan strategis	a) Peningkatan aksesibilitas kawasan dengan penataan jalur pejalan kaki dan pedagang kaki lima pada Kawasan Tebet
	b) Penyediaan lahan dan penataan parkir kendaraan bermotor pada Kawasan Tebet
	c) Penataan jalur pejalan kaki serta elemen pendukungnya dari bangunan *park and ride* menuju stasiun MRT Lebak Bulus
	d) Penataan titik transit yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan dan transportasi umum (perpindahan antar moda)

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2026

Adapun *placemaking* Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut:

1. Blok M sebagai *Pop Culture and Youth*

Blok M dikenal sebagai pusat gaya hidup urban dengan adanya M-Bloc dan Blok M Hub yang merupakan ruang ekspresi generasi muda. Selain itu, Blok M juga menjadi salah satu pusat interkoneksi antar moda dan ruang publik yang nyaman dengan aksesibilitas bagi pejalan kaki, sehingga menjadikan Blok M lebih inklusif dan modern. Pengembangan Blok M diarahkan sebagai pusat aktivitas kreatif dan ekonomi berbasis komunitas, yang mampu merangkul pelaku seni, UMKM, dan industri kreatif lokal. Blok M diharapkan tidak hanya menjadi destinasi hiburan, tetapi juga pusat ekonomi kreatif yang berkelanjutan, sekaligus menjadi wajah kota yang merepresentasikan nilai kolaborasi, inovasi, dan keberagaman budaya.

2. Santa sebagai Pasar Transformatif

Pasar Santa dikenal sebagai salah satu tempat kumpul favorit generasi muda di Provinsi DKI Jakarta. Usaha yang berkembang di Pasar Santa tidak hanya terbatas pada kuliner, tetapi juga mencakup berbagai sektor ekonomi kreatif seperti fesyen, musik, dan desain. Pasar Santa merupakan contoh transformasi pasar tradisional yang berhasil beradaptasi menjadi ruang kolaboratif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Dengan konsep curated market, Pasar Santa menghadirkan pengalaman berbelanja tematik, sehingga mampu menarik segmen pasar yang lebih luas, khususnya generasi muda urban. Ke depan, pengembangan Pasar Santa juga sejalan dengan pengemasan koridor Blok M–CSW–Senopati–Wolter Monginsidi–Kemang–Cipete sebagai koridor pariwisata budaya perkotaan.

3. Ragunan sebagai Rimba Menyejukkan

Taman Margasatwa Ragunan (TMR) berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang mudah diakses semua lapisan masyarakat. TMR juga telah menjadi salah satu destinasi favorit di Provinsi DKI Jakarta sebagai sarana pendidikan dan rekreasi yang bersifat pendidikan lingkungan, flora, dan fauna. Dalam rangka memperkuat fungsi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan secara bertahap. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, memperbaiki kesejahteraan satwa melalui perbaikan kandang dan habitat, serta membuat fasilitas edukatif yang lebih interaktif dan modern. Revitalisasi juga mencakup pengembangan zona agro eduwisata sebagai wahana pembelajaran dan ekosistem alam secara menyeluruh. Upaya ini diharapkan menjadikan TMR sebagai kebun binatang berstandar internasional yang mendukung konservasi, edukasi, rekreasi berkelanjutan, serta memperkuat daya tarik Provinsi DKI Jakarta sebagai Kota Global yang ramah lingkungan dan inklusif.

Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 97,55% pada tahun 2025 dan 98,26% pada tahun 2030. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk mencapai dan memperkuat Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang kini telah berada di level tinggi. Berdasarkan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fokus utama untuk mencapai target tersebut adalah penguatan ekosistem UMKM secara masif, serta perluasan akses bagi individu. Dari sisi ketersediaan, jangkauan layanan juga akan diperkuat di wilayah yang masih membutuhkan. Keseluruhan langkah strategis ini dirancang untuk memperdalam inklusi keuangan, menutup celah yang tersisa, dan memastikan seluruh lapisan masyarakat di Jakarta Selatan mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang maju dan komprehensif.

Walikota bersama unsur terkait di lingkungan perangkat daerah Kota Administrasi Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara terpadu. Upaya ini selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan memantapkan posisi Jakarta sebagai pusat industri halal dan keuangan syariah terkemuka. Strategi utama difokuskan pada penguatan sektor riil melalui industri halal, dengan memprioritaskan sektor unggulan seperti industri makanan dan minuman, *fashion* muslim, dan pariwisata ramah muslim. Kunci dari penguatan ini adalah pemberdayaan UMKM melalui percepatan sertifikasi halal dan digitalisasi untuk memperluas akses pasar. Kinerja pilar ini akan didukung oleh sektor keuangan syariah yang kokoh, di mana pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan syariah.

Selain itu, optimalisasi dana sosial syariah (ZISWAF) akan diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, yang keberhasilannya dipantau melalui Indeks Zakat Nasional. Keberhasilan seluruh pilar strategis ini akan ditopang oleh fondasi kebijakan yang kuat, mencakup peningkatan literasi keuangan syariah, akselerasi digitalisasi, serta sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, BUMD, pelaku industri, dan swasta. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan terwujud pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Administrasi Administrasi Jakarta Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.4 KEBIJAKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah rangkaian kerja operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi untuk mencapai target tujuan dan sasaran renstra. Arah kebijakan renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 disajikan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
1	Pengordinasian dan pelaksanaan pelayanan publik Kota Administrasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan, serta pelayanan masyarakat di Kelurahan	Pemanfaatan teknologi untuk layanan publik dan manajemen kota	1. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur berorientasi pada kebutuhan pelayanan publik secara sistematis dan berkesinambungan. 2. Pengembangan mekanisme pengaduan dan pelaksanaan tindak lanjut secara cepat, tepat, serta akuntabel demi menjamin responsivitas pelayanan pemerintah yang optimal. 3. Peningkatan kepatuhan terhadap

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
			implementasi standar pelayanan sesuai dengan SOP pada setiap jenis pelayanan publik guna menjamin kualitas dan konsistensi pelayanan kepada masyarakat. 4. Peningkatan efektivitas koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas sektor guna menciptakan sinergi serta efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintahan. 5. Pengembangan budaya kerja yang mengedepankan profesionalisme, inovasi, serta fokus pada kepuasan masyarakat di seluruh lingkungan Kota Administrasi.
2	Peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum pada wilayah kota administrasi	Infrastruktur dasar, Hunian terjangkau, Perbaikan kualitas air dan udara, Ruang terbuka hijau, Ketahanan terhadap bencana	1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor guna mempercepat, memperluas, dan mempermudah akses pelayanan infrastruktur air minum dan sanitasi demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan aman bagi masyarakat. 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama akses hunian terjangkau dan permukiman layak. 3. Peningkatan koordinasi untuk program penghijauan dan RTH untuk memperbaiki kualitas udara kota, tempat rekreasi, olahraga, interaksi sosial, dan fasilitas transit. 4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan dimulai dari pemilahan dan pengolahan sampah dengan optimalisasi nilai ekonomi sampah.
3	Pengoordinasian penanggulangan bencana pada wilayah kota administrasi	Pemanfaatan teknologi untuk layanan publik dan manajemen kota	Penguatan ketahanan wilayah Kota Administrasi serta peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan bencana non alam, bencana alam, serta perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi yang efektif, dengan tujuan mengurangi resiko korban jiwa dan kerugian materi.
4	Peningkatan koordinasi untuk mendorong mobilitas dan aktivitas masyarakat perkotaan berbasis transit dan mengenalkan transportasi publik ramah lingkungan pada wilayah kota administrasi	Kemudahan mobilitas, Koneksi internet yang cepat, Branding kota	Peningkatan koordinasi lintas sektor secara sinergis untuk mengoptimalkan layanan transportasi umum dan mewujudkan sistem mobilitas terintegrasi yang efektif.
5	Pengoordinasian pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi data fakir miskin dan	Sistem perlindungan sosial tepat sasaran, Pengentasan kemiskinan berbasis wilayah, Inklusivitas ekonomi,	1. Peningkatan koordinasi dalam pemberian layanan perlindungan dan jaminan sosial yang akurat dan tepat sasaran, guna memastikan akses yang

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
	orang tidak mampu pada wilayah kota administrasi	Kemudahan investasi dan membuka usaha, Tenaga kerja berdaya saing	adil dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat. 2. Optimalisasi koordinasi pemutakhiran berkala data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dan akurat. 3. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna mencapai pengurangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas hidup masyarakat berpendapatan rendah.
6	Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan dan kesehatan di wilayah Kota Administrasi	Layanan pendidikan dasar dan menengah, Layanan kesehatan primer, Pemenuhan gizi	1. Peningkatan koordinasi serta pengawasan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) agar tepat sasaran dan efektif dalam mencapai pendidikan yang merata dan pendidikan untuk semua. 2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan promosi pola hidup sehat dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, sebagai upaya strategis untuk mewujudkan kota sehat yang berkelanjutan.

3.5 POHON KINERJA RENSTRA TAHUN 2025-2029

Pohon kinerja renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 disusun selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja disusun atas 4 (empat) tahapan yaitu (a) tahap pertama dengan menetapkan hasil (outcome); (b) tahap kedua dengan mengidentifikasi *critical success factor* hasil (outcome); (c) tahap ketiga dengan menguraikan *critical success factor*; dan (d) tahap keempat dengan melengkapi indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, dan sasaran dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dengan memenuhi kriteria SMART: spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan terikat waktu tertentu (*time-bound*).

Tabel 3.6 Rumusan Tujuan Renstra Berdasarkan Isu Strategis

Mandat (Dasar Hukum)	(Muatan Teknokratis) Isu Strategis Perangkat Daerah	(*ULTIMATE OUTCOME*) Tujuan Renstra
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit	1. Pemerintahan dinamis dan responsif untuk performa pelayanan publik prima 2. Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mandat (Dasar Hukum)	(Muatan Teknokratis) Isu Strategis Perangkat Daerah	(*ULTIMATE OUTCOME*) Tujuan Renstra
Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/bupati, Camat dan Lurah Dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan 3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja.	3. Kualitas modal manusia 4. Perwujudan kota yang layak dan berkelanjutan 5. Ketimpangan sosial 6. Kemacetan lalu lintas 7. Penciptaan lingkungan perkotaan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan 8. Pembangunan kota yang berketahanan bencana alam dan perubahan iklim	

Tabel 3.7 Rumusan Sasaran Renstra Berdasarkan CSF Tujuan Renstra

(*ULTIMATE OUTCOME*) Tujuan Renstra	Kondisi yang Diharapkan di Akhir Renstra	(*CRITICAL SUCCESS FACTOR*) Strategi Renstra	(*INTERMEDIATE OUTCOME*) Sasaran Renstra
Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pelayanan publik yang prima untuk layanan pemerintah Kota, koordinasi pemerintahan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan di kelurahan dan kecamatan INDIKATOR: Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	1. Konsistensi memberikan pelayanan prima terhadap layanan kota, efektifitas koordinasi, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan. 2. Peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. 3. Peningkatan kualitas Aparatur Pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efisien, efektif, dan bersih dari korupsi. 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan, antara lain RT, RW, LMK, PKK, Jumantik dan kader posyandu. 5. Peningkatan koordinasi antar unit kerja dan	1. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat 2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal

(*ULTIMATE OUTCOME*) Tujuan Renstra	Kondisi yang Diharapkan di Akhir Renstra	(*CRITICAL SUCCESS FACTOR*) Strategi Renstra	(*INTERMEDIATE OUTCOME*) Sasaran Renstra
		pemangku kepentingan terkait. 6. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk terwujudnya pelayanan masyarakat yang optimal. 7. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan warga. 8. Pengembangan inovasi dan kolaborasi lintas sektor bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.	

Tabel 3.8 Rumusan Program Perangkat Daerah Berdasarkan CSF Sasaran Renstra

(*Intermediate Outcome*) Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	(*Critical Success Factor*) Strategi Renstra	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung pada Perangkat Daerah lain
1. Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal	Pelayanan publik yang prima untuk layanan pemerintah Kota, koordinasi pemerintahan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan di kelurahan dan kecamatan INDIKATOR: Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	1. Konsistensi memberikan pelayanan prima terhadap layanan kota, efektifitas koordinasi, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan. 2. Peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. 3. Peningkatan kualitas Aparatur Pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efisien, efektif, dan bersih dari korupsi. 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan, antara lain RT, RW, LMK, PKK, Jumantik dan kader posyandu. 5. Peningkatan koordinasi antar unit kerja dan pemangku kepentingan terkait. 6. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk terwujudnya pelayanan masyarakat yang optimal. 7. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan warga.	1. Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 6. Program Penyelenggaraan Kota Administrasi	Isu strategis perangkat daerah 1: *Pemerintahan Dinamis dan Responsif untuk performa pelayanan publik yang prima* 1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Isu strategis perangkat daerah 2: *Kemiskinan dan pengangguran terbuka* 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2. Program Pemberdayaan Sosial Isu strategis perangkat daerah 3: *Kualitas modal manusia* 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Isu strategis perangkat daerah 4: *Perwujudan kota yang layak dan berkelanjutan* 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

(*INTERMEDIATE OUTCOME*) Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	(*CRITICAL SUCCESS FACTOR*) Strategi Renstra	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung pada Perangkat Daerah lain
		8. Pengembangan inovasi dan kolaborasi lintas sektor bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.		3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Pengembangan Perumahan Isu strategis perangkat daerah 5: *Ketimpangan sosial* 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Isu strategis perangkat daerah 6: *Kemacetan lalu lintas* 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Penyelenggaraan Jalan Isu strategis perangkat daerah 7: *Penciptaan lingkungan perkotaan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan* 1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Isu strategis perangkat daerah 8: *Pembangunan kota berketahanan bencana alam dan perubahan iklim* 1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 2. Program Penanggulangan Bencana 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara urusan, bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran dari program RPJMD berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan disusun dari hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berserta pemutakhirannya yang tertuang pada Kepmendagri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1 KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Kegiatan dan Sub Kegiatan renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029, terdiri atas:

1. **Bidang Urusan Kecamatan Administrasi, terdiri atas:**
   a. Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, terdiri atas sub kegiatan:
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan;
      2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
      3) Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK;
      4) Pelaksanaan Bina Mental Spiritual;
      5) Penanganan Bencana;
      6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya;
      7) Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu;
      8) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan.
   b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri atas sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah, terdiri atas sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan.
d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri atas sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
e. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri atas sub kegiatan:
    1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
    2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
f. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

2. Bidang Urusan Kota Administrasi, terdiri atas:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
    1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
    1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
    1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
    2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
    1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
    6) Penyediaan Bahan/Material;
    7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
   1) Pengadaan Mebel;
   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
   4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (; dan
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas sub kegiatan:
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   2) Pemeliharaan Mebel;
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
   6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

i. Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi, terdiri atas sub kegiatan:
   1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi;
   2) Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi;
   3) Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi;
   4) Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi;
   5) Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi;

6) Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi;
7) Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi;
8) Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi;
9) Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi;
10) Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi;
11) Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi;
12) Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI);
13) Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi;
14) Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi;
15) Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi;
16) Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi;
17) Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi;
18) Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi;
19) Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi;
20) Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi;
21) Pelaksanaan Character Building Pegawai Kota Administrasi;
22) Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi;
23) Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi;
24) Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi;
25) Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi;
26) Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi;

27) Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi;
28) Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi;
29) Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi;
30) Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi;
31) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi; dan
32) Pelaksanaan Bina Mental Spiritual Kota Administrasi.

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Renstra 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
Kode Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 - Nomor 3: *Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal* Kode Tujuan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 - Nomor 3.1: *Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern* Kode Sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 - Nomor 3.1.4: Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Selatan				Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi		
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal			Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi		
			Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		**1. Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam kondisi baik** **2. Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	
					Nilai Kepuasan terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
					Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi		**1. Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan** **2. Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan** **3. Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat**	**Program Pengelolaan Kota Administrasi**	
					Persentase capaian kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di atas 80%	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	
					Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	
					Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	
					Jumlah Pegawai Kota Administrasi yang Mengikuti *Character Building* yang Dilaksanakan	Pelaksanaan *Character Building* Pegawai Kota Administrasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/ Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/ Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spiritual Kota Administrasi	Pelaksanaan Bina Mental Spiritual Kota Administrasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
		Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan		
			Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal		**Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)**	**Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan**	
					Persentase Penyelesaian Layanan oleh RT, RW, LMK dan FKDM di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	
					Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat yang Disediakan	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	
					Jumlah RT, RW, dan/atau LMK yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah pelaksanaan penanganan bencana	Penanganan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal		**Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PPSU**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	
					Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Persentase Penyelesaian Masalah dalam Lingkup Pekerjaan PPSU yang Terselesaikan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	
			Terwujudnya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		**Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	
					Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat	
					Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Terwujudnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang optimal		Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	
					Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	

Sumber: rpjmd25.bappedadki.net

4.2 PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program-program di Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak secara langsung mendukung program prioritas kepala daerah, seperti *Quick Wins*, 10 Program Kerja, DKI *Strategic Project* (DSP), maupun *Global City Program* (GCP). Namun, program-program di Kota Administrasi Jakarta Selatan mendukung secara langsung pada peningkatan Indeks Pelayanan Publik yang mana termasuk pada indikator RPJMD pada sasaran *Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat* dalam **Misi 3** yakni *Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal* dan di **Tujuan 3** *Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern*. Selain itu, terdapat 2 sub kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mendukung program Gubernur-Wakil Gubernur, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendukung Program Konstruksi dan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan pada DKI *Strategic Project* (DSP);
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang mendukung Program Konstruksi dan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan pada DKI *Strategic Project* (DSP).

4.3 PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

Dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Walikota tidak hanya berfungsi sebagai Kepala Perangkat Daerah akan tetapi juga berperan sebagai koordinator wilayah yang memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan wilayah di tingkat kota. Walikota bertindak sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas dan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksana teknis sektoral di wilayah kerjanya. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh perangkat kota dalam menyelesaikan berbagai permasalahan melalui perbaikan kualitas layanan publik dan peningkatan aksesibilitas dan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan rangkaian program prioritas perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Walikota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perangkat daerah unit pembantu gubernur. Adapun penyusunan program prioritas dalam bab ini disajikan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan di tingkat kecamatan dan

kelurahan, sebagai salah satu ujung tombak penyelenggaraan layanan publik di tingkat paling dasar. Program ini disusun untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat ditingkat kecamatan dan kelurahan. Melalui program ini, pemerintah daerah mendorong terwujudnya wilayah yang mandiri, aman, tertib dan berdaya saing.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Sehingga dalam rangka memperkuat kualitas, akses, dan kenyamanan pelayanan kepada warga, pemerintah kota dan kabupaten administratif melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata seperti:

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan
b. Pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat
c. Penguatan kelembagaan Kelurahan melalui pengelolaan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
d. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
e. Pelaksanaan bina mental spiritual
f. Penanganan bencana alam
g. Pemberdayaan masyarakat
h. Penyelenggaraan posko bersama pemilu
i. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan olahraga.

Keberhasilan implementasi program ini diukur melalui indikator Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan, yang mencakup aspek penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM. Indikator tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan.

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan berbasis komunitas. Program ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang berdaya, inklusif, dan berkelanjutan melalui optimalisasi peran kelembagaan masyarakat di tingkat lingkungan.

Pelaksanaan program ini mencakup dua kegiatan. Pertama, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, kegiatan ini bertujuan mendorong keterlibatan langsung warga dalam berbagai aktivitas sosial, seperti pengelolaan lingkungan, peningkatan kesejahteraan keluarga, hingga penguatan nilai-nilai kebersamaan. Salah satu bentuk nyatanya tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat terhadap layanan seperti PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), yang menjadi simpul interaksi sosial sekaligus wadah pemberdayaan. Kedua, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Keberhasilan dari pelaksanaan program ini diukur melalui Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan-layanan pemberdayaan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat ikatan sosial di tingkat lokal. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi landasan evaluatif sekaligus arah penguatan berkelanjutan terhadap kualitas layanan dan efektivitas program di masa mendatang.

C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program yang dirancang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Program ini berfungsi sebagai fondasi administratif, teknis, dan operasional yang memungkinkan terselenggaranya pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pelaksanaan program ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan hasil pembangunan yang optimal mencakup kegiatan koordinasi pada bidang pemerintahan, kegiatan koordinasi pada bidang perekonomian, serta kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Walikota juga memiliki tanggung jawab terhadap kualitas infrastruktur perkantoran, termasuk kantor Walikota, Kecamatan, dan Kelurahan beserta fasilitas pendukungnya, sebagai wajah utama pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya Jakarta sebagai Kota Global. Dengan adanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, diharapkan tercipta sinergi antar sektor, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.2 Program Prioritas, Outcome, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra
Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket.
1.	Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan	Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan ● Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan ● Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat ● Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK ● Pelaksanaan Bina Mental Spiritual ● Penanganan Bencana ● Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya ● Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu ● Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat	
			b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan ● Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan ● Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ● Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ● Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ● Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ● Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ● Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ● Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai ● Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			e. Administrasi Umum Perangkat Daerah ● Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ● Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ● Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ● Penyediaan Bahan Logistik Kantor ● Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ● Penyediaan Bahan/Material	

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket.
			● Fasilitasi Kunjungan Tamu ● Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ● Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ● Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ● Pengadaan Mebel ● Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ● Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ● Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ● Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ● Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ● Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ● Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ● Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ● Pemeliharaan Mebel ● Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ● Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ● Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ● Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: rpjmd25.bappedadki.net

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pendanaan Renstra 2025-2029

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi		**4**	**1.269.990.850.342**	**4**	**1.311.146.619.526**	**4**	**1.352.302.388.711**	**4**	**1.393.458.157.895**	**4**	**1.434.613.927.079**	
Kota Administrasi	Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	4	4	443.389.175.699	4	451.276.530.738	4	459.163.885.781	4	467.051.240.825	4	474.938.595.867	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam kondisi baik	90	91	437.622.626.168	93	445.419.774.057	94	453.277.195.402	95	461.113.679.431	95	468.933.104.073	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	79.926.630	4	79.926.630	4	79.926.630	4	79.926.630	4	79.926.630	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	27.319.985	2	27.319.985	2	27.319.985	2	27.319.985	2	27.319.985	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	52.606.645	4	52.606.645	4	52.606.645	4	52.606.645	4	52.606.645	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	4	304.806.693.577	4	303.327.391.745	4	293.875.649.170	4	296.077.424.622	4	308.283.592.919	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.232	975	304.595.034.808	1.232	303.105.150.038	1.232	293.642.295.378	1.232	295.832.403.140	1.232	308.026.320.362	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	299	304	211.658.769	304	222.241.707	304	233.353.792	304	245.021.482	304	257.272.557	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	4	644.880.985	4	677.125.034	4	710.981.286	4	746.530.350	4	783.856.867	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6	6	34.576.196	6	36.305.006	6	38.120.256	6	40.026.269	6	42.027.582	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	11	11	610.304.789	11	640.820.028	11	672.861.030	11	706.504.081	11	741.829.285	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4	28.486.776.674	4	29.914.106.168	4	31.409.811.477	4	32.980.302.050	4	34.629.317.155	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63	67	1.807.982.315	67	1.898.381.430	67	1.993.300.502	67	2.092.965.527	67	2.197.613.804	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	95	93	4.412.878.072	93	4.633.521.976	93	4.865.198.074	93	5.108.457.978	93	5.363.880.877	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	82	81	1.725.195.905	81	1.811.455.700	81	1.902.028.485	81	1.997.129.910	81	2.096.986.405	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	121	118	4.288.818.051	118	4.503.258.953	118	4.728.421.901	118	4.964.842.996	118	5.213.085.146	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	74	76	1.210.244.550	76	1.270.756.778	76	1.334.294.616	76	1.401.009.347	76	1.471.059.815	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	76	76	9.097.403.317	76	9.552.273.482	76	10.029.887.157	76	10.531.381.514	76	11.057.950.590	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300	304	4.300.937.214	304	4.515.984.075	304	4.741.783.278	304	4.978.872.442	304	5.227.816.064	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288	280	1.383.317.250	280	1.452.483.112	280	1.525.107.268	280	1.601.362.631	280	1.681.430.763	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	2	260.000.000	2	273.000.000	2	286.650.000	2	300.982.500	2	316.031.625	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	4	2.990.662	4	3.140.196	4	3.297.205	4	3.462.066	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	24.509.837.868	4	29.686.164.039	4	42.792.071.177	4	44.016.674.736	4	35.002.508.472	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38	41	4.033.066.300	41	4.234.719.615	41	4.446.455.596	41	4.668.778.376	41	4.902.217.295	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	559	429	10.083.081.160	429	10.587.235.218	429	11.116.596.979	429	11.672.426.828	429	12.256.048.169	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	2.294.807.322	3	6.360.381.966	2	18.300.000.000	2	18.300.000.000	1	8.000.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	6	160.191.523	6	168.201.099	6	176.611.154	6	185.441.712	6	194.713.797	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	24.509.837.868	4	29.686.164.039	4	42.792.071.177	4	44.016.674.736	4	35.002.508.472	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	114	116	7.938.691.563	116	8.335.626.141	116	8.752.407.448	116	9.190.027.820	116	9.649.529.211	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	44.578.946.195	4	46.182.218.004	4	47.862.275.104	4	49.623.075.535	4	51.468.784.510	
Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	912	912	17.315.408.092	912	17.488.562.173	912	17.663.447.795	912	17.840.082.273	912	18.018.483.095	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	304	304	4.949.930.382	304	5.197.426.901	304	5.457.298.246	304	5.730.163.158	304	6.016.671.316	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	132	132	22.313.607.721	132	23.496.228.930	132	24.741.529.063	132	26.052.830.104	132	27.433.630.099	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	34.515.564.239	4	35.552.842.437	4	36.546.480.558	4	37.589.745.508	4	38.685.117.520	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	636	634	8.179.719.220	634	8.588.705.181	634	9.018.140.440	634	9.469.047.462	634	9.942.499.835	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33	0	0	15	92.749.986	15	94.633.485	15	96.556.080	15	98.518.622	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.214	1.201	2.039.020.072	1.201	2.140.971.075	1.201	2.248.019.629	1.201	2.360.420.611	1.201	2.478.441.641	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	84	82	15.625.000.000	82	15.625.000.000	82	15.625.000.000	82	15.625.000.000	82	15.625.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	143	162	7.000.441.115	162	7.350.463.171	162	7.717.986.329	162	8.103.885.646	162	8.509.079.928	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1.134	1.427	1.671.383.832	1.427	1.754.953.024	1.427	1.842.700.675	1.427	1.934.835.709	1.427	2.031.577.494	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Persentase capaian kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di atas 80%	100	100	5.766.549.531	100	5.856.756.681	100	5.886.690.379	100	5.937.561.394	100	6.005.491.794	
	Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		
Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase capaian kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di atas 80%	100	100	5.766.549.531	100	5.856.756.681	100	5.886.690.379	100	5.937.561.394	100	6.005.491.794	
	Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya	0	1.671	118.715.000	1.336	96.940.000	1.554	111.110.000	1.369	99.085.000	1.284	93.560.000	
Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	4	4	165.657.500	4	165.657.500	4	165.657.500	4	165.657.500	4	165.657.500	
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	4	4	91.300.000	4	91.300.000	4	91.300.000	4	91.300.000	4	91.300.000	
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	4	7	126.320.000	7	132.300.000	7	138.150.000	7	143.675.000	7	149.200.000	
Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	0	1	17.850.000	1	18.500.000	1	19.150.000	1	19.800.000	1	20.450.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	4	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	4	4	899.171.762	4	945.320.522	4	965.534.686	4	958.657.701	4	988.136.101	
Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	4	4	770.256.000	4	809.256.000	4	828.756.000	4	871.056.000	4	922.356.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	2	2	7.800.000	2	9.750.000	2	9.750.000	2	9.750.000	2	9.750.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	2	2	14.300.000	2	14.300.000	2	14.300.000	2	14.300.000	2	28.600.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	2	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	
Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	1	1	120.738.000	1	130.738.000	1	130.738.000	1	130.738.000	1	130.738.000	
Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	2	2	69.575.879	2	69.575.879	2	69.575.879	2	69.575.879	2	69.575.879	
Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	4	4	146.250.000	4	146.250.000	4	146.250.000	4	146.250.000	4	146.250.000	
Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	0	1	29.250.000	1	29.250.000	1	29.250.000	1	29.250.000	1	29.250.000	
Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	2	2	5.461.660	2	5.461.660	2	5.461.660	2	5.461.660	2	5.461.660	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	4	4	7.680.228	4	15.200.228	4	15.200.228	4	15.200.228	4	15.200.228	
Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	2	2	13.252.466	2	7.852.466	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	
Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	2	2	5.460.114	2	15.400.114	2	15.400.114	2	15.400.114	2	15.400.114	
Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	4	4	7.200.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	
Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	12	12	898.855.000	12	898.855.000	12	898.855.000	12	898.855.000	12	898.855.000	
Pelaksanaan *Character Building* Pegawai Kota Administrasi	Jumlah Pegawai Kota Administrasi yang Mengikuti Character Building yang Dilaksanakan	0	0	0	120	175.000.000	120	175.000.000	120	175.000.000	120	175.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	0	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	
Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	4	4	91.000.000	4	91.000.000	4	91.000.000	4	91.000.000	4	91.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Koordinasi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	4	4	655.370.000	4	470.520.000	4	470.520.000	4	470.520.000	4	470.520.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	4	4	289.440.000	4	289.440.000	4	289.440.000	4	289.440.000	4	289.440.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	4	4	293.150.000	4	286.000.000	4	286.000.000	4	286.000.000	4	286.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	4	4	207.450.000	4	207.450.000	4	207.450.000	4	207.450.000	4	207.450.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	4	4	137.475.000	4	130.975.000	4	124.475.000	4	117.975.000	4	111.475.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	2	2	28.906.266	2	28.906.266	2	30.856.266	2	34.106.266	2	37.356.266	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/ Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/ Camat/Lurah pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	2	2	21.450.000	2	21.450.000	2	21.450.000	2	21.450.000	2	21.450.000	
Pelaksanaan Bina Mental Spiritual Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spiritual Kota Administrasi	0	4	504.114.656	4	496.008.046	4	471.460.046	4	496.008.046	4	471.460.046	
Kecamatan Administrasi	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	4	4	826.601.674.643	4	859.870.088.785	4	893.138.502.926	4	926.406.917.067	4	959.675.331.211	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	4	4	320.556.545.467	4	327.454.414.953	4	332.977.137.933	4	337.052.956.258	4	339.606.364.832	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelesaian Layanan oleh RT, RW, LMK dan FKDM di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	70	320.556.545.467	70	327.454.414.953	70	332.977.137.933	70	337.052.956.258	70	339.606.364.832	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	4.515	5.340	1.213.906.382	5.340	1.274.601.701	5.340	1.338.331.786	5.340	1.405.248.375	5.340	1.475.510.794	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat yang Disediakan	900	900	11.776.963.000	900	12.365.811.150	900	12.984.101.707	900	13.633.306.793	900	14.314.972.133	
Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	Jumlah RT, RW, dan/atau LMK yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan	7.202	7.130	304.474.358.446	7.130	310.547.318.582	7.130	315.225.726.743	7.130	311.581.642.949	7.130	320.037.565.994	
Pelaksanaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spiritual	293	300	2.126.675.853	300	2.233.009.645	300	2.344.660.128	300	2.461.893.134	300	2.584.987.791	
Penanganan Bencana	Jumlah pelaksanaan penanganan bencana	60	65	964.641.786	65	1.012.873.875	65	1.063.517.569	65	1.116.693.447	65	1.172.528.120	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	0	0	0	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	
Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	0	0	0	0	0	0	0	75	6.833.371.560	0	0	
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	0	0	0	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	372.147.838.522	4	391.823.518.645	4	412.539.602.047	4	434.351.109.716	4	457.315.972.731	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4	4	1.113.023.311	4	1.168.674.477	4	1.227.108.200	4	1.288.463.610	4	1.352.886.791	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	75	75	1.113.023.311	75	1.168.674.477	75	1.227.108.200	75	1.288.463.610	75	1.352.886.791	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah	Persentase Penyelesaian Masalah dalam Lingkup Pekerjaan PPSU yang Terselesaikan	0	70	371.034.815.211	70	390.654.844.168	70	411.312.493.847	70	433.062.646.106	70	455.963.085.940	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	780	780	371.034.815.211	780	390.654.844.168	780	411.312.493.847	780	433.062.646.106	780	455.963.085.940	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	4	4	129.636.391.160	4	136.118.210.718	4	142.924.121.254	4	150.070.327.316	4	157.573.843.682	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4	4	97.933.123.885	4	102.829.780.079	4	107.971.269.083	4	113.369.832.537	4	119.038.324.164	
Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	8.092	8.092	97.933.123.885	8.092	102.829.780.079	8.092	107.971.269.083	8.092	113.369.832.537	8.092	119.038.324.164	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4	4	31.703.267.275	4	33.288.430.639	4	34.952.852.171	4	36.700.494.779	4	38.535.519.518	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	75	75	31.436.330.419	75	33.288.430.639	75	34.952.852.171	75	36.700.494.779	75	38.535.519.518	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	593	429	266.936.856	429	280.283.699	429	294.297.884	429	309.012.778	429	324.463.416	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	4.260.899.494	4	4.473.944.469	4	4.697.641.692	4	4.932.523.777	4	5.179.149.966	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	0	70	4.260.899.494	70	4.473.944.469	70	4.697.641.692	70	4.932.523.777	70	5.179.149.966	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	300	300	4.260.899.494	300	4.473.944.469	300	4.697.641.692	300	4.932.523.777	300	5.179.149.966	

Sumber: rpjmd25.bappedadki.net

4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Tujuan utama penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Perangkat Daerah (PD) adalah untuk memastikan bahwa setiap unit kerja pemerintah bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. IKU dicapai dengan dukungan pencapaian indikator kinerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan kondisi aktual saat ini serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja di masa mendatang.

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dituangkan dalam bentuk (IKU) masing-masing perangkat daerah. Sementara itu, pencapaian proses dan keluaran ditentukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator kinerja menjadi komponen penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan rencana kinerja harus selaras dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun rincian target capaian IKU dan IKK Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk periode 2025-2029 disajikan dalam Tabel 4.4 dan 4.5.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Renstra 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
Indeks Reformasi Birokrasi								
Indeks Pelayanan Publik								
1	Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	4	4	4	4	4	4
2	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Kegiatan Layanan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	4	4	4	4	4	4
3	Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	4	4	4	4	4	4

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Renstra 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi								
Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan								
1	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
2	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	4	4	4	4	4	4

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Terhadap Layanan PPSU	Persepsi						
3	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
4	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi								
1	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
2	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
3	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4

BAB 5
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran yang terukur dan terarah. Realisasi Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 nantinya dapat mendukung tercapainya visi-misi serta tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta serta berhasil mendukung perbaikan fundamental untuk mencapai visi jangka panjang Jakarta Kota Global 2045. Tujuan Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029 adalah "*Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Selatan*". Sasaran Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029 adalah (1) *meningkatnya kualitas layanan publik dan hasil pembangunan yang optimal* dan (2) *meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat*.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 menjadi input untuk evaluasi kinerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam tugas dan fungsinya setiap tahunnya. Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025-2029 memiliki indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci sebagai target yang akan dicapai oleh setiap unsur perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan setiap tahunnya. Realisasi ketercapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 adalah perwujudan dari alokasi anggaran setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap tahunnya.

Indikator kinerja utama terdiri atas (a) nilai kepuasan layanan Kota Administrasi, (b) nilai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan layanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan, dan (c) nilai efektifitas koordinasi Kota Administrasi. Indikator kinerja kunci terbagi atas (1) nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan (2) nilai efektifitas koordinasi Kota Administrasi. Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas (a) nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan

Kelurahan, (b) nilai kepuasan terhadap layanan pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM), (c) nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU, (d) nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA, (e) nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum. Nilai efektifitas koordinasi Kota Administrasi terdiri atas (a) nilai efektivitas koordinasi bidang pemerintahan, (b) nilai efektivitas koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan, dan (c) nilai efektivitas koordinasi bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat.

5.3 PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Dokumen Renstra perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2025-2029 juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja perangkat daerah. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra yang ditetapkan sangat diperlukan pemantauan dan pengawasan, dukungan, serta komitmen yang berkelanjutan dari setiap unit kerja. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

@KOTAJAKARTASELATAN
@KOTAJAKARTASELATAN
@KOTAJAKARTASELATAN
@KOTAJAKSEL
selatan.jakarta.go.id